

Katalog : 4102022.12

# INDIKATOR KETAHANAN SOSIAL

## PROVINSI SUMATERA UTARA

# 2021



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

# INDIKATOR KETAHANAN SOSIAL

PROVINSI SUMATERA UTARA

# 2021



# INDIKATOR KETAHANAN SOSIAL PROVINSI SUMATERA UTARA 2021

**ISSN** : 2745-7079  
**Katalog** : 4102022.12  
**No. Publikasi** : 12000.2165  
**Ukuran Buku** : 18,2 cm x 25,7 cm  
**Jumlah Halaman** : xii + 87 hal

**Naskah:**

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

**Penyunting:**

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

**Gambar Kulit:**

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

**Diterbitkan Oleh:**

©Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

**Dicetak Oleh:**

C.V.

*“Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau  
menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil  
tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik”*

**TIM PENYUSUN**

**INDIKATOR KETAHANAN SOSIAL  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
2021**

Penanggung Jawab Umum:  
Nurul Hasanudin, SST, M.Stat

Penanggung Jawab Teknis:  
Azantaro, SE, M.Si

Editor:  
Cahyono Panca Aridesyadi, S.ST

Penulis:  
Thaswin Eddy, S.Si

Cover dan Infografis:  
Prio Arif Budiman, S.Si



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara telah menyelesaikan penyusunan Publikasi Indikator Ketahanan Sosial Provinsi Sumatera Utara 2021. Statistik Ketahanan Sosial merupakan salah satu dimensi penting untuk mengembangkan statistik sosial dan mengukur dinamika sosial yang terjadi di masyarakat.

Publikasi Indikator Ketahanan Sosial Provinsi Sumatera Utara 2021 ini menyajikan gambaran yang komprehensif tentang masalah ketahanan sosial, yang meliputi Statistik Ketahanan Wilayah, Statistik Lingkungan Hidup, Statistik Kerawanan Sosial dan Statistik Ketahanan Politik dan Keamanan di wilayah Sumatera Utara. Dalam publikasi ini disajikan juga penjelasan mengenai lingkup data dan istilah teknis yang digunakan, sehingga pengguna data bisa lebih mudah memahami informasi yang disajikan.

Diharapkan publikasi ini mampu memberikan gambaran singkat mengenai situasi ketahanan sosial di wilayah Provinsi Sumatera Utara sehingga dapat menjadi bahan rujukan bagi perencana pembangunan, peneliti, akademisi, serta pemakai data umumnya. Kepada semua pihak yang telah turut membantu sehingga publikasi ini dapat terwujud, kami ucapkan terima kasih. Kritik dan saran bagi penyempurnaan publikasi ini di masa mendatang sangat kami harapkan.

Medan, Desember 2022  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Provinsi Sumatera Utara



Nurul Hasanudin, SST, M.Stat



# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	vii
Daftar Tabel .....	viii
Daftar Gambar .....	ix

## Bab 1



<b>PENDAHULUAN</b> .....	3
1.1 Latar Belakang .....	3
1.2 Maksud dan Tujuan .....	4
1.3 Ruang Lingkup .....	4
1.4 Sumber Data .....	5



## Bab 2

<b>PENJELASAN TEKNIS</b> .....	9
--------------------------------	---

## Bab 3



<b>3.1 KETAHANAN WILAYAH</b> .....	19
3.1.1 Kondisi Geografis .....	19
3.1.2 Bencana Alam .....	22
3.1.3 Potensi Desa .....	24
3.1.4 Potensi Sumber Daya Alam .....	29
<b>3.2 LINGKUNGAN HIDUP</b> .....	35
<b>3.3 KERAWANAN SOSIAL</b> .....	39
3.3.1 Kependudukan .....	40
3.3.2 Ketenagakerjaan .....	50
3.3.3 Kemiskinan .....	54
3.3.4 Ketimpangan Pengeluaran .....	60
3.3.5 Indeks Kebahagiaan .....	63
3.3.6 Sosial Budaya .....	70
<b>3.4 KETAHANAN POLITIK &amp; KEAMANAN</b> .....	73
3.4.1 Aspek dan Indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Metode Baru .....	74
3.4.2 Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumatera Utara Metode Baru .....	75
3.4.3 Politik .....	79
3.4.4 Keamanan dan Ketertiban .....	85

# DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 3.1.1	Letak Geografis dan Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota, 2021 ..... 20
Tabel 3.1.2	Penggolongan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara menurut Wilayah ..... 21
Tabel 3.1.3	Suhu Udara menurut Stasiun, 2020 ..... 22
Tabel 3.1.4	Jumlah Wilayah Administrasi Pemerintahan di Pulau Terluar Menurut Kabupaten, 2021 ..... 27
Tabel 3.1.5	Banyaknya Kejadian Bencana Alam Yang Terjadi Di Desa/Kelurahan Menurut Jenis Bencana di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 ..... 28
Tabel 3.1.6	Luas Panen, Produksi dan Rata-Rata Produksi jagung menurut Kabupaten/Kota,2020-2021 ..... 31
Tabel 3.1.7	Luas Tanaman dan Produksi Karet Tanaman Perkebunan Rakyat menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020 ..... 32
Tabel 3.1.8	Luas Tanaman dan Produksi Kelapa Sawit Tanaman Perkebunan Rakyat menurut Kabupaten/Kota, 2017 - 2020 ..... 33
Tabel 3.1.9	Luas Tanaman dan Produksi Kopi Tanaman Perkebunan Rakyat menurut Kabupaten/Kota, 2017 – 2020 ..... 34
Tabel 3.3.1	Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, dan Kepadatan Penduduk menurut Kabupaten/Kota, 2020 ..... 40
Tabel 3.3.2	Jumlah Rumah Tangga dan Rata-rata Banyaknya Anggota Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2010 dan 2020 ..... 45
Tabel 3.3.3	Jumlah dan Persentase Penduduk Sumatera Utara menurut Kelompok Umur, 2010 – 2020 ..... 46
Tabel 3.4.1	Kandidat Resmi Pemilihan Presiden 2019 yang Ditetapkan KPU ..... 79
Tabel 3.4.2	Hasil Perolehan Suara Pemilihan Presiden 2019 di Sumatera Utara ..... 81
Tabel 3.4.3	Hasil Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 27 Juni 2018 ..... 83

# DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 3.1.1	Jumlah Gempa Bumi di Sumatera Utara dan Sekitarnya, 2015 - 2020 23
Gambar 3.1.2	Persentase Wilayah Menurut Keberadaan Sekolah, 2021 ..... 24
Gambar 3.1.3	Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Keluarga Pengguna Listrik dan Penerangan di Jalan Utama Desa 2021 ..... 25
Gambar 3.1.4	Persentase Desa/Kelurahan Menurut Lalu-Lintas dari dan ke Desa/Kelurahan serta Keberadaan Jalan yang Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4 Atau Lebih ..... 26
Gambar 3.1.5	Jenis Bencana Alam Yang Paling Banyak Terjadi Di Desa/Kelurahan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 ..... 27
Gambar 3.1.6	Luas Panen (Ha), Produksi (Ton) dan Produktivitas (Kw/Ha) Padi Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 & 2021 ..... 29
Gambar 3.1.7	Luas Panen dan Produksi Jagung, 2010-2021..... 30
Gambar 3.2.1	Persentase Rumah tangga Menurut Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal Yang Ditempati, 2021 ..... 36
Gambar 3.2.2	Persentase Rumah tangga Menurut Jenis Atap Bangunan Tempat Tinggal Yang Ditempati, 2021 ..... 36
Gambar 3.2.3	Persentase Rumah tangga Menurut Penggunaan Air Layak Minum, 2021 ..... 37
Gambar 3.2.4	Persentase Rumah tangga menurut Kelayakan Kondisi Tempat Tinggal , 2021 ..... 38
Gambar 3.3.1	Pertumbuhan Penduduk Sumatera Utara (%), 1980 – 2020 ..... 41
Gambar 3.3.2	Persentase Luas Wilayah dan Penduduk Sumatera Utara Menurut Kawasan, 2020 ..... 42
Gambar 3.3.3	Peta Kepadatan Penduduk Sumatera Utara Menurut Kabupaten/Kota, 2020 ..... 43
Gambar 3.3.4	Kepadatan Penduduk Sumatera Utara Menurut Kabupaten/Kota, 2020 (Jiwa/Km <sup>2</sup> ) ..... 44
Gambar 3.3.5	Struktur Umur Penduduk Sumatera Utara, 2010 - 2020 ..... 47
Gambar 3.3.6	Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) Penduduk Sumatera Utara, 2010 dan 2020 ..... 48
Gambar 3.3.7	Rasio Jenis Kelamin Penduduk Sumatera Utara menurut Kabupaten/Kota, 2020 ..... 49
Gambar 3.3.8	Penduduk Sumatera Utara Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin, 2020 dan 2021 ..... 50
Gambar 3.3.9	Penduduk Sumatera Utara yang Berumur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja, 2020 dan 2021 ..... 51
Gambar 3.3.10	Rasio Penduduk Bekerja Terhadap Penduduk Usia Kerja ( <i>Employment To Population Ratio</i> – EPR) Sumatera Utara, 2021 ..... 52

	Halaman
Gambar 3.3.11	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumatera Utara, 2010-2021..... 53
Gambar 3.3.12	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Sumatera Utara Berdasarkan Kelompok Pendidikan, 2021 ..... 53
Gambar 3.3.13	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumatera Utara Berdasarkan Kabupaten/Kota, 2021 ..... 54
Gambar 3.3.14	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Sumatera Utara, September 2018 – September 2021 ..... 55
Gambar 3.3.15	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Sumatera Utara Berdasarkan Kabupaten/Kota, 2021 ..... 56
Gambar 3.3.16	Indeks Kedalaman Kemiskinan ( <i>Poverty Gap Index – P1</i> ) Sumatera Utara menurut Daerah, September 2018-September 2021 ..... 57
Gambar 3.3.17	Indeks Kedalaman Kemiskinan ( <i>Poverty Gap Index – P1</i> ) Sumatera Utara Berdasarkan Kabupaten/Kota, 2021 ..... 58
Gambar 3.3.18	Indeks Keparahan Kemiskinan ( <i>Poverty Severity Index – P2</i> ) Sumatera Utara menurut Daerah, September 2018 – September 2021 ..... 59
Gambar 3.3.19	Indeks Keparahan Kemiskinan ( <i>Poverty Severity Index – P2</i> ) Sumatera Utara Berdasarkan Kabupaten/Kota, 2021 ..... 60
Gambar 3.3.20	Gini Rasio Sumatera Utara menurut Daerah September 2020 – September 2021 ..... 61
Gambar 3.3.21	Distribusi Pengeluaran Penduduk Sumatera Utara menurut Daerah dan Kriteria Bank Dunia, September 2021 ..... 62
Gambar 3.3.22	Indeks Indikator Penyusun Indeks Kebahagiaan Sumatera Utara Tahun 2021 ..... 64
Gambar 3.3.23	Indeks Kebahagiaan Sumatera Utara Menurut Klasifikasi Wilayah, 2021 ..... 66
Gambar 3.3.24	Indeks Subdimensi Kepuasan Hidup Personal dan Sosial Menurut Klasifikasi Wilayah, 2021 ..... 66
Gambar 3.3.25	Indeks Kebahagiaan Sumatera Utara Menurut Jenis Kelamin, 2021 ... 66
Gambar 3.3.26	Indeks Kebahagiaan Sumatera Utara Menurut Status Perkawinan, 2021 ..... 67
Gambar 3.3.27	Indeks Subdimensi Kepuasan Hidup Personal dan Sosial Menurut Status Perkawinan, 2021 ..... 68
Gambar 3.3.28	Indeks Kebahagiaan Sumatera Utara Menurut Kelompok Umur, 2021 68
Gambar 3.3.29	Indeks Subdimensi Kepuasan Hidup Personal dan Sosial Menurut Kelompok Umur, 2021 ..... 69
Gambar 3.3.30	Penduduk Sumatera Utara Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut, 2010 ..... 70
Gambar 3.3.31	Penduduk Sumatera Utara Menurut Suku Bangsa, 2010 ..... 71
Gambar 3.4.1	Indeks Demokrasi Indonesia(IDI) Sumatera Utara Aspek Kebebasan, tahun 2021 ..... 76
Gambar 3.4.2	Indeks Demokrasi Indonesia(IDI) Sumatera Utara Aspek Kesenjangan, tahun 2021 ..... 77

	Halaman
Gambar 3.4.3	Indeks Demokrasi Indonesia(IDI) Sumatera Utara Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi, tahun 2021 ..... 78
Gambar 3.4.4	Rekapitulasi Jumlah Pemilih Pada Pemilihan Presiden 2019 di Sumatera Utara ..... 80
Gambar 3.4.5	Urutan Persentase Pemilih Golput pada Pilpres 2019 di Sumatera Utara ..... 82
Gambar 3.4.6	Persentase Perolehan Suara Pasangan Cagub-Cawagub Sumatera Utara 2018 ..... 83
Gambar 3.4.7	Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara pada Pemilihan Umum Legislatif 2019..... 85
Gambar 3.4.8	Tingkat Kejahatan di Provinsi Sumatera Utara menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021 (Kejadian per 1000 penduduk)..... 86
Gambar 3.4.9	Jumlah Penduduk Untuk Setiap Satu Orang Polisi di Sumatera Utara Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2021 ..... 87



# PENDAHULUAN







---

# Bab 1

## Pendahuluan

---

### 1.1 LATAR BELAKANG

Di tengah kompleksitas persoalan dunia saat ini, masyarakat semakin menaruh perhatian pada bagaimana meningkatkan kualitas hidup dalam pengertian yang luas yaitu masyarakat yang aman, damai, bersinergi dan terpenuhinya kebutuhan hidup material dan non-material. Pemerintah dan masyarakat juga semakin tertarik mengetahui posisi kehidupan individual, wilayah dan negara dalam percaturan global terutama yang terkait dengan tingkat kesejahteraan yang dicapai (Hasbullah, 2012). Seperti yang dinyatakan oleh Enrico Giovannini bahwa *“Around the world, societies are increasingly concerned with their quality of life and a consensus is growing around the need to develop a more comprehensive view of progress rather than focusing on the economic one/GDP”* (Enrico Giovannini, Chief Statistician OECD, 2008).

Kegiatan pembangunan di berbagai sektor pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan harkat bangsa dan kesejahteraan masyarakat. Program-program pembangunan secara nasional maupun wilayah dirancang sedemikian rupa sehingga kondisi kesejahteraan sosial terus menuju perbaikan dan keadaan perekonomian membaik. Kondisi sosial ekonomi yang baik pada gilirannya akan mendorong terciptanya sumber daya manusia yang handal dalam mengelola sumber daya lainnya untuk bisa dimanfaatkan dalam meningkatkan harkat dan kesejahteraan rakyat. Proses demikian berlangsung secara berkesinambungan antar waktu serta antar daerah, sehingga kelak akan tercapai cita-cita luhur bangsa yang adil dan makmur. Dalam konteks penyediaan ukuran-ukuran kualitas hidup manusia, maka penyediaan indikator statistik sosial yang lebih berkualitas, tepat, luas, terkini, komprehensif dan merefleksikan jalinan permasalahan dan kemajuan pembangunan di bidang sosial secara sistemik semakin menjadi kebutuhan.

Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu pusat perkembangan di Wilayah Indonesia Barat, khususnya pulau Sumatera, menjadi komponen penting dalam proses pembangunan nasional. Berbagai

kondisi geografis, ekonomi dan sosial politik yang dimiliki Sumatera Utara mendukung peranan penting daerah ini dalam kancah nasional maupun internasional.

Keberhasilan pelaksanaan program pembangunan dapat diukur dari berbagai aspek fisik maupun non fisik. Salah satu aspek penting yang dipakai sebagai indikator adalah kondisi ketahanan sosial, sebab data statistik terutama di bidang ketahanan sosial bisa digunakan untuk menganalisis ketangguhan masyarakat menghadapi berbagai pengaruh yang mengancam stabilitas dan eksistensinya.

Berdasarkan pola pikir demikian, penyediaan data statistik ketahanan sosial akan sangat bermanfaat bagi para perencana dan pembuat kebijakan dalam mendiagnosa sebab-sebab perubahan sosial yang terjadi serta dampak yang ditimbulkannya. Krisis multi dimensional yang sedang berlanjut serta pengaruh globalisasi yang terjadi pada gilirannya akan berpengaruh pada kondisi kehidupan masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan masyarakat akan sangat tergantung dari kondisi ekonomi, lingkungan, wawasan berpikir, kebebasan untuk menyalurkan aspirasi, politik, sosial budaya dan sebagainya. Faktor-faktor tersebut perlu diterjemahkan dalam berbagai kegiatan statistik untuk mendapatkan potret ketahanan masyarakat dan trennya dari waktu ke waktu.

Publikasi Indikator Ketahanan Sosial Provinsi Sumatera Utara 2021 mencoba menjawab kebutuhan informasi statistik ketahanan sosial yang diperlukan. Kemampuan pemerintah, perencana dan para pakar dalam mengkaji kondisi ketahanan sosial suatu wilayah akan sangat membantu masing-masing pihak untuk merumuskan kebijakan serta rencana program pembangunan untuk masa mendatang.

## **1.2 MAKSUD DAN TUJUAN**

Publikasi Indikator Ketahanan Sosial Provinsi Sumatera Utara 2021 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi ketahanan sosial di Provinsi Sumatera Utara. Dari Indikator Ketahanan Sosial Provinsi Sumatera Utara 2021 ini diharapkan semua pihak yaitu perencana, pelaksana dan pengamat sosial ekonomi mendapatkan kejelasan mengenai berbagai dimensi ketahanan sosial, sehingga rencana maupun kebijakan pembangunan bisa disusun berdasarkan kondisi yang ada.

## **1.3 RUANG LINGKUP**

Statistik ketahanan sosial merupakan salah satu dimensi penting untuk mengembangkan statistik sosial dan mengukur dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Berbagai indikator yang relevan dengan ketahanan sosial akan disajikan dalam publikasi ini yang meliputi, Statistik Ketahanan Wilayah, Statistik Lingkungan Hidup, Statistik Kerawanan Sosial dan Statistik Ketahanan Politik dan Keamanan.

#### 1.4 SUMBER DATA

Sumber data yang digunakan dalam penulisan Publikasi Indikator Ketahanan Sosial Provinsi Sumatera Utara 2021, adalah:

- Hasil Sensus Penduduk (SP) 2010 & 2020
- Pendataan Potensi Desa (Podes) 2021
- Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2021
- Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional 2021
- Hasil Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan 2017 & 2021
- Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumatera Utara 2021
- Indikator Statistik
- Data Sekunder
- dll

<https://sumut.bps.go.id>



# PENJELASAN

# TEKNIS







---

# Bab 2

## Penjelasan Teknis

---

Publikasi ini disusun dengan cara memanfaatkan sejumlah data dan informasi statistik penting yang telah diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik baik pusat maupun BPS Provinsi Sumatera Utara serta instansi terkait. Untuk memudahkan pemanfaatan publikasi ini, data dan informasi statistik tersebut dibagi ke dalam 4 pokok bahasan, yang kemudian diikuti dengan penjelasan istilah teknis yang ada di masing-masing pokok bahasan tersebut. Secara rinci pembagian dan uraian teknis tersebut adalah sebagai berikut:

**1. Statistik Ketahanan Wilayah, meliputi:**

- **Kondisi Geografis** : Letak geografis, luas wilayah, pembagian kawasan, dan iklim.
- **Bencana Alam** : Gempa bumi.
- **Potensi Desa** : Infrastruktur, desa/kelurahan terluar.
- **Potensi Sumber Daya Alam** : Tanaman pangan dan perkebunan.

**2. Statistik Lingkungan Hidup**

- **Kondisi Perumahan** : Penguasaan bangunan tempat tinggal, jenis atap, dan air layak.

**3. Statistik Kerawanan Sosial, meliputi:**

- **Kependudukan** : Jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, persebaran dan kepadatan Penduduk, penduduk menurut jenis kelamin, dan penduduk menurut komposisi umur.
- **Ketenagakerjaan** : Bekerja, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan *Employment To Population Ratio* (EPR).
- **Kemiskinan**: jumlah dan persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan.
- **Ketimpangan Pengeluaran** : *Gini Ratio*, Kriteria Bank Dunia
- **Indeks Kebahagiaan** : Kepuasan Hidup (*Life Satisfaction*), Perasaan (*Affect*), dan Makna Hidup (*Eudaimonia*)
- **Sosial Budaya** : Agama dan suku bangsa.

#### 4. Ketahanan Politik dan Keamanan, meliputi:

- **Indeks Demokrasi Indonesia**
- **Politik:** Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Daerah Gubernur Sumatera Utara, dan Pemilihan Wakil Rakyat.
- **Keamanan dan Ketertiban:** Banyaknya peristiwa kejahatan/pelanggaran, dan jumlah aparat keamanan.

Adapun beberapa istilah teknis yang digunakan dalam publikasi ini :

**Wilayah administrasi** adalah wilayah administrasi yang sudah memiliki dasar hukum yang sah menurut Kementerian Dalam Negeri.

**Gempa bumi** adalah peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Akumulasi energi penyebab terjadinya gempa bumi dihasilkan dari pergerakan lempeng-lempeng tektonik dan vulkanik. Energi yang dihasilkan dipancarkan kesegala arah berupa gelombang gempa bumi sehingga efeknya dapat dirasakan sampai ke permukaan bumi (BMKG).

**Air minum layak (berkualitas)** adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (kran), kran umum, *hydrant* umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung.

#### **Rumah Layak Huni**

Kategori-kategori yang digunakan, dikatakan tidak layak huni jika:

1. Luas lantai perkapita:  $\leq 7,2$  m<sup>2</sup>
2. Jenis atap rumah terbuat dari daun atau lainnya.
3. Jenis dinding rumah terbuat dari bambu atau lainnya.
4. Jenis lantai tanah
5. Tidak mempunyai akses ke sanitasi layak
6. Sumber penerangan bukan listrik
7. Tidak ada akses ke air minum layak

Penggolongan berdasarkan kategori yang dimiliki rumah tangga:

1. Terdapat < 3 kategori yang memenuhi rumah tidak layak huni, maka dianggap rumah layak huni.

2. 3-4 memenuhi kriteria rumah tidak layak huni, dianggap Rawan Layak Huni.
3. 5-7 memenuhi kriteria rumah tidak layak huni, dianggap Tidak Layak Huni.

**Rumah tangga** adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Rumah tangga biasanya terdiri dari bapak, ibu, dan anak.

**Penduduk** adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 12 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 12 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

**Laju pertumbuhan penduduk** adalah rata-rata tahunan laju perubahan jumlah penduduk di suatu daerah selama periode waktu tertentu.

**Kepadatan penduduk** adalah jumlah penduduk di suatu daerah dibagi dengan luas daerah tersebut, biasanya dinyatakan sebagai penduduk per km<sup>2</sup>.

**Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*)** adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun atau penduduk muda, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas atau penduduk tua dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun atau penduduk usia produktif.

Rumus:

$$RK = \frac{P_{(0-14)} + P_{65+}}{P_{(15-64)}}$$

Keterangan :

RK = Rasio Ketergantungan

$P_{(0-14)}$  = Jumlah Penduduk Usia Muda (0 - 14 tahun)

$P_{65+}$  = Jumlah Penduduk Usia Tua (65 tahun ke atas)

$P_{(15-64)}$  = Jumlah Penduduk Usia Produktif (15 - 64 tahun)

**Rasio jenis kelamin** adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan di suatu daerah dalam waktu tertentu.

Rumus:

$$RJK = \frac{\sum \text{Penduduk Laki} - \text{laki}}{\sum \text{Penduduk Perempuan}} \times 100$$

**Penduduk usia kerja** adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih.

**Penduduk yang termasuk angkatan kerja** adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

**Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja** adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

**Bekerja** adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/ kegiatan ekonomi.

**Pengangguran/Penganggur terbuka**, terdiri dari:

- a) Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.
- b) Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
- c) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
- d) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.  
(lihat pada "*An ILO Manual on Concepts and Methods*")

**Mencari pekerjaan** adalah kegiatan seseorang yang pada saat survei orang tersebut sedang mencari pekerjaan, seperti mereka:

- a) Yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.
- b) Yang sudah pernah bekerja, karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan.
- c) Yang bekerja atau mempunyai pekerjaan, tetapi karena sesuatu hal masih berusaha untuk mendapatkan pekerjaan lain.

Usaha mencari pekerjaan ini tidak terbatas pada seminggu sebelum pencacahan, jadi mereka yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan dan yang permohonannya telah dikirim lebih dari satu minggu yang lalu tetap dianggap sebagai mencari pekerjaan asalkan seminggu yang lalu masih mengharapkan pekerjaan yang dicari. Mereka yang sedang bekerja dan berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang lain tidak dapat disebut sebagai penganggur terbuka.

**Mempersiapkan suatu usaha** adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha/pekerjaan yang "baru", yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, baik dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/pekerja dibayar maupun tidak dibayar. Mempersiapkan yang dimaksud adalah apabila "tindakannya nyata" seperti: mengumpulkan modal atau perlengkapan/alat, mencari lokasi/tempat, mengurus surat ijin usaha dan sebagainya, telah/sedang dilakukan.

Mempersiapkan usaha tidak termasuk yang baru merencanakan, berniat, dan baru mengikuti kursus/pelatihan dalam rangka membuka usaha.

Mempersiapkan suatu usaha baru nantinya cenderung pada pekerjaan sebagai berusaha sendiri (*own account worker*) atau sebagai berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar atau sebagai berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar.

Penjelasan:

Kegiatan mempersiapkan suatu usaha/pekerjaan tidak terbatas dalam jangka waktu seminggu yang lalu saja, tetapi bisa dilakukan beberapa waktu yang lalu asalkan seminggu yang lalu masih berusaha untuk mempersiapkan suatu kegiatan usaha.

**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)** adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

Rumus :

$$TPT = \frac{\sum \text{Pengangguran}}{\sum \text{Angkatan Kerja}} \times 100$$

**Employment To Population Ratio – EPR** adalah rasio penduduk yang bekerja terhadap penduduk usia kerja. Digunakan untuk melihat gambaran informasi tentang bagaimana suatu pembangunan ekonomi mampu menciptakan lapangan kerja.

Rumus :

$$EPR = \frac{\sum \text{Bekerja}}{\sum \text{Penduduk Usia Kerja}} \times 100$$

**Pendidikan tertinggi yang ditamatkan** adalah tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi suatu tingkatan sekolah dengan mendapatkan tanda tamat (ijazah).

**Kemiskinan** dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. BPS menggunakan pendekatan ini berdasarkan pada konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*).

**Penduduk Miskin** adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan.

**Garis kemiskinan** adalah penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non-Makanan. Garis kemiskinan makanan (GKM) adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari.

Garis kemiskinan non makanan (GKNM) merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

**Persentase penduduk Miskin – Head Count Index (P0)** adalah persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK).

**Indeks Kedalaman Kemiskinan - Poverty Gap Index (P1)** merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

**Indeks Keparahan Kemiskinan – Poverty Severity Index (P2)** memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Ukuran tingkat kemiskinan menggunakan Formula Foster-Greer- Thorbecke (FGT):

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Keterangan:

$\alpha = 0, 1, 2$

$z = \text{GK}$

$y_i = \text{Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah GK } (i=1, 2, 3, \dots, q),$   
 $y_i < z$

$q = \text{Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan}$

$n = \text{Jumlah penduduk}$

**Gini ratio** adalah salah satu alat yang digunakan untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk.

Nilai gini rasio berkisar antara 0 dan 1, jika:

$G < 0,4 \quad \rightarrow \text{Tingkat ketimpangan rendah}$

$0,4 \leq G \leq 0,5 \quad \rightarrow \text{Tingkat ketimpangan sedang/moderate}$

$G > 0,5 \quad \rightarrow \text{Tingkat ketimpangan tinggi}$

### **Kriteria Bank Dunia**

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk menurut kriteria Bank Dunia terpusat pada 40 persen penduduk dengan pengeluaran terendah. Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk ini digambarkan oleh porsi pengeluaran dari kelompok pengeluaran ini terhadap seluruh pengeluaran

penduduk, dengan penggolongan ketimpangan pengeluaran sebagai berikut:

- Ketimpangan pengeluaran tinggi (*highly inequality*), jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terendah kurang dari 12 persen,
- Ketimpangan pengeluaran sedang (*moderate inequality*), jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terendah berada diantara 12 persen sampai dengan 17 persen,
- Ketimpangan pengeluaran rendah (*low inequality*), jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terendah di atas 17 persen.

**Indeks Kebahagiaan** merupakan indeks komposit yang dihitung secara tertimbang menggunakan dimensi dan indikator dengan skala 0-100. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan tingkat kehidupan penduduk yang semakin bahagia. Sebaliknya, semakin rendah nilai indeks maka semakin merasa tidak bahagia.

Indeks kebahagiaan disusun oleh tiga dimensi, yaitu kepuasan hidup (*Life Satisfaction*), perasaan (*Affect*), dan makna hidup (*Eudaimonia*).

**Indeks Demokrasi Indonesia** merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan, Kesetaraan, dan Kapasitas Lembaga Demokrasi .

Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu : (1) *review* surat kabar lokal, (2) *review* dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) *Focus Group Discussion* (FGD), dan (4) *review* berita online.

Untuk menggambarkan capaian tingkat demokrasi dalam IDI digunakan skala 0 – 100. Skala ini merupakan skala normatif di mana 0 adalah tingkat terendah dan 100 adalah tingkat tertinggi. Tingkat terendah (nilai indeks = 0) secara teoretik dapat terjadi bila semua indikator mendapatkan skor yang paling rendah (skor 0). Sebaliknya, tingkat tertinggi (nilai indeks = 100) secara teoritik dimungkinkan apabila seluruh indikator memperoleh skor tertinggi. Selanjutnya, untuk memberi makna lebih lanjut dari variasi indeks yang dihasilkan, skala 0 – 100 tersebut dibagi ke dalam tiga kategori tingkat demokrasi, yaitu : *High Performing Democracy* (Indeks > 80), *Medium Performing Democracy* (Indeks 60 - 80) dan *Low Performing Democracy* (Indeks < 60).

**Pemilihan Umum**, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**Golongan putih (Golput)** adalah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih. Angka Golput adalah persentase pemilih yang tidak menggunakan hak pilih terhadap jumlah seluruh penduduk yang berhak memilih;

**Partisipasi Penduduk dalam Pemilu** adalah penduduk yang menggunakan hak pilih dalam Pemilu. Angka partisipasi adalah persentase pemilih yang menggunakan hak pilih terhadap jumlah seluruh penduduk yang berhak memilih.

**Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP** dibagi atas kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Pembagian tersebut didasarkan atas perbedaan prinsipil. Pembagian kejahatan disusun dalam Buku II KUHP dan pelanggaran disusun dalam Buku III KUHP. Undang-undang hanya memberikan penggolongan kejahatan dan pelanggaran, akan tetapi tidak memberikan arti yang jelas.

**Kejahatan** merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum, sedangkan pelanggaran merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa Negara.

<https://sumut.bps.go.id>

# KETAHANAN WILAYAH







---

## **Bab 3.1**

# **Ketahanan Wilayah**

---

Ketahanan wilayah adalah situasi yang membuat masyarakat di suatu wilayah lentur dalam menghadapi berbagai ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar wilayah. Ancaman internal maupun eksternal mencakup ancaman terhadap fisik wilayah/lingkungan fisik, kehidupan sosial, ekonomi maupun budaya. Suatu wilayah disebut memiliki ketahanan jika lingkungan fisiknya mendukung, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia cukup baik dan ketahanan sosialnya juga kuat.

### **3.1.1 Kondisi Geografis**

Provinsi Sumatera Utara merupakan provinsi yang posisinya berada di bagian barat Indonesia, terletak pada garis 1°– 4° Lintang Utara dan 98°– 100° Bujur Timur. Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Aceh, sebelah Timur dengan Negara Malaysia di Selat Malaka, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Riau dan Sumatera Barat, dan di sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia. Luas daratan provinsi Sumatera Utara adalah 72.981,23 Km<sup>2</sup> atau 3,72% dari luas Wilayah Republik Indonesia, sebagian besar berada di daratan pulau Sumatera dan sebagian kecil berada di pulau Nias, pulau – pulau Batu, serta beberapa pulau kecil, baik di bagian barat maupun di bagian timur pantai pulau Sumatera.

Berdasarkan luas daerah menurut kabupaten/kota di Sumatera Utara, daerah dengan luas terbesar adalah Kabupaten Langkat dengan luas 6.262,00 Km<sup>2</sup> atau 8,58% dari total luas Sumatera Utara, diikuti Kabupaten Mandailing Natal dengan luas 6.134,00 Km<sup>2</sup>, atau sekitar 8,41%, kemudian Kabupaten Tapanuli Selatan dengan luas 6.030,47 Km<sup>2</sup> atau sekitar 8,26%. Sedangkan daerah dengan luas terkecil adalah Kota Tebing Tinggi dengan luas 31,00 Km<sup>2</sup> atau sekitar 0,04 % dari total luas wilayah Sumatera Utara.

Tabel 3.1.1  
Letak Geografis dan Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota, 2021

1. Geografis Sumatera Utara	: 1° - 4°	Lintang Utara		
	: 98° - 100°	Bujur Timur		
2. Luas Wilayah	: 72 981,23 km <sup>2</sup>			
3. Letak diatas Permukaan Laut	: Gunungsitoli	6	- 600 m	280,78 km <sup>2</sup>
	Padangsidempuan	260	- 1 100 m	114,66 km <sup>2</sup>
	Binjai	0	30 m	59,19 km <sup>2</sup>
	Medan	2,5	- 37,5 m	265,00 km <sup>2</sup>
	Tebing Tinggi	18	- 34 m	31,00 km <sup>2</sup>
	Pematangsiantar	400	- 500 m	55,66 km <sup>2</sup>
	Tanjungbalai	0	- 3 m	107,83 km <sup>2</sup>
	Sibolga	0	- 200 m	41,31 km <sup>2</sup>
	Nias Barat	0	- 800 m	473,73 km <sup>2</sup>
	Nias Utara	0	- 478 m	1 202,78 km <sup>2</sup>
	Labuhanbatu Utara	0	- 700 m	3 570,98 km <sup>2</sup>
	Labuhanbatu Selatan	0	- 500 m	3 596,00 km <sup>2</sup>
	Padang Lawas	0	- 1 915 m	3 892,74 km <sup>2</sup>
	Padang Lawas Utara	0	- 1 915 m	3 918,05 km <sup>2</sup>
	Batu Bara	0	- 50 m	922,2 km <sup>2</sup>
	Serdang Bedagai	0	- 500 m	1 900,22 km <sup>2</sup>
	Samosir	904	- 2 157 m	2 069,05 km <sup>2</sup>
	Pakpak Bharat	700	- 1 500 m	1 218,30 km <sup>2</sup>
	Humbang Hasundutan	330	- 2 075 m	2 335,33 km <sup>2</sup>
	Nias Selatan	0	- 720 m	1 825,20 km <sup>2</sup>
	Langkat	0	- 1 200 m	6 262,00 km <sup>2</sup>
	Deli Serdang	0	- 500 m	2 241,68 km <sup>2</sup>
	Karo	200	- 1 500 m	2 127,00 km <sup>2</sup>
	Dairi	400	- 1 700 m	1 927,80 km <sup>2</sup>
	Simalungun	0	- 1 400 m	4 369,00 km <sup>2</sup>
	Asahan	0	- 1 000 m	3 702,21 km <sup>2</sup>
	Labuhanbatu	0	- 700 m	2 156,02 km <sup>2</sup>
	Toba	900	- 2 200 m	2 328,89 km <sup>2</sup>
	Tapanuli Utara	150	- 1 700 m	3 791,64 km <sup>2</sup>
	Tapanuli Tengah	0	- 1 166 m	2 188,00 km <sup>2</sup>
	Tapanuli Selatan	0	- 1 985 m	6 030,47 km <sup>2</sup>
	Mandailing Natal	0	- 1 315 m	6 134,00 km <sup>2</sup>
	Nias	0	- 800 m	1 842,51 km <sup>2</sup>

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Topografis Wilayah Sumatera Utara terdiri dari daerah pantai, dataran rendah dan dataran tinggi serta pegunungan Bukit Barisan yang membujur di tengah-tengah dari utara ke selatan. Kemiringan tanah antara 0-12% seluas 65,51%, 12-40% seluas 8,64% dan diatas 40% seluas 24,28%, sedangkan luas Wilayah Danau Toba 112.920 Ha atau 1,57%. Berdasarkan kondisi letak dan kondisi alam, Sumatera Utara dibagi atas 3 (tiga) bagian yaitu bagian Timur dengan keadaan relatif datar atau biasa disebut Kawasan Pantai Timur, bagian tengah bergelombang sampai berbukit yang biasa disebut Dataran Tinggi dan bagian Barat merupakan dataran bergelombang atau biasa disebut Kawasan Pantai Barat.

Tabel 3.1.2  
Penggolongan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara menurut Wilayah

Pantai Timur	Dataran Tinggi	Pantai Barat
Labuhan Batu	Tapanuli Utara	Nias
Asahan	Toba Samosir	Mandailing Natal
Deli Serdang	Simalungun	Tapanuli Selatan
Langkat	Dairi	Tapanuli Tengah
Serdang Bedagai	Karo	Nias Selatan
Batu Bara	Humbang Hasundutan	Padang Lawas Utara
Labuhan Batu Selatan	Pakpak Bharat	Padang Lawas
Labuhan Batu Utara	Samosir	Nias Utara
Tanjung Balai	Pematang Siantar	Nias Barat
Tebing Tinggi		Sibolga
Medan		Padang Sidempuan
Binjai		Gunung Sitoli

Sumber : Bappeda Sumatera Utara

Wilayah Pantai Timur yang merupakan dataran rendah seluas 24.814,33 Km<sup>2</sup> atau 34,00 persen dari luas wilayah Sumatera Utara adalah daerah yang subur, kelembaban tinggi dengan curah hujan relatif tinggi. Wilayah ini memiliki potensi ekonomi yang tinggi sehingga cenderung semakin padat karena arus migrasi dari wilayah Pantai Barat dan Dataran Tinggi. Banjir juga sering melanda wilayah tersebut akibat berkurangnya pelestarian hutan, erosi dan pendangkalan sungai. Pada musim kemarau terjadi pula kekurangan persediaan air disebabkan kondisi hutan yang kritis. Wilayah Dataran Tinggi dan wilayah Pantai Barat seluas 48.166,90 Km<sup>2</sup> atau 66,00 persen dari luas wilayah Sumatera Utara, sebagian besar merupakan pegunungan, memiliki variasi dalam tingkat kesuburan tanah, iklim,

topografi dan kontur serta daerah yang struktur tanahnya labil. Beberapa danau, sungai, air terjun dan gunung berapi bisa dijumpai di wilayah ini serta sebagian wilayahnya tercatat sebagai daerah gempa tektonik dan vulkanik.

Karena terletak dekat garis khatulistiwa, Provinsi Sumatera Utara tergolong ke dalam daerah beriklim tropis. Ketinggian permukaan daratan Provinsi Sumatera Utara sangat bervariasi, sebagian daerahnya datar, hanya beberapa meter di atas permukaan laut, beriklim cukup panas, sebagian daerah berbukit dengan kemiringan yang landai, beriklim sedang dan sebagian lagi berada pada daerah ketinggian.

Sebagaimana provinsi lainnya di Indonesia, Provinsi Sumatera Utara mempunyai musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Januari sampai dengan Juli dan musim penghujan biasanya terjadi pada bulan Agustus sampai dengan bulan Desember, diantara kedua musim itu terdapat musim pancaroba.

Tabel 3.1.3  
Suhu Udara Menurut Stasiun, 2020

Stasiun	Minimum (°C)		Maksimum (°C)	
	Rata-rata	Absolut	Rata-rata	Absolut
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Deli Serdang	22,8	21,0	34,2	36,0
BMKG Wilayah I	22,4	20,2	34,9	36,2
Belawan	23,6	21,8	33,2	35,6
Tanjung Morawa/KNIA	22,4	20,9	33,5	35,1
Marihat	20,9	20,4	30,2	31,6
Pinangsori	21,1	20,2	34,8	37,1
Gunungsitoli	22,2	20,5	33,8	33,0

Sumber : Stasiun Klimatologi Deli Serdang

### 3.1.2 Bencana Alam

Sumatera Utara tercatat sebagai salah satu provinsi di Indonesia dengan potensi bencana alam yang cukup besar. Berdasarkan lokasi geografis dan geologi Sumatera Utara termasuk kategori rawan bencana. Secara geografis, wilayah Sumatera Utara sebelah barat merupakan daerah lintasan pertemuan Lempeng Eurasia dan Lempeng Australia. Patahan-patahan (*fault*) yang terdapat di daerah pantai barat Sumatera Utara adalah patahan Renun, Angkola, dan Toru (Natawidjaya, 2002).

Dari data-data pencatatan gempa dan fakta keberadaan beberapa patahan yang beraktifitas dapat disimpulkan, bahwa wilayah Sumatera Utara terutama daerah pantai baratnya merupakan daerah dengan potensi gempa yang tinggi. Gempa yang terjadi umumnya adalah gempa dangkal dengan kedalaman berkisar 7-100 km dengan magnitudo antara 3,0 - 8,3 dalam skala Richter (Natawidjaya, 2002).

Berdasarkan data dari BMKG, tercatat bahwa selama tahun 2020 di Sumatera Utara telah terjadi sebanyak 350 kali gempa bumi, turun dibanding tahun sebelumnya. Tapi apabila dibandingkan selama periode 2016-2020 kejadian gempa bumi pada tahun 2020 adalah kejadian gempa bumi dengan jumlah terendah. Sedangkan jumlah tertinggi terjadi pada tahun 2016 yakni sebanyak 548 kali gempa bumi.

Meskipun beberapa kejadian gempa bumi terkadang tidak membahayakan, tidak berdampak secara langsung dan tidak menimbulkan korban jiwa dan harta benda, akan tetapi seyogyanya tetap harus diwaspadai.

Gambar 3.1.1  
Jumlah Gempa Bumi di Sumatera Utara dan Sekitarnya, 2015 – 2020



Sumber : Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Medan

Bencana gempa bumi beserta dampaknya yang terjadi belakangan ini harus disikapi secara serius oleh *stakeholders* bidang perencanaan dan perancangan wilayah. Pemahaman akan resiko tinggal di daerah dengan kerawanan bencana tinggi harus disikapi secara bijak dan pandai menyiasati cara-cara hidup berdampingan dengan kondisi alam yang rawan bencana tersebut. Sehubungan dengan resiko bencana gempa bumi di beberapa wilayah di Sumatera Utara, maka perlu ada upaya antisipasi dan mitigasi bencana.

### 3.1.3 Potensi Desa

Podes 2021 dilaksanakan pada bulan Juni 2021 secara sensus terhadap seluruh wilayah administrasi pemerintahan terendah setingkat desa, yaitu desa, kelurahan, dan Unit Permukiman Transmigrasi (UPT). Wilayah setingkat desa yang didata harus memenuhi tiga syarat, yaitu: 1) mempunyai wilayah dengan batas yang jelas, 2) mempunyai penduduk yang menetap di wilayah tersebut, dan 3) mempunyai pemerintahan. Menurut Podes 2021, tercatat sebanyak 6.132 wilayah administrasi setingkat desa yang terdiri dari 5.437 desa, 692 kelurahan dan 3 UPT yang terdapat di Kabupaten Mandailing Natal. Selain itu, juga tercatat sebanyak 455 kecamatan dan 33 kabupaten/kota.

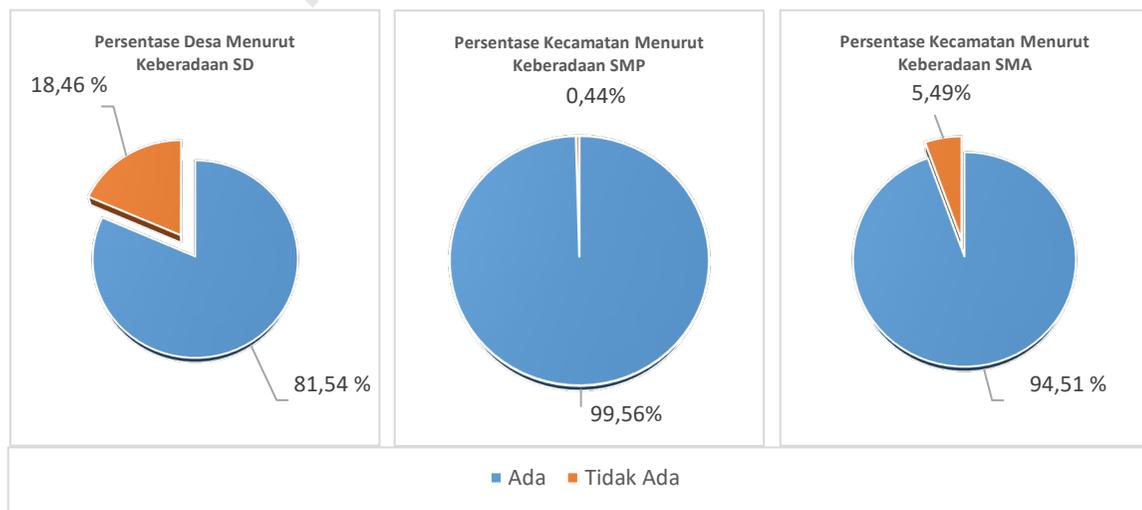
#### 3.1.3.1 Infrastruktur

##### Pendidikan

Hasil Podes 2021 menunjukkan bahwa 81,54 persen desa/kelurahan mempunyai sarana SD (termasuk Madrasah Ibtidaiyah). Hanya 18,46 persen (1.132 desa/kelurahan) yang tidak mempunyai sarana SD/MI. Dari seluruh desa/kelurahan yang tidak mempunyai SD/MI, sebanyak 900 desa/kelurahan (79,51%) diantaranya memiliki jarak tempuh ke SD/MI terdekat melebihi 3 km.

Sarana pendidikan SMP/MTs telah ada di 453 kecamatan (99,56%). Sarana pendidikan SLTA/Sederajat telah ada di 94,51 persen kecamatan yaitu 430 kecamatan. Untuk kecamatan yang tidak mempunyai SLTA/Sederajat, sebanyak 25 kecamatan (5,49%).

Gambar 3.1.2  
Persentase Wilayah Menurut Keberadaan Sekolah, 2021



## Kesehatan

Tersedianya pelayanan kesehatan dasar merupakan hak masyarakat yang menjadi pelayanan pemerintah. Podes 2021 menunjukkan 99,56 persen atau 453 kecamatan mempunyai Puskesmas atau Puskesmas Pembantu (Pustu). Sebanyak 32 kabupaten/kota (96,97%) memiliki Rumah Sakit. Kabupaten yang belum mempunyai Rumah Sakit pada Kabupaten Nias.

## Pasar

Tersedianya pasar di suatu wilayah menjadi salah satu indikator kemajuan perekonomian. Hasil Podes 2021 mencatat sebanyak 886 desa/kelurahan (14,45%) di 369 kecamatan yang sudah ada pasar dengan bangunan (permanen atau semi permanen). Masih terdapat 86 kecamatan (18,90%) yang tidak ada pasar dengan bangunan.

## Listrik

Ketersediaan penerangan listrik menjadi hal yang penting untuk menunjang kemajuan suatu wilayah. Tercatat sebanyak 6.087 desa/kelurahan (99,27%) telah ada keluarga menggunakan listrik, baik listrik PLN maupun non PLN, Sebanyak 5.931 desa/kelurahan terdapat keluarga menggunakan listrik PLN, 692 desa/kelurahan terdapat keluarga menggunakan listrik non PLN. Selain itu, terdapat sebanyak 45 desa/kelurahan (0,73%) dalam 2 kabupaten tidak ada keluarga menggunakan listrik. Kedua kabupaten tersebut, yaitu Mandailing Natal, Nias Selatan.

Gambar 3.1.3  
Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Keluarga Pengguna Listrik dan Penerangan di Jalan Utama Desa 2021

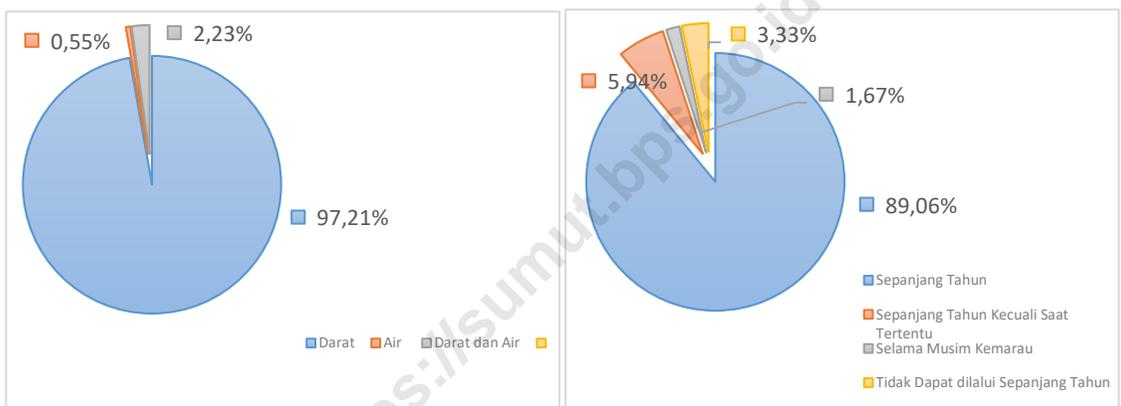


Sebanyak 1.444 desa/kelurahan (23,55%) masih belum tersedia penerangan di jalan utama desa/kelurahan. Nias Utara adalah kabupaten dengan persentase tertinggi desa/kelurahan yang tidak memiliki penerangan di jalan utama desa (diatas 90%).

## Jalan

Infrastruktur transportasi merupakan infrastruktur dasar yang sangat penting sebagai sarana pengangkutan yang berperan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Ketersediaan jalan akan meningkatkan efisiensi proses produksi dan distribusi. Hasil Podes 2021 menunjukkan sebanyak 6.098 desa/kelurahan menggunakan sarana transportasi darat, dimana 5.431 desa/kelurahan (89,06%) sudah tersedia jalan yang dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih sepanjang tahun. Artinya masih terdapat 667 desa/kelurahan (10,94%) yang lalu-lintasnya masih bergantung pada kondisi jalan dan cuaca, serta sama sekali tidak dapat dilalui sepanjang tahun oleh kendaraan bermotor roda 4.

Gambar 3.1.4  
Persentase Desa/Kelurahan Menurut Lalu-Lintas dari dan ke Desa/Kelurahan serta Keberadaan Jalan yang Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4 Atau Lebih



Hasil Podes 2021 juga menunjukkan 96,15% kondisi jalan antar desa/kelurahan terluas di aspal/beton dan diperkeras. Masih terdapat 235 desa/kelurahan (3,85%) dengan prasarana transportasi darat dengan jenis permukaan jalan terluas berupa tanah dan lainnya.

## Perumahan dan Lingkungan

Jenis bahan bakar yang digunakan untuk memasak berperan dalam polusi udara. Hasil Podes 2021 menunjukkan 76,03% desa/kelurahan sebagian besar keluarga menggunakan bahan bakar Gas dan minyak tanah. Terdapat 1.470 desa/kelurahan (23,97%) masih menggunakan kayu bakar dan lainnya sebagai bahan bakar untuk memasak oleh sebagian besar keluarga.

Sedangkan tempat buang air besar dapat menunjukkan sanitasi di sekitar desa/kelurahan. Sebanyak 90,28 persen desa/kelurahan sudah menggunakan jamban untuk buang air besar oleh sebagian besar keluarga, baik jamban milik sendiri, bersama, maupun umum. Dan tercatat 596 desa/kelurahan (9,72%) tidak menggunakan jamban.

### 3.1.3.2 Desa/Kelurahan Terluar

Terdapat 8 desa/kelurahan yang masuk dalam 92 pulau-pulau kecil terluar yang masuk pada kategori pulau terluar berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2017 tentang penetapan pulau-pulau kecil terluar. Sebanyak 3 pulau tersebut menjadi bagian wilayah desa, yaitu Pulau Simuk (Nias Selatan), Pulau Berhala (Serdang Bedagai), dan Pulau Wunga (Nias Utara).

Tabel 3.1.4  
Jumlah Wilayah Administrasi Pemerintahan di Pulau Terluar Menurut Kabupaten, 2021

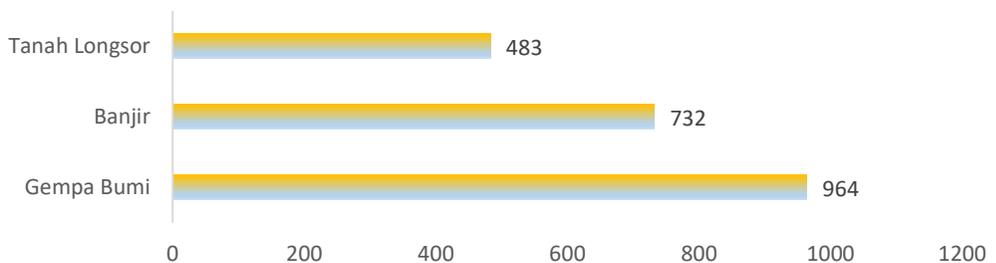
No.	Kabupaten	Jumlah Pulau Terluar		Jumlah Wilayah Administrasi Pemerintahan di Pulau Kecil Terluar	
		Menurut Kepres No. 6 Tahun 2017	Ada Wilayah Desa/Kelurahan (Podes 2021)	Kecamatan	Desa/Kelurahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Nias Selatan	1	1	1	6
2	Serdang Bedagai	1	1	1	1
3	Nias Utara	1	1	1	1
<b>Sumatera Utara</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>8</b>

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

### 3.1.3.3 Bencana Alam

Kejadian bencana alam merupakan suatu peristiwa alam yang dapat mengganggu kehidupan dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Pada tahun 2021 kejadian bencana alam yang paling banyak terjadi di desa/kelurahan di Provinsi Sumatera Utara adalah gempa bumi yang dirasakan di 964 desa/kelurahan, disusul banjir sebanyak 732 desa/kelurahan dan tanah longsor serta angin puyuh/puting beliung/topan masing-masing terjadi di 483 desa/kelurahan.

Gambar 3.1.5  
Jenis Bencana Alam Yang Paling Banyak Terjadi Di Desa/Kelurahan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021



Tabel 3.1.5  
Banyaknya Kejadian Bencana Alam Yang Terjadi Di Desa/Kelurahan Menurut  
Jenis Bencana di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021

Jenis Bencana Alam	Desa/Kelurahan Yang Terdampak	
	Jumlah	Persentase
Tanah Longsor	483	7,88 %
Banjir	732	11,94 %
Banjir Bandang	52	0,85 %
Gempa Bumi	964	15,72 %
Tsunami	4	0,07 %
Gelombang Pasang Laut	78	1,27 %
Angin Puyuh/Puting Beliung/Topan	483	7,88 %
Gunung Meletus	82	1,34 %
Kebakaran Hutan dan Lahan	59	0,96 %
Kekeringan (Lahan)	127	2,07 %
Abrasi	24	0,39 %

Sumber : Podes 2021, BPS Provinsi Sumatera Utara

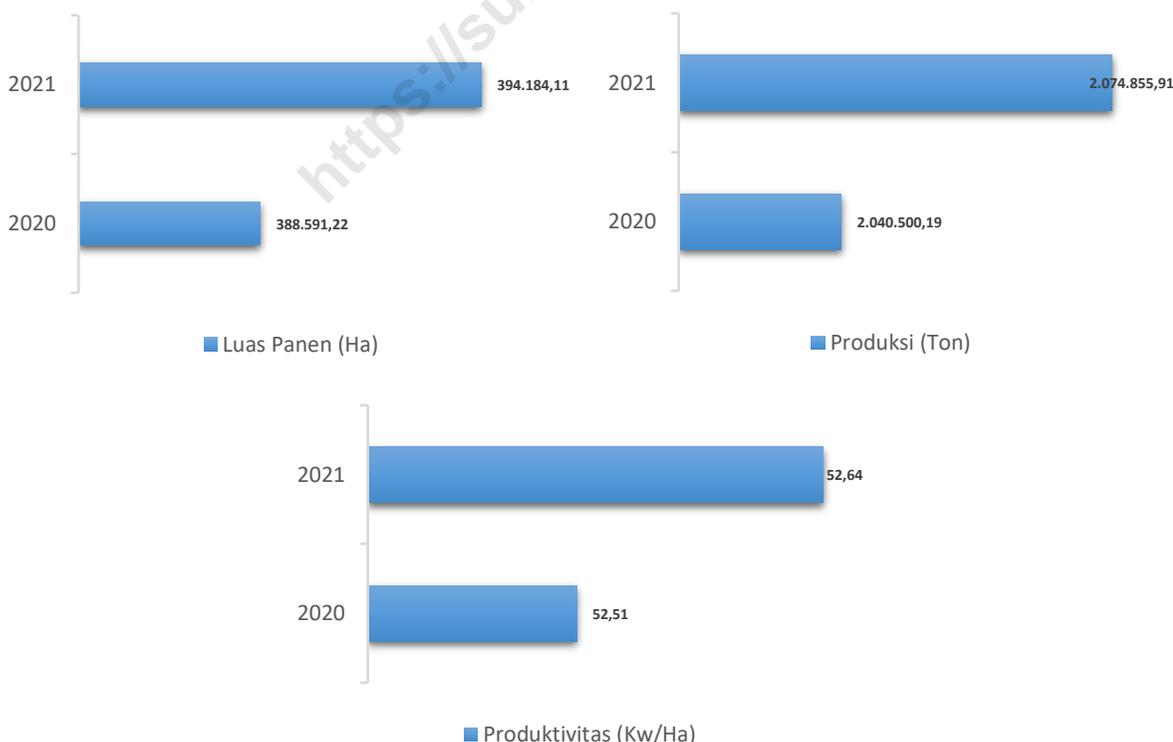
### 3.1.4 Potensi Sumber Daya Alam

Provinsi Sumatera Utara memiliki keunikan tersendiri dalam kerangka perekonomian nasional. Provinsi Sumatera Utara merupakan daerah agraris yang menjadi pusat pengembangan perkebunan dan hortikultura di satu sisi, sekaligus merupakan salah satu pusat perkembangan industri di Indonesia di sisi lain. Ini terjadi karena potensi sumber daya alam dan karakteristik ekosistem yang memang sangat kondusif bagi pembangunan ekonomi daerah dan nasional.

#### 3.1.4.1 Tanaman Pangan

Pada tahun 2021, produksi padi naik sebesar 34.355,72 ton menjadi 2.074.855,91 ton dari 2.040.500,19 ton pada tahun 2020. Demikian juga untuk produktivitas padi mengalami kenaikan tipis dari 52,51 kwintal per hektar pada tahun 2020 menjadi 52,64 kwintal per hektar pada tahun 2021 hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan luas panen pada tahun 2021 dimana pada tahun 2020 luas panen padi di provinsi Sumatera Utara sebesar 388.591,22 hektar dan pada tahun 2021 menjadi 394.184,11 hektar.

Gambar 3.1.6  
Luas Panen (Ha), Produksi(Ton) dan Produktivitas (Kw/Ha) Padi Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 & 2021



Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara

Tanaman palawija juga cukup potensial di Sumatera Utara. Hasil tanaman ini menjadi salah satu andalan ekspor Sumatera Utara terutama ke Negara Singapura dan Malaysia. Produksi jagung Sumatera Utara tahun 2021 sebesar 1.724.398 ton, turun sebesar 241.046,2 ton atau 12,26 persen dibandingkan produksi jagung tahun 2020 yakni sebesar 1.965.444,2 ton. Peningkatan produktivitas tanaman jagung terjadi pada tahun 2021 dimana naik 1,81 kw/ha menjadi 63 kw/ha

Gambar 3.1.7  
Luas Panen dan Produksi Jagung, 2010 – 2021



Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan wilayah administrasi, hampir seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara menjadi produsen jagung, kecuali Kota Sibolga dan Kabupaten Nias Barat. Pada tahun 2021, Kabupaten/kota yang menjadi andalan produsen jagung di Sumatera Utara adalah Kabupaten Karo dengan nilai produksi sebesar 757.927 ton, Kabupaten Dairi dengan nilai produksi sebesar 268.866 ton, dan Kabupaten Simalungun dengan nilai produksi sebesar 175.419 ton.

Tabel 3.1.6  
Luas Panen, Produksi dan Rata-Rata Produksi jagung menurut Kabupaten/Kota, 2020-2021

Kabupaten/Kota	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Rata-rata Produksi (kw/ha)
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Kabupaten</b>			
01 Nias	449	2 723	60,71
02 Mandailing Natal	325	1 758	54,10
03 Tapanuli Selatan	4 158	23 353	56,17
04 Tapanuli Tengah	36	114	31,76
05 Tapanuli Utara	18 352	104 288	56,83
06 Toba	8 794	49 446	56,22
07 Labuhanbatu	103	655	63,57
08 Asahan	1 025	5 691	55,55
09 Simalungun	30 490	175 419	57,53
10 Dairi	45 998	268 866	58,45
11 Karo	109 277	757 927	69,36
12 Deli Serdang	15 741	86 699	55,08
13 Langkat	9 237	64 849	70,21
14 Nias Selatan	1 054	6 572	62,35
15 Humbang Hasundutan	14 637	102 904	70,30
16 Pakpak Bharat	2 660	16 450	61,85
17 Samosir	4 868	27 260	56,00
18 Serdang Bedagai	2 394	8 733	36,48
19 Batu Bara	289	1 694	58,65
20 Padang Lawas Utara	193	1 055	54,56
21 Padang Lawas	262	1 230	46,94
22 Labuhanbatu Selatan	89	461	51,83
23 Labuhanbatu Utara	90	453	50,39
24 Nias Utara	101	603	59,71
25 Nias Barat	-	-	-
<b>Kota</b>			
71 Sibolga	-	-	-
72 Tanjungbalai	23	125	54,36
73 Pematangsiantar	855	5 411	63,26
74 Tebing Tinggi	35	213	60,55
75 Medan	398	2 381	59,90
76 Binjai	1 379	5 066	36,74
77 Padang Sidempuan	336	1 661	49,44
78 Gunungsitoli	56	338	60,67
<b>Sumatera Utara</b>	<b>2021</b>	<b>273 703</b>	<b>1 724 398</b>
	<b>2020</b>	<b>321 184</b>	<b>1 965 444</b>

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara

### 3.1.4.2 Perkebunan

Sumatera Utara juga merupakan salah satu pusat perkebunan di Indonesia. Perkebunan di Sumatera Utara telah dibuka sejak zaman penjajahan Belanda. Komoditi hasil perkebunan yang paling penting dari Sumatera Utara saat ini antara lain kelapa sawit, karet, kopi, coklat dan tembakau. Bahkan di Kota Bremen, Jerman, tembakau Deli sangat terkenal.

Luas tanaman karet rakyat di Sumatera Utara selama periode 2018-2020 mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 luas tanaman karet rakyat adalah sebesar 361.784 ha, menjadi 369.392 ha pada tahun 2020. Kabupaten Mandailing Natal, Langkat, Padang Lawas Utara dan Tapanuli Tengah merupakan pusat perkebunan karet rakyat di Sumatera Utara.

Tabel 3.1.7  
Luas Tanaman dan Produksi Karet Tanaman Perkebunan Rakyat menurut Kabupaten/Kota, 2018 -2020

Kabupaten/Kota	Luas Tanaman (ha)				Produksi (ton)
	T.B.M.	T.M.	T.T.M.	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Kabupaten</b>					
Nias	2 581	2 064	309	4 954	3 653
Mandailing Natal	1 340	39 221	24 010	64 571	52 402
Tapanuli Selatan	5 287	10 655	10 376	26 318	13 738
Tapanuli Tengah	3 114	24 971	4 387	32 472	23 445
Tapanuli Utara	477	8 529	94	9 100	6 591
Toba	324	287	39	650	105
Labuhan Batu	901	19 499	1 741	22 141	22 342
Asahan	275	5 012	210	5 497	5 521
Simalungun	313	2 833	2 228	5 374	4 832
Dairi	189	306	9	504	159
Karo	48	93	-	141	73
Deli Serdang	760	4 007	397	5 164	4 564
Langkat	1 920	38 761	34	40 715	40 423
Nias Selatan	1 729	9 344	310	11 383	9 980
Humbang Hasundutan	845	3 192	259	4 296	4 023
Pakpak Bharat	523	824	319	1 666	800
Samosir	-	-	-	-	-
Serdang Bedagai	1 081	10 628	30	11 739	12 600
Batu Bara	239	315	2	556	559
Padang Lawas Utara	12 105	26 823	350	39 278	30 278
Padang Lawas	3 681	14 856	3 790	22 327	18 188
Labuhan Batu Selatan	685	25 444	325	26 454	29 900
Labuhan Batu Utara	1 083	10 171	2 830	14 084	11 786
Nias Utara	1 600	8 143	1 316	11 059	9 280
Nias Barat	1 409	1 969	623	4 001	2 227
<b>Kota</b>					
Kota Padang Sidempuan	337	840	100	1 277	1 198
Kota Gunungsitoli	574	1 989	1 108	3 671	1 349
<b>Sumatera Utara 2020</b>	<b>43 420</b>	<b>270 776</b>	<b>55 196</b>	<b>369 392</b>	<b>310 016</b>
2019	43 419	270 776	55 196	369 391	309 973
2018	43 420	247 437	70 927	361 784	309 371

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara

Sedangkan luas tanaman kebun kelapa sawit rakyat di Sumatera Utara pada tahun 2020 sebesar 441.399,52 ha dengan produksi 7.199.750,00 ton tandan buah segar (TBS). Kabupaten Asahan merupakan pusat perkebunan kelapa sawit rakyat di Sumatera Utara. Di daerah ini terdapat sebesar 77.243,00 ha kebun sawit rakyat atau 17,50 persen dari luas seluruh perkebunan kelapa sawit rakyat Sumatera Utara.

Tabel 3.1.8  
Luas Tanaman dan Produksi Kelapa Sawit Tanaman Perkebunan Rakyat menurut Kabupaten/Kota, 2017 – 2020

Kabupaten/Kota	Luas Tanaman (Ha)				Produksi TBS
	T.B.M.	T.M.	T.T.M.	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Kabupaten</b>					
Nias	-	-	-	-	-
Mandailing Natal	3 163,76	15 910,00	7,76	19 081,52	315 129,09
Tapanuli Selatan	2 846,00	3 728,00	16,00	6 590,00	78 831,82
Tapanuli Tengah	1 633,00	1 986,00	23,00	3 642,00	42 290,91
Tapanuli Utara	18,00	16,00	2,00	36,00	331,82
Toba	342,00	762,00	25,00	1 129,00	14 000,00
Labuhan Batu	2 882,00	32 612,00	33,00	35 527,00	532 600,00
Asahan	1 767,00	75 442,00	34,00	77 243,00	1 631 013,64
Simalungun	2 544,00	27 765,00	18,00	30 327,00	520 518,18
Dairi	86,00	201,00	288,00	575,00	3 690,91
Karo	344,00	1 372,00	2,00	1 718,00	27 677,27
Deli Serdang	2 798,00	11 301,00	23,00	14 122,00	224 595,45
Langkat	5 603,00	41 572,00	23,00	47 198,00	764 222,73
Nias Selatan	744,00	196,00	5,00	945,00	3 740,91
Humbang Hasundutan	47,00	248,00	79,00	374,00	2 686,36
Pakpak Bharat	292,00	1 031,00	23,00	1 346,00	2 331,82
Samosir	-	-	-	-	-
Serdang Bedagai	2 302,00	11 508,00	11,00	13 821,00	227 845,45
Batu Bara	2 963,00	6 910,00	104,00	9 977,00	138 763,64
Padang Lawas Utara	9 223,00	18 601,00	21,00	27 845,00	347 286,36
Padang Lawas	7 053,00	27 565,00	34,00	34 652,00	521 672,73
Labuhan Batu Selatan	2 449,00	40 462,00	98,00	43 009,00	682 302,73
Labuhan Batu Utara	7 192,00	64 889,00	56,00	72 137,00	1 117 481,82
Nias Utara	-	-	-	-	-
Nias Barat	-	-	-	-	-
<b>Kota</b>					
Kota Padang Sidempuan	57,00	44,00	4,00	105,00	736,36
Kota Gunungsitoli	-	-	-	-	-
<b>Sumatera Utara 2020</b>	<b>56 348,76</b>	<b>384 121,00</b>	<b>929,76</b>	<b>441 399,52</b>	<b>7 199 750,00</b>
2019	51 531,00	383 457,00	4 327,00	439 315,00	7 006 986,36
2018	48 620,19	381 807,90	3 933,60	434 361,69	1 682 290,52
2017	47 394,04	378 357,31	3 509,96	429 261,31	1 655 352,35

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara

Selain kelapa sawit, produksi perkebunan lainnya yang menjadi andalan di Sumatera Utara adalah kopi. Produksi kopi (Robusta dan Arabika) Sumatera Utara tahun 2020 adalah sebesar 76.597

ton dengan luas lahan 95.477 ha. Kabupaten Dairi, Tapanuli Utara, dan Simalungun merupakan penghasil kopi dari Sumatera Utara. Bahkan kopi Sidikalang sudah dikenal di Pulau Jawa dan Eropa.

Tabel 3.1.9  
Luas Tanaman dan Produksi Kopi Tanaman Perkebunan Rakyat menurut Kabupaten/Kota,  
2017 – 2020

Kabupaten/Kota	Luas Tanaman(Ha)		Produksi (Ton)		
	Kopi Robusta	Kopi Arabika	Kopi Robusta	Kopi Arabika	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
<b>Kabupaten / Regency</b>					
Nias	218,00	-	67,00	-	
Mandailing Natal	1 116,00	3 564,00	424,00	2 533,00	
Tapanuli Selatan	1 690,00	4 606,00	412,00	2 103,00	
Tapanuli Tengah	172,00	-	66,00	-	
Tapanuli Utara	1 368,00	16 468,00	602,00	15 220,00	
Toba	-	4 788,00	-	4 403,00	
Labuhan Batu	-	-	-	-	
Asahan	-	-	-	-	
Simalungun	1 979,00	8 233,00	1 729,00	10 523,00	
Dairi	8 431,00	12 099,00	3 733,00	9 613,00	
Karo	-	9 205,00	-	7 403,00	
Deli Serdang	-	711,00	-	663,00	
Langkat	-	75,00	-	78,00	
Nias Selatan	-	-	-	-	
Humbang Hasundutan	-	12 057,00	-	9 683,00	
Pakpak Bharat	335,00	964,00	224,00	1 084,00	
Samosir	-	5 064,00	-	4 163,00	
Serdang Bedagai	-	-	-	-	
Batu Bara	-	-	-	-	
Padang Lawas Utara	814,00	-	632,00	-	
Padang Lawas	850,00	-	882,00	-	
Labuhan Batu Selatan	15,00	-	8,00	-	
Labuhan Batu Utara	-	-	-	-	
Nias Utara	321,00	-	154,00	-	
Nias Barat	142,00	-	78,00	-	
<b>Kota / Municipality</b>					
Kota Padang Sidempuan	72,00	-	54,00	-	
Kota Gunungsitoli	120,00	-	63,00	-	
<b>Sumatera Utara</b>	<b>2020</b>	<b>17 643,00</b>	<b>77 834,00</b>	<b>9 128,00</b>	<b>67 469,00</b>
	2019	17 609,00	77 765,00	8 091,00	66 831,00
	2018	17 437,64	77 765,00	6 788,70	66 831,00
	2017	18 942,17	70 199,92	8 484,72	58 155,09

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara



---

## **Bab 3.2**

# **Lingkungan Hidup**

---

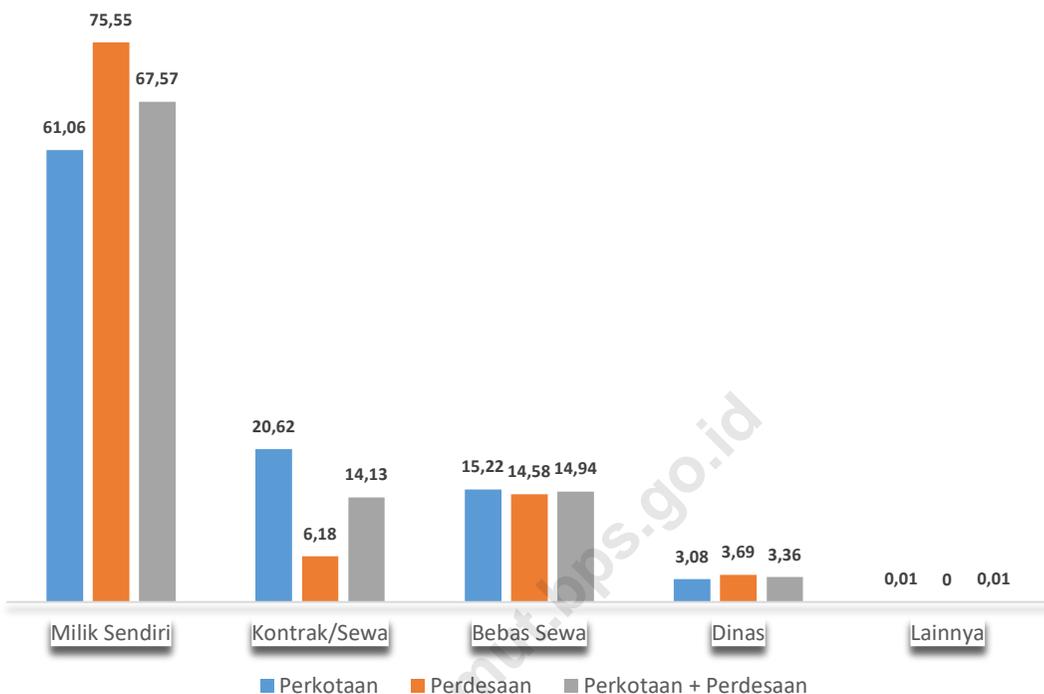
Berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini serta generasi masa depan. Keserasian pengelolaan lingkungan hidup dengan pembangunan merupakan jalan terbaik untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, yang secara langsung akan berpengaruh terhadap ketahanan wilayah/sosial. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lain.

Dengan pengertian sistemik semacam itu maka penguraian lingkungan hidup ke dalam komponen-komponennya yang lebih kecil, serta analisis yang mengikuti uraian terhadap unsur-unsur lingkungan hidup itu kemudian mestinya juga akan merefleksikan keterkaitan unsur lingkungan hidup itu secara tak terlepas dari yang lainnya. Oleh sebab itu, lingkungan sosial yang dianggap merupakan bagian dari lingkungan hidup adalah wilayah yang merupakan tempat berlangsungnya bermacam-macam interaksi sosial antara berbagai kelompok beserta pranatanya dengan simbol dan nilai serta norma yang sudah mapan, serta terkait dengan lingkungan alam dan lingkungan buatan (tata ruang).

Kualitas dan fasilitas perumahan menjadi salah satu faktor yang ikut berpengaruh terhadap kondisi lingkungan hidup. Pada tahun 2021, ada 67,57 persen rumah tangga di Sumatera Utara menempati tempat tinggal dengan status milik sendiri. Kemudian 14,13 persen rumah tangga dengan status mengontrak/sewa, 14,94 persen dengan status bebas sewa, 3,36 persen dengan status rumah dinas dan 0,01 persen dengan status lainnya.

Gambar 3.2.1

Persentase Rumah tangga Menurut Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal Yang Ditempati, 2021

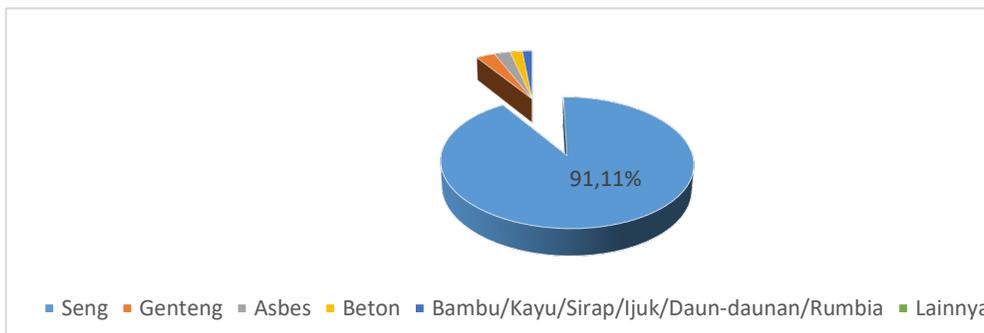


Sumber : Susenas, 2021

Atap rumah merupakan salah satu unsur rumah yang sangat vital. Tidak saja berfungsi sebagai pelindung terhadap panas matahari dan hujan, atap rumah menurut jenisnya juga berpengaruh pada kesehatan bagi penghuninya. Pada tahun 2021 menunjukkan bahwa mayoritas rumah di Sumatera Utara beratapkan seng (91,11 persen), kemudian 2,93 persen beratapkan genteng, 2,51 persen beratapkan asbes, 1,90 persen beratapkan beton, 1,53 persen beratapkan Bambu/Kayu/Sirap/Ijuk/Daun-daunan/Rumbia, sedangkan sisanya 0,01 persen beratapkan lainnya.

Gambar 3.2.2

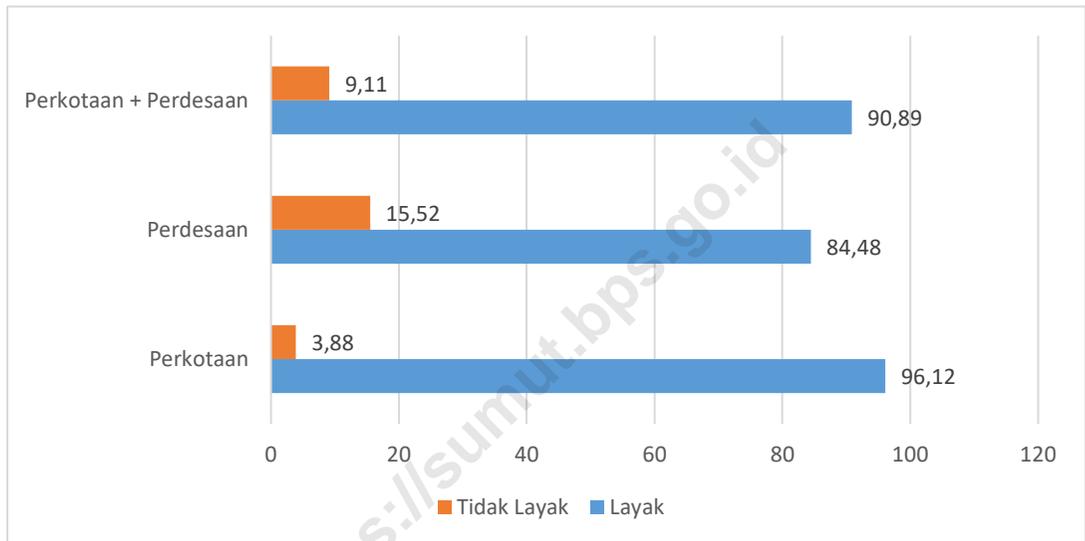
Persentase Rumah tangga Menurut Jenis Atap Bangunan Tempat Tinggal Yang Ditempati, 2021



Sumber : Susenas, 2021

Fasilitas air layak minum merupakan salah satu indikator ketahanan lingkungan. Pada tahun 2021 persentase rumah tangga di Sumatera Utara yang menggunakan air layak minum sebesar 90,89 persen. Apabila dilihat berdasarkan daerah, masyarakat di perkotaan lebih banyak mengkonsumsi air layak minum dibandingkan masyarakat di perdesaan, yaitu sebesar 96,12 persen di perkotaan dan 84,48 persen di perdesaan. Semakin besar persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak menunjukkan semakin baiknya kondisi rumah tangga di suatu daerah.

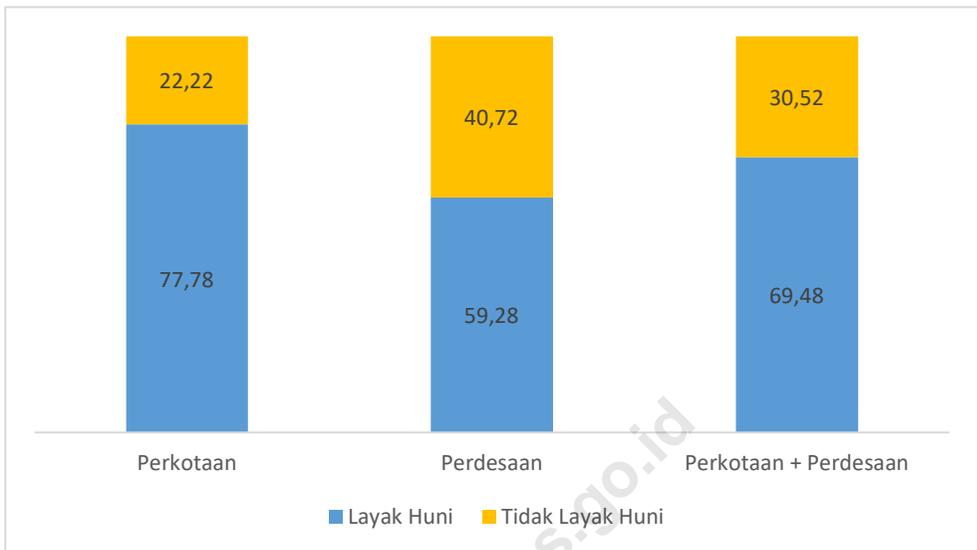
Gambar 3.2.3  
Persentase Rumah tangga Menurut Penggunaan Air Layak Minum, 2021



Sumber : Susenas, 2021

Sebuah tempat tinggal atau biasa disebut rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Rumah adalah bangunan tempat berlindung dari cuaca lingkungan dimana bangunan itu berada. Rumah merupakan citra dari sosok manusia yang menempatinya. Kondisi tempat tinggal juga sangat mempengaruhi kualitas hidup setiap penghuninya. Pada tahun 2021, persentase rumah tangga di Sumatera Utara yang mempunyai kondisi tempat tinggal layak huni adalah sebanyak 69,48 persen. Apabila dilihat berdasarkan daerah, persentase masyarakat di perkotaan yang mempunyai tempat tinggal layak huni lebih tinggi dibandingkan masyarakat di perdesaan, yaitu sebesar 77,78 persen di perkotaan dan 59,28 persen di perdesaan.

Gambar 3.2.4  
Persentase Rumah tangga menurut Kelayakan Kondisi Tempat Tinggal , 2021



Sumber : Susenas, 2021



---

## Bab 3.3

# Kerawanan Sosial

---

Kerawanan sosial merupakan bagian dari ketahanan sosial, karena kerawanan sosial berpengaruh terhadap proses sosial. Faktor manusia menjadi penentu dalam hal ketahanan sosial, karena manusia bukan saja sebagai obyek atau sasaran namun sekaligus juga sebagai subyek atau pelaksana pembangunan. Dengan demikian kondisi sumber daya manusia menjadi salah satu tolak ukur dalam melihat sampai seberapa jauh ketahanan sosial bisa dilihat. Atas dasar pemikiran tersebut, pembangunan dititik beratkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Kualitas sumber daya manusia diperlukan karena jumlah penduduk yang besar hanya dapat merupakan modal atau aset pembangunan jika kualitasnya baik, sebaliknya hanya akan menjadi beban manakala kualitasnya rendah. Hal ini dimungkinkan terjadi apabila pertumbuhan jumlah penduduk tidak terkendali dan tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan penduduk seperti sandang, pangan, papan, dan kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan yang layak. Oleh karena itu, isu kependudukan yang kian mengemuka belakangan ini berkaitan dengan pertumbuhan penduduk.

Pemenuhan kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai masalah yang dapat mengganggu kesejahteraan penduduk. Penyediaan pangan yang tidak mencukupi dapat menimbulkan terjadinya kelaparan dan dapat meningkatkan jumlah kematian penduduk. Selain itu, ketersediaan permukiman yang tidak mencukupi dapat mengakibatkan munculnya permukiman-permukiman liar, kumuh dan tidak layak akibat sempitnya lahan untuk permukiman seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Masalah lain yang dapat muncul diantaranya adalah terjadinya gangguan keamanan akibat maraknya aksi tindakan kriminalitas, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat akibat sarana kesehatan yang kurang memadai dan rendahnya kualitas sumber daya manusia terkait dengan sarana pendidikan yang terbatas.

Selain tingkat pertumbuhan penduduk, masalah komposisi penduduk dan ketimpangan distribusi penduduk juga menjadi masalah serius yang harus segera ditangani oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait masalah kependudukan baik dalam hal kuantitas maupun kualitas penduduk harus terus dilaksanakan dalam upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat sehingga kesejahteraan hidup masyarakat dapat diingkatkan.

### 3.3.1 Kependudukan

#### 3.3.1.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Salah satu masalah klasik kependudukan yang terjadi di Indonesia dan terus menjadi perhatian pemerintah adalah jumlah penduduk Indonesia yang besar. Saat ini Indonesia menduduki peringkat keempat dunia dengan jumlah penduduk yang paling banyak setelah Cina, India, dan Amerika Serikat.

Tabel 3.3.1  
Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, dan Kepadatan Penduduk menurut Kabupaten/Kota, 2020

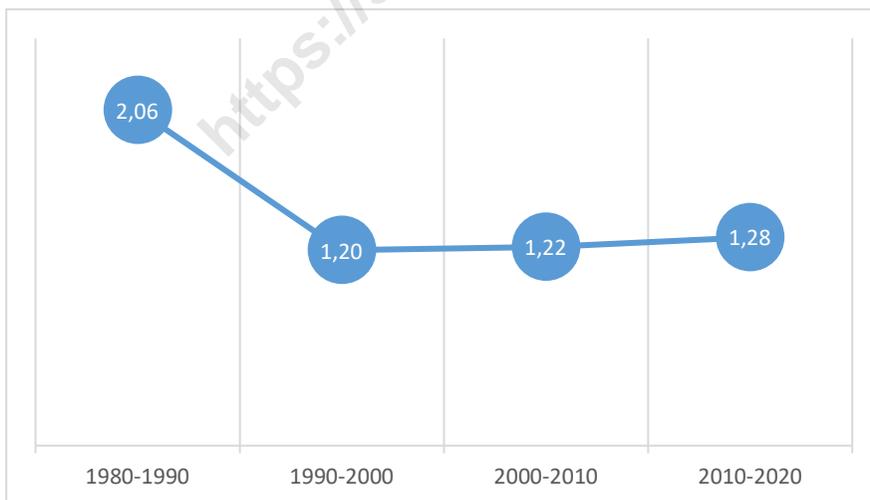
Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Tahun 2010 (jiwa)	Jumlah Penduduk Tahun 2020 (jiwa)	Luas Wilayah Total Area (km <sup>2</sup> )	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Kabupaten</b>				
01 Nias	131 377	146 672	1 842,51	80
02 Mandailing Natal	404 945	472 886	6 134,00	77
03 Tapanuli Selatan	263 815	300 911	6 030,47	50
04 Tapanuli Tengah	311 232	365 177	2 188,00	167
05 Tapanuli Utara	279 257	312 758	3 791,64	82
06 Toba Samosir	173 129	206 199	2 328,89	89
07 Labuhanbatu	415 110	493 899	2 156,02	229
08 Asahan	668 272	769 960	3 702,21	208
09 Simalungun	817 720	990 246	4 369,00	227
10 Dairi	270 053	308 764	1 927,80	160
11 Karo	350 960	404 998	2 127,00	190
12 Deli Serdang	1 790 431	1 931 441	2 241,68	862
13 Langkat	967 535	1 030 202	6 262,00	165
14 Nias Selatan	289 708	360 531	1 825,20	198
15 Humbang Hasundutan	171 650	197 751	2 335,33	85
16 Pakpak Bharat	40 505	52 351	1 218,30	43
17 Samosir	119 653	136 441	2 069,05	66
18 Serdang Bedagai	594 383	657 490	1 900,22	346
19 Batu Bara	375 885	410 678	922,20	445
20 Padang Lawas Utara	223 531	260 720	3 918,05	67
21 Padang Lawas	225 259	261 011	3 892,74	67
22 Labuhanbatu Selatan	277 673	314 094	3 596,00	87
23 Labuhanbatu Utara	330 701	381 994	3 570,98	107
24 Nias Utara	127 244	147 274	1 202,78	122
25 Nias Barat	81 807	89 994	473,73	190
<b>Kota</b>				
71 Sibolga	84 481	89 584	41,31	2 169
72 Tanjungbalai	154 445	176 027	107,83	1 632
73 Pematangsiantar	234 698	268 254	55,66	4 820
74 Tebing Tinggi	145 248	172 838	31,00	5 575
75 Medan	2 097 610	2 435 252	265,00	9 190
76 Binjai	246 154	291 842	59,19	4 931
77 Padangsidimpuan	191 531	225 105	114,66	1 963
78 Gunungsitoli	126 202	136 017	280,78	484
<b>Sumatera Utara</b>	<b>12 982 204</b>	<b>14 799 361</b>	<b>72 981,23</b>	<b>203</b>

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, SP 2020

Sumatera Utara merupakan provinsi dengan penduduk terbesar di Pulau Sumatera dan menempati peringkat keempat provinsi dengan penduduk terbesar di Indonesia, setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Pada tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia adalah sebanyak 270,20 juta jiwa, sedangkan jumlah penduduk Sumatera Utara tercatat sebanyak 14,799 juta jiwa. Jumlah penduduk tersebut mengalami kenaikan sekitar 1,82 juta jiwa bila dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2010 yang mencapai 12,982 juta jiwa.

Dilihat dari laju pertumbuhan penduduk, laju pertumbuhan penduduk Sumatera Utara pada tahun 1980 tercatat sebesar 2,06 persen, mengalami penurunan cukup drastis sehingga menjadi 1,20 persen pada tahun 1990. Hal ini diduga karena gencarnya program Keluarga Berencana (KB) yang digelar oleh pemerintah pada saat itu. Meskipun pada kenyataannya, pertumbuhan penduduk di suatu wilayah tidak hanya dipengaruhi oleh adanya kelahiran dan kematian, tetapi juga dipengaruhi oleh adanya migrasi. Laju pertumbuhan penduduk Sumatera Utara selama dua dekade terakhir menunjukkan trend peningkatan yaitu menjadi 1,22 persen pada tahun 2010 dan 1,28 persen pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam hal pengendalian pertumbuhan penduduk di Sumatera Utara belum menunjukkan adanya keberhasilan.

Gambar 3.3.1  
Pertumbuhan Penduduk Sumatera Utara (%), 1980 - 2020



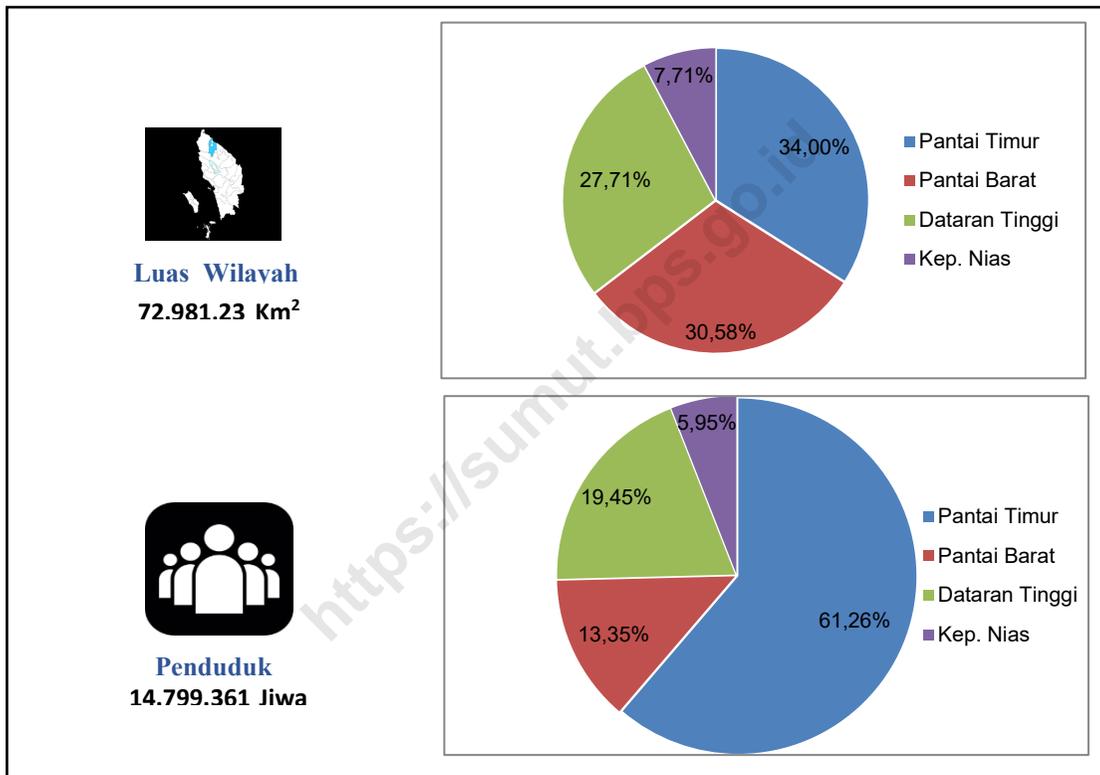
Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, SP 2020

### 3.3.1.2 Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Persebaran penduduk berhubungan dengan pola permukiman suatu daerah. Beberapa faktor yang mempengaruhi persebaran penduduk antara lain: iklim, letak dan geografis tanah, kesuburan tanah, sumber daya alam, sosial budaya, dan teknologi. Apabila persebaran penduduk tidak merata,

akibat langsung yang terlihat adalah tingkat kepadatan penduduk yang tidak merata. Kepadatan penduduk merupakan indikator dari tekanan penduduk di suatu daerah. Provinsi Sumatera Utara yang luasnya mencapai 72.981,23 km<sup>2</sup> mempunyai kepadatan sebesar 203 jiwa/km<sup>2</sup>. Berdasarkan letak geografis, Provinsi Sumatera terbagi menjadi 4 wilayah, yaitu wilayah pantai timur, dataran tinggi, dan pantai barat serta Kepulauan Nias. Sebaran penduduk di Provinsi Sumatera tidak merata, dimana penduduk cenderung menumpuk di wilayah pantai timur.

Gambar 3.3.2  
 Persentase Luas Wilayah dan Penduduk Sumatera Utara Menurut Kawasan 2020



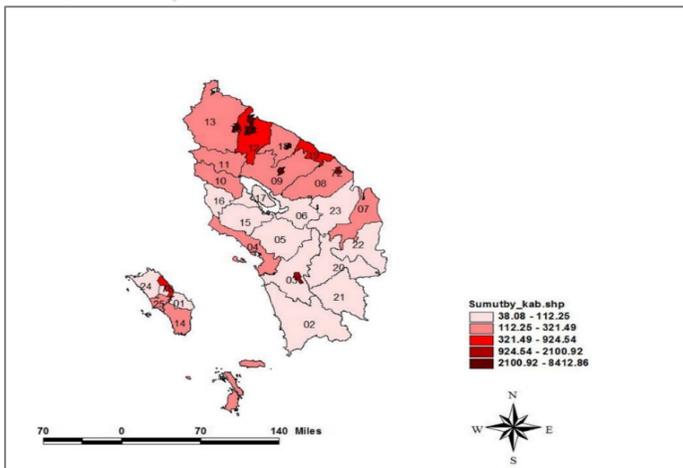
Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, SP 2020

Wilayah pantai timur yang mencakup 12 kabupaten/kota terdiri dari Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Asahan, Batubara, Serdang Bedagai, Deli Serdang, Langkat dan Kota Tanjung Balai, Tebing Tinggi, Medan, dan Binjai mencakup sepertiga wilayah Provinsi Sumatera Utara dihuni sebanyak 9,066 juta jiwa atau 61,26 persen penduduk Sumatera Utara. Sedangkan wilayah dataran tinggi yang mencakup 9 kabupaten/kota terdiri dari Kabupaten Tapanuli Utara, Toba Samosir, Humbang Hasundutan, Samosir, Simalungun, Karo, Dairi, Pakpak Bharat, dan Kota Pematang Siantar mencakup 27,71 persen wilayah Provinsi Sumatera Utara dihuni sebanyak 2,878 juta jiwa atau 19,45 persen penduduk Sumatera Utara. Untuk wilayah pantai barat yang mencakup 7

kabupaten/kota yang terdiri dari Kota Padang Sidempuan, Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, mencakup 30,58 persen wilayah Provinsi Sumatera Utara yang dihuni sebanyak 1,975 juta jiwa atau 13,35 persen penduduk Sumatera Utara. Untuk wilayah kepulauan Nias terdiri dari 5 kabupaten/kota Nias, Nias Utara, Nias Selatan, Nias Barat dan Kota Gunung Sitoli, mencakup 7,71 persen luas wilayah dari provinsi Sumatera Utara dan berpenduduk 880 rb jiwa atau 5,95% dari penduduk Sumatera Utara.

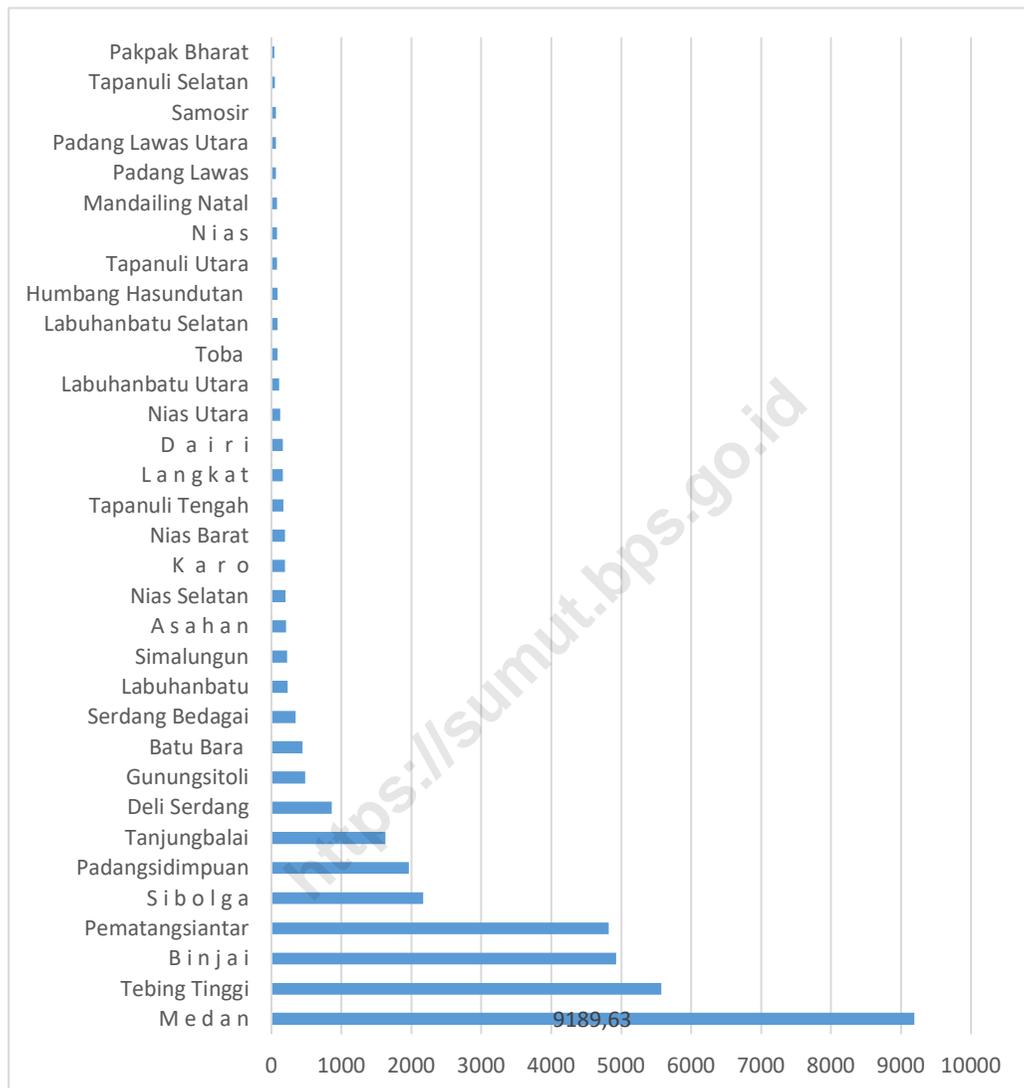
Berdasarkan wilayah, Kota Medan yang merupakan ibukota provinsi dan Kabupaten Deli Serdang yang merupakan daerah *sub-urban* menjadi kabupaten/kota dengan penduduk paling banyak. Kota Medan dengan luas 265 km<sup>2</sup> atau hanya 0,36 persen luas wilayah Sumatera Utara menampung 2,43 juta jiwa atau 16,46 persen penduduk Sumatera Utara sedangkan Kabupaten Deli Serdang dengan luas 2.242 km<sup>2</sup> atau hanya 3,07 persen luas wilayah Sumatera Utara menampung 1,931 juta jiwa atau 13,05 persen penduduk Sumatera Utara. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, kepadatan penduduk Provinsi Sumatera Utara juga meningkat dimana kepadatan penduduk Sumatera Utara meningkat dari 178 jiwa/km<sup>2</sup> pada tahun 2010, menjadi 203 jiwa/km<sup>2</sup> pada tahun 2020. Jika dirinci menurut kabupaten/kota, pada tahun 2020 Kota Medan merupakan kabupaten/kota yang terpadat di Sumatera Utara dengan kepadatan 9.190 jiwa/km<sup>2</sup>. Selanjutnya disusul oleh Kota Tebing Tinggi 5.575 jiwa/km<sup>2</sup>, Kota Binjai 4.931 jiwa/km<sup>2</sup>, dan Kota Pematang Siantar 4.820 jiwa/km<sup>2</sup>. Sedangkan yang paling jarang penduduknya adalah Kabupaten Pakpak Bharat dengan kepadatan 43 jiwa/km<sup>2</sup>.

Gambar 3.3.3  
Peta Kepadatan Penduduk Sumatera Utara Menurut Kabupaten/Kota, 2020



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, SP 2020

Gambar 3.3.4  
Kepadatan Penduduk Sumatera Utara Menurut Kabupaten/Kota, 2020  
(Jiwa/Km<sup>2</sup>)



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, SP 2020

### 3.3.1.3 Kondisi Rumah Tangga di Sumatera Utara

Istilah rumah tangga dalam operasional kegiatan statistik yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik adalah dengan mengacu pengelolaan makan dan minum dari satu dapur. Yang dimaksud dengan satu dapur adalah dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari dikelola menjadi satu kesatuan dan yang bertanggung jawab dalam hal pemenuhan kebutuhan tersebut adalah Kepala Rumah Tangga. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk Indonesia 2015-2045 jumlah rumah tangga di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2020 ada 3.453.874 dengan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga sebesar 4,28

jiwa artinya setiap rumah tangga di Provinsi Sumatera Utara memiliki empat anggota rumah tangga, yang berarti ayah dan ibu dan dua orang anak sebagai gambaran umum. Kondisi ini masih merupakan kondisi ideal dalam program keluarga berencana dimana diharapkan setiap rumah tangga yang dibentuk hanya memiliki dua orang anak saja sehingga laju pertumbuhan penduduk dapat ditekan serta lebih terkendali.

Tabel 3.3.2  
Jumlah Rumah Tangga dan Rata-rata Banyaknya Anggota Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2010 dan 2020

Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga 2010	Jumlah Rumah Tangga 2020	Rata-rata Banyaknya ART 2010	Rata-rata Banyaknya ART 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Kabupaten</b>				
01 Nias	25 955	28 821	5,06	5,01
02 Mandailing Natal	94 945	105 859	4,27	4,28
03 Tapanuli Selatan	61 008	65 651	4,32	4,32
04 Tapanuli Tengah	66 827	83 392	4,66	4,66
05 Tapanuli Utara	64 629	70 256	4,32	4,33
06 Toba Samosir	42 510	44 993	4,07	4,10
07 Labuhanbatu	93 572	114 482	4,44	4,44
08 Asahan	156 215	172 029	4,28	4,29
09 Simalungun	208 969	222 132	3,91	3,92
10 Dairi	64 852	67 996	4,16	4,19
11 Karo	94 938	114 546	3,70	3,73
12 Deli Serdang	420 301	530 846	4,26	4,28
13 Langkat	238 128	257 316	4,06	4,08
14 Nias Selatan	60 178	67 725	4,81	4,78
15 Humbang Hasundutan	39 016	43 576	4,40	4,42
16 Pakpak Bharat	8 992	11 375	4,50	4,44
17 Samosir	28 934	30 400	4,14	4,16
18 Serdang Bedagai	145 107	149 942	4,10	4,11
19 Batu Bara	86 291	96 663	4,36	4,37
20 Padang Lawas Utara	52 034	65 499	4,30	4,30
21 Padang Lawas	52 088	67 249	4,32	4,34
22 Labuhanbatu Selatan	65 855	82 823	4,22	4,23
23 Labuhanbatu Utara	76 635	85 183	4,32	4,32
24 Nias Utara	26 134	28 575	4,87	4,87
25 Nias Barat	16 142	16 209	5,07	5,07
<b>Kota</b>				
71 Sibolga	18 128	18 790	4,66	4,66
72 Tanjungbalai	33 022	38 123	4,68	4,68
73 Pematangsiantar	54 872	60 238	4,28	4,28
74 Tebing Tinggi	34 713	39 957	4,18	4,18
75 Medan	481 275	528 159	4,36	4,36
76 Binjai	56 674	64 530	4,34	4,36
77 Padangsidimpuan	42 947	50 848	4,46	4,47
78 Gunungsitoli	25 779	29 691	4,90	4,88
<b>Sumatera Utara</b>	<b>3 037 665</b>	<b>3 453 874</b>	<b>4,27</b>	<b>4,28</b>

Sumber : BPS RI, Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045

### 3.3.1.4 Penduduk Berdasarkan Komposisi Umur

Komposisi penduduk Sumatera Utara menurut umur pada tahun 2020 mengalami perubahan jika dibandingkan dengan tahun 2010. Pada tabel 3.3.3 tampak bahwa dalam kurun waktu 2010-2020 telah terjadi perubahan pada setiap kelompok umur. Terlihat dari persentase kelompok penduduk di bawah 20 tahun mengalami penurunan, dan sebaliknya persentase kelompok penduduk di atas 20 tahun mengalami peningkatan.

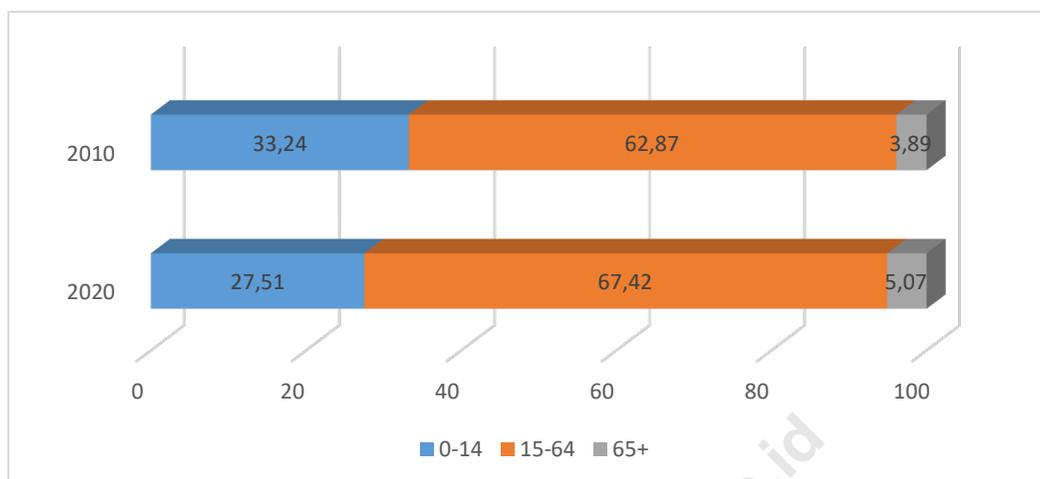
Tabel 3.3.3  
Jumlah dan Persentase Penduduk Sumatera Utara menurut Kelompok Umur, 2010 dan 2020

Golongan Umur	Tahun 2010		Tahun 2020	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0 - 4	1 450 682	11,17	1 380 042	9,33
5 - 9	1 456 839	11,22	1 359 027	9,18
10 - 14	1 407 920	10,84	1 331 990	9,00
15 - 19	1 264 562	9,74	1 312 750	8,87
20 - 24	1 109 868	8,55	1 316 532	8,90
25 - 29	1 105 138	8,51	1 259 943	8,51
30 - 34	986 664	7,60	1 178 971	7,97
35 - 39	903 263	6,96	1 092 108	7,38
40 - 44	812 579	6,26	1 007 434	6,81
45 - 49	705 150	5,43	895 191	6,05
50 - 54	592 808	4,57	773 084	5,22
55 - 59	420 309	3,24	640 326	4,33
60 - 64	261 617	2,02	501 379	3,39
65 +	504 133	3,88	750 584	5,07
TT	672	0,01		
<b>Jumlah</b>	<b>12 982 204</b>	<b>100,00</b>	<b>14 799 361</b>	<b>100,00</b>

Sumber : SP 2020, BPS Provinsi Sumatera Utara

Struktur umur penduduk menjadi terlihat sederhana untuk dianalisis jika dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar, yaitu muda (0-14 tahun), produktif (15-64 tahun), dan tua (65 tahun ke atas). Suatu struktur umur dikatakan muda jika proporsi penduduk umur muda sama dengan 40 persen atau lebih, sedangkan suatu struktur umur dikatakan tua jika proporsi umur mudanya kurang dari 30 persen dan kelompok umur tuanya lebih atau sama dengan 10 persen. Dengan demikian, Sumatera Utara masuk dalam masa transisi dimana tidak lagi dapat dikatakan struktur umur muda karena proporsi penduduk muda sudah di bawah 40 persen yaitu sebesar 33,24 persen pada tahun 2010 menjadi 27,51 persen pada tahun 2020, di sisi lain proporsi penduduk usia tua masih jauh dari 10 persen yaitu hanya 3,89 persen pada tahun 2010 menjadi 5,07 persen pada tahun 2020.

Gambar 3.3.5  
Struktur Umur Penduduk Sumatera Utara, 2010 – 2020

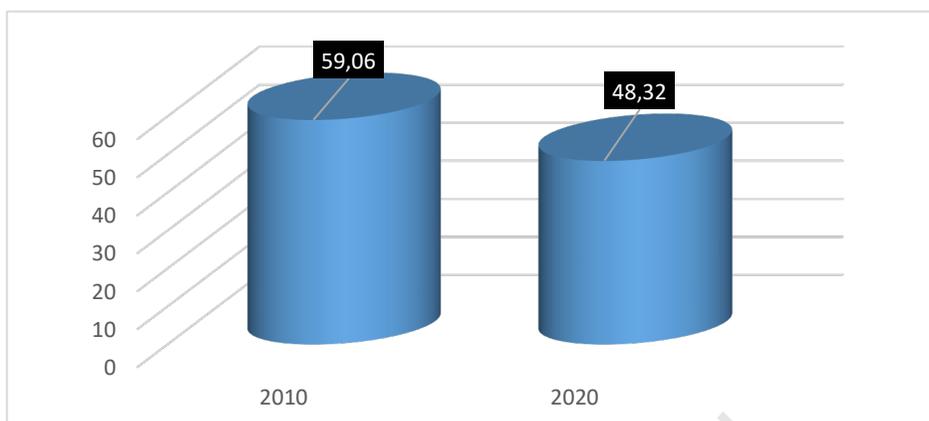


Sumber : SP 2020, BPS Provinsi Sumatera Utara

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Dilihat berdasarkan rasio ketergantungan, transisi dalam struktur umur penduduk dari muda ke tua juga tampak dari turunnya rasio ketergantungan (*Dependency Ratio*). Pada tahun 2020 rasio ketergantungan (*Dependency Ratio*) Provinsi Sumatera Utara sebesar 48,32. Hal ini artinya setiap 100 penduduk usia produktif mempunyai tanggungan sebanyak 48 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

Gambar 3.3.6  
Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) Penduduk Sumatera Utara, 2010 dan 2020



Sumber : SP 2020, BPS Provinsi Sumatera Utara

Suatu wilayah dikatakan mengalami bonus demografi jika dua orang penduduk usia produktif (15-64) menanggung satu orang tidak produktif (kurang dari 15 tahun dan 65 tahun atau lebih). Secara teknis, bonus demografi terjadi dimana rasio ketergantungan berada di bawah 50 persen. Sedangkan Provinsi Sumatera Utara sudah mendapatkan bonus demografi sebagai konsekuensi dari bertambahnya proporsi penduduk usia produktif.

Dari sisi demografi, Provinsi Sumatera Utara secara keseluruhan termasuk provinsi yang sudah mendapatkan bonus demografi, karena angka rasio ketergantungan yang rendah. Pada tahun 2010, angka rasio ketergantungan Sumatera Utara sebesar 59,06 dan pada tahun 2020 berkurang menjadi 48,32. Angka rasio ketergantungan Sumatera Utara yang lebih kecil dari 50, menunjukkan bahwa Sumatera Utara berada pada posisi *window of opportunity* yang dapat dimaksimalkan dalam meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat yang lebih berkualitas.

Sebelum Provinsi Sumatera Utara mendapatkan bonus demografi, berbeda halnya pada level kabupaten/kota. Kota Medan misalnya, sudah menikmati bonus demografi jauh sebelum tahun 2010. Faktornya karena migrasi usia produktif dari luar masuk ke Kota Medan untuk tujuan melanjutkan pendidikan maupun bekerja. Selain Kota Medan, Kota Binjai telah mendapatkan bonus demografi sebelum tahun 2010. Sedangkan Kota Pematangsiantar dan Tebing Tinggi memasuki masa bonus demografi pada tahun 2013 (BPS, 2015).

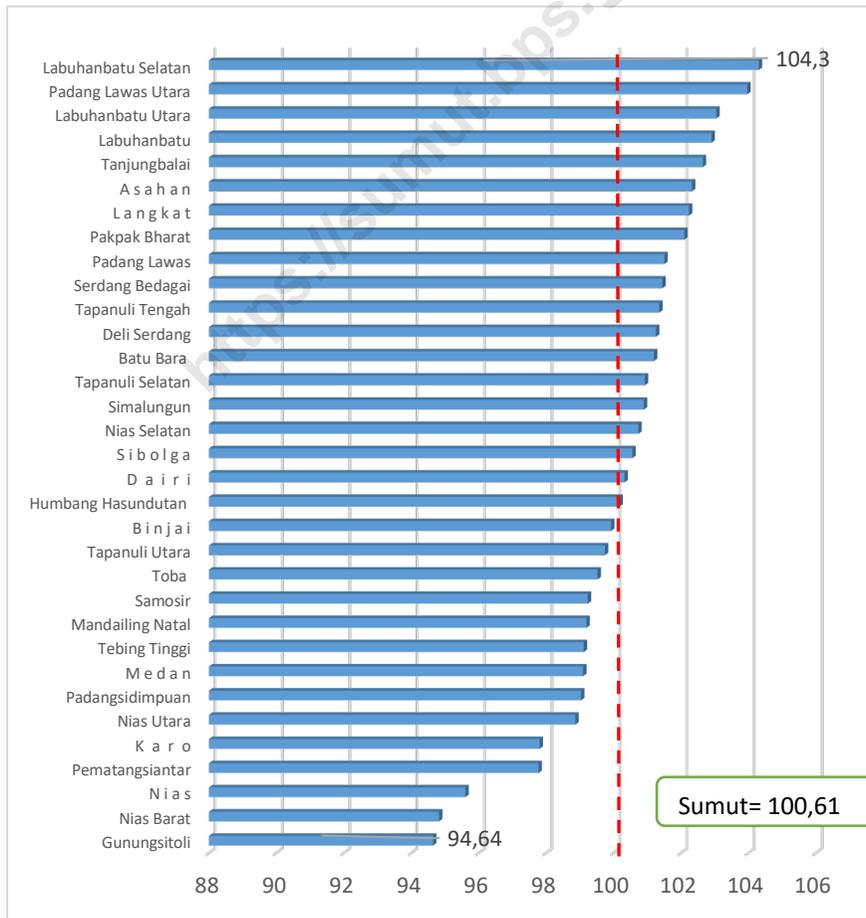
### 3.3.1.5 Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Rasio jenis kelamin menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan di suatu daerah dalam waktu tertentu. Rasio jenis kelamin di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2020 sebesar 100,61 persen artinya jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada

jumlah penduduk perempuan dengan perbandingan setiap 100 perempuan terdapat 100,61 orang laki-laki.

Selanjutnya jika ditelusuri menurut kabupaten/kota, jumlah kabupaten/kota yang memiliki rasio jenis kelamin di atas 100 ada sebanyak 19 kabupaten/kota, sedangkan yang memiliki rasio jenis kelamin di bawah 100 ada sebanyak 14 kabupaten/kota. Kabupaten/kota yang memiliki rasio jenis kelamin di atas 100 yaitu Kabupaten Tapanuli Selatan, Simalungun, Dairi, Nias Selatan, Humbang Hasundutan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Serdang Bedagai, Tapanuli Tengah, Sibolga, Asahan, Batubara, Deli Serdang, Langkat, Tanjungbalai, Pakpak Bharat, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu, dan Labuhanbatu Selatan. Kondisi ini disinyalir disebabkan karena daerah-daerah ini merupakan daerah pantai dan perkebunan sehingga banyak penduduk laki-laki datang serta menetap untuk mencari pekerjaan dan membuka usaha baru.

Gambar 3.3.7  
Rasio Jenis Kelamin Penduduk Sumatera Utara menurut Kabupaten/Kota, 2020

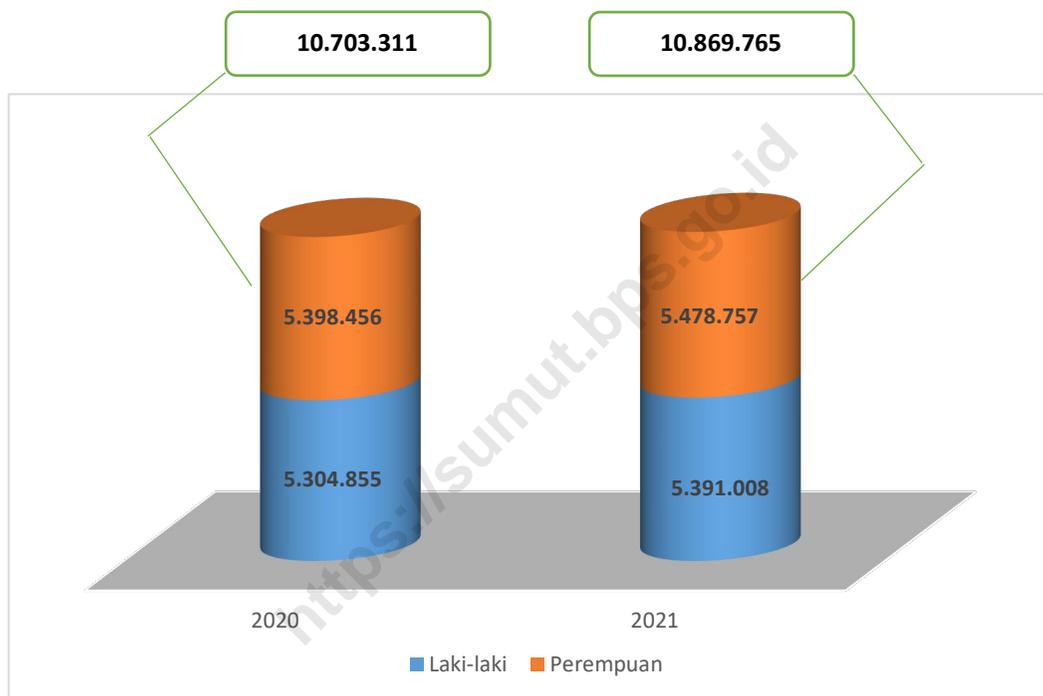


Sumber : SP 2020, BPS Provinsi Sumatera Utara

### 3.3.2 Ketenagakerjaan

Tenaga kerja adalah bagian penduduk berusia kerja yang mampu bekerja untuk memproduksi barang dan jasa baik sudah bekerja, mencari kerja, sekolah, mengurus rumah tangga, dan lain-lain. Beberapa negara menggolongkan penduduk usia 15-64 tahun sebagai tenaga kerja. BPS dalam setiap penelitian ketenagakerjaan menggolongkan penduduk usia 15 tahun ke atas sebagai tenaga kerja.

Gambar 3.3.8  
Penduduk Sumatera Utara Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin, 2020 dan 2021



Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional, 2020 - 2021

Secara absolut, jumlah penduduk usia kerja mengalami peningkatan dari 10,70 juta jiwa pada 2020 menjadi 10,87 juta jiwa pada tahun 2021. Bertambahnya jumlah penduduk usia kerja mengakibatkan jumlah angkatan kerja bertambah. Dengan bertambahnya angkatan kerja diharapkan akan banyak penduduk yang meramaikan pasar kerja. Pengaruh dari jumlah penduduk yang besar disertai struktur umur yang cenderung mengelompok pada usia muda membawa akibat bahwa untuk dapat menampung lonjakan penduduk yang mencari kerja, penyediaan lapangan kerja yang cukup besar harus dilakukan.

Apabila lonjakan penduduk yang mencari kerja diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja yang banyak dan tepat maka diharapkan tingkat pengangguran akan menurun. Semakin baik daya serap tenaga kerja, maka akan semakin baik kondisi ketenagakerjaan suatu wilayah. Secara absolut, jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja mengalami peningkatan dari 6,84 juta jiwa pada 2020 menjadi 7,04 juta jiwa pada 2021.

Gambar 3.3.9  
Penduduk Sumatera Utara yang Berumur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja, 2020 dan 2021

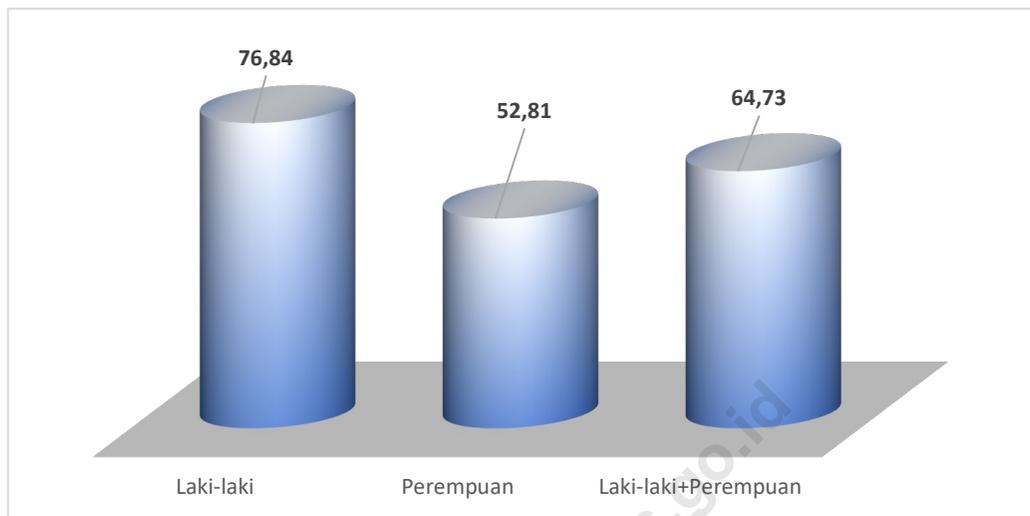


Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional, 2020 - 2021

Pada tahun 2020, pekerja laki-laki di Sumatera Utara ada sebanyak 4,02 juta jiwa atau sekitar 58,82 persen dari jumlah pekerja, sedangkan pekerja perempuan sebanyak 2,82 juta jiwa atau sekitar 41,18 persen. Seiring dengan perkembangan jaman dan adanya emansipasi wanita, pada tahun 2021, jumlah pekerja perempuan di Sumatera Utara mengalami peningkatan cukup signifikan yaitu meningkat sebesar 75,60 ribu jiwa menjadi 2,89 juta jiwa, sedangkan pekerja laki-laki bertambah sebanyak 118 ribu jiwa menjadi 4,14 juta jiwa.

Untuk melihat gambaran informasi tentang bagaimana suatu pembangunan ekonomi mampu menciptakan lapangan kerja, dapat dilihat berdasarkan rasio penduduk yang bekerja terhadap penduduk usia kerja (*Employment To Population Ratio – EPR*). Meskipun secara umum tingginya nilai rasio dianggap sebagai hal positif, namun untuk menilai tingkat pekerjaan yang layak atau tingkat defisit pekerjaan yang layak, tidak cukup dengan melihat rasio ini. Tingginya nilai rasio ini tidak selalu diartikan sebagai hal yang positif. Misalnya akibat pilihan pendidikan yang terbatas, penduduk usia muda lebih memilih bekerja daripada sekolah. Fenomena yang terjadi akibat hal tersebut yaitu terjadinya peningkatan penduduk bekerja yang tidak berpendidikan maupun berpendidikan rendah.

Gambar 3.3.10  
Rasio Penduduk Bekerja Terhadap Penduduk Usia Kerja (*Employment To Population Ratio – EPR*)  
Sumatera Utara, 2021

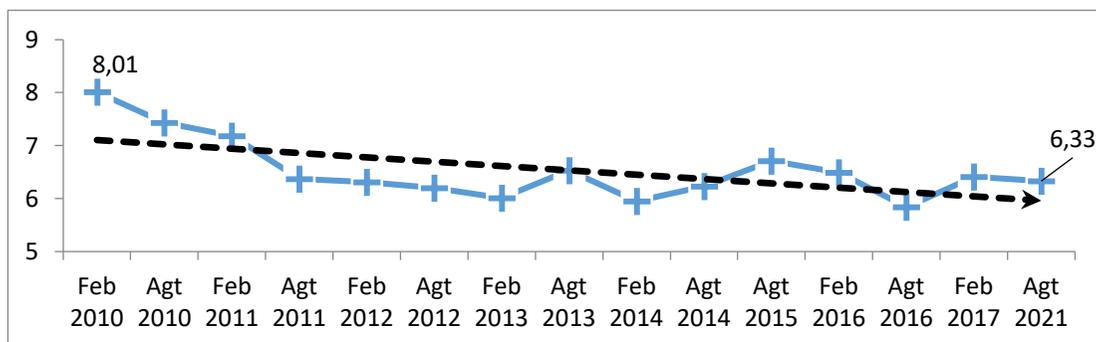


Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional, 2021

Pada tahun 2021, rasio penduduk bekerja sebesar 64,73. Angka ini diartikan bahwa dari 100 orang penduduk usia 15 tahun ke atas, terdapat 65 orang yang bekerja pada tahun 2021. Namun bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, EPR laki-laki pada tahun 2021 sebesar 76,84 dan perempuan sebesar 52,81. EPR laki-laki sebesar 76,84 diartikan bahwa dari 100 orang penduduk laki-laki usia 15 tahun ke atas terdapat 77 orang yang bekerja dan EPR perempuan sebesar 52,81 diartikan bahwa dari 100 orang penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas terdapat 53 orang yang bekerja. Berdasarkan jenis kelamin, terlihat bahwa EPR laki-laki lebih besar dari EPR perempuan. Hal ini sejalan dengan jumlah pekerja laki-laki yang lebih besar dari jumlah pekerja perempuan.

Indikator lain yang perlu diperhatikan ketika berbicara tentang ketenagakerjaan adalah mengenai pengangguran. Untuk melihat pengangguran umumnya dengan melihat nilai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja, demikian juga sebaliknya, TPT yang rendah menunjukkan bahwa pasar kerja telah mampu menyerap angkatan kerja cukup banyak.

Gambar 3.3.11  
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumatera Utara, 2010 - 2021

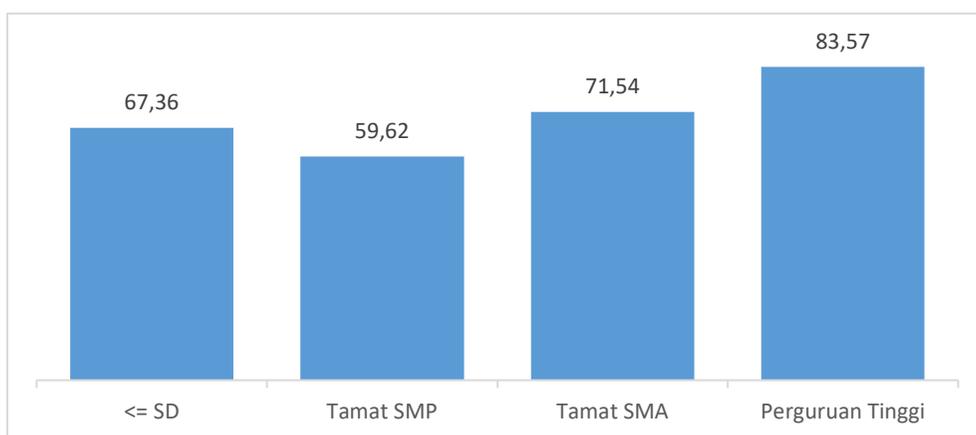


Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional, 2010 - 2021

Selama periode 2010 – 2021, trend Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sumatera Utara cenderung menurun. Hal ini salah satunya disebabkan karena untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, seseorang akan selalu berusaha untuk bekerja meskipun dengan penghasilan yang tidak memadai dan tidak memandang status pekerjaan yang sedang dikerjakan. Pada tahun 2010, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sumatera Utara adalah 8,01 persen, menurun menjadi 6,33 persen pada tahun 2021. Artinya pada tahun 2021 dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja) sekitar 6 orang merupakan pengangguran.

Sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Sumatera Utara pada tahun 2021 adalah sebesar 69,10. Artinya pada tahun 2021 dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas terdapat 69 orang merupakan angkatan kerja. Dilihat berdasarkan pendidikan yang ditamatkan, semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan maka TPAK semakin tinggi.

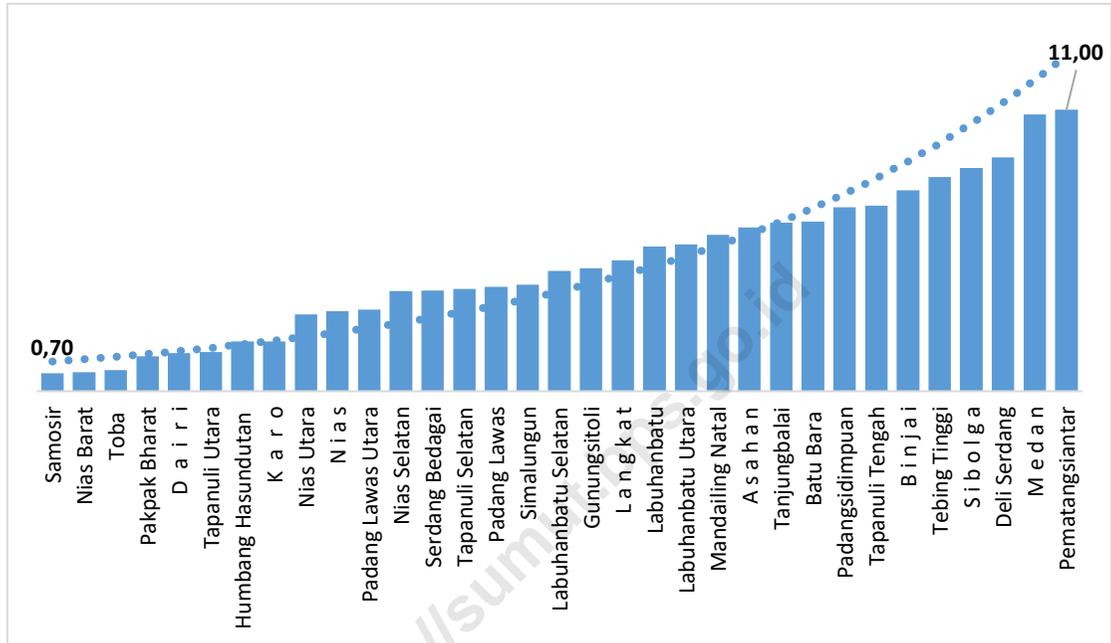
Gambar 3.3.12  
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Sumatera Utara Berdasarkan Kelompok Pendidikan, 2021



Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional, 2021

Berdasarkan kabupaten/kota, daerah dengan Tingkat Pengangguran Terbuka paling rendah adalah Kabupaten Samosir dengan TPT sebesar 0,70. Sedangkan daerah dengan Tingkat Pengangguran Terbuka paling tinggi adalah Kota Pematang Siantar dengan TPT sebesar 11,00.

Gambar 3.3.13  
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumatera Utara Berdasarkan Kabupaten/Kota, 2021



Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional, Agustus 2021

### 3.3.3 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi yang kompleks dan mencakup berbagai sektor. Akibat kompleksitas yang dimilikinya, maka penanggulangan kemiskinan memerlukan program yang terintegrasi dan tidak saling tumpang tindih. Pengentasan kemiskinan merupakan tantangan global terbesar yang dihadapi dunia dan menjadi syarat mutlak bagi pembangunan berkelanjutan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menempatkan program pengentasan kemiskinan sebagai tujuan pertama dalam *Sustainable Development Goals* (SDG's) untuk periode 2015-2030. Indonesia sebagai salah satu negara anggota PBB menetapkan pengentasan kemiskinan sebagai salah satu tujuan pembangunan nasional sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum.

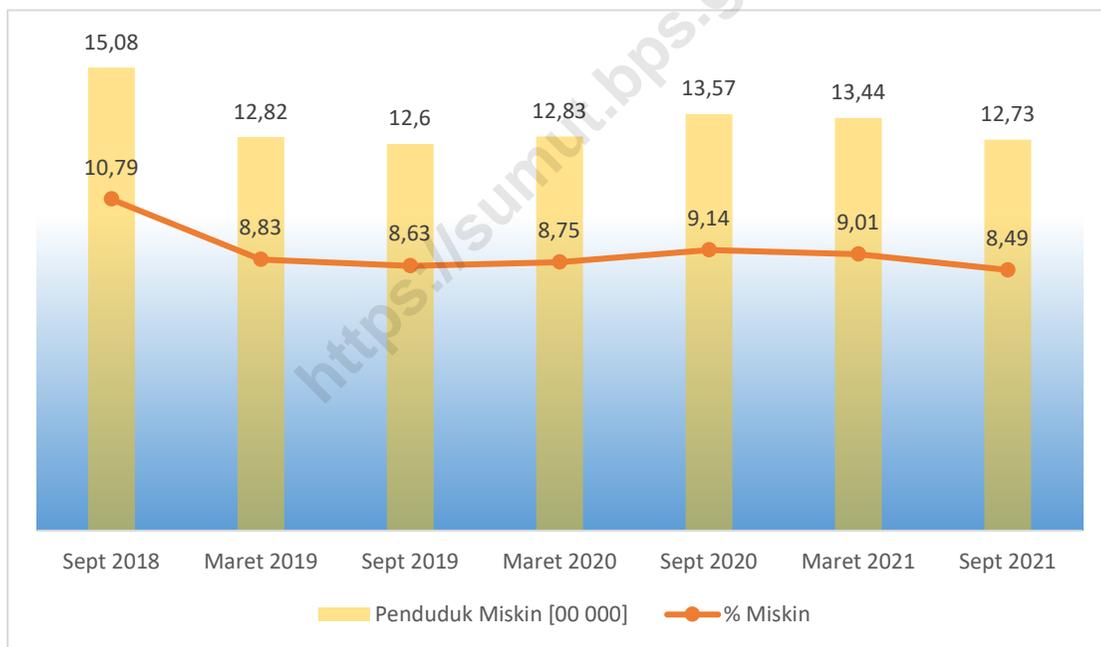
Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan lebih peka terhadap isu kemiskinan sebagai dasar dalam penyusunan suatu kebijakan strategis yang berkaitan dengan program pengentasan kemiskinan. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan tersedianya

data dan informasi kemiskinan yang akurat dan *up to date* sehingga program pengentasan kemiskinan bisa lebih tepat sasaran.

### 3.3.3.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin (Po)

Trend perkembangan penduduk miskin di Sumatera Utara selama kurun waktu empat tahun terakhir (September 2018 – September 2021) mengalami fluktuasi. Selama periode September 2018 – September 2021, jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 235,07 ribu orang (2,30 persen poin) yaitu dari 1.508,14 ribu orang (10,79 persen) pada September 2018 menjadi 1.273,07 ribu orang (8,49 persen) pada September 2021. Kondisi ini dapat dimaklumi karena kemiskinan adalah suatu kondisi yang dinamis dan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Gambar 3.3.14  
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Sumatera Utara  
September 2018 – September 2021

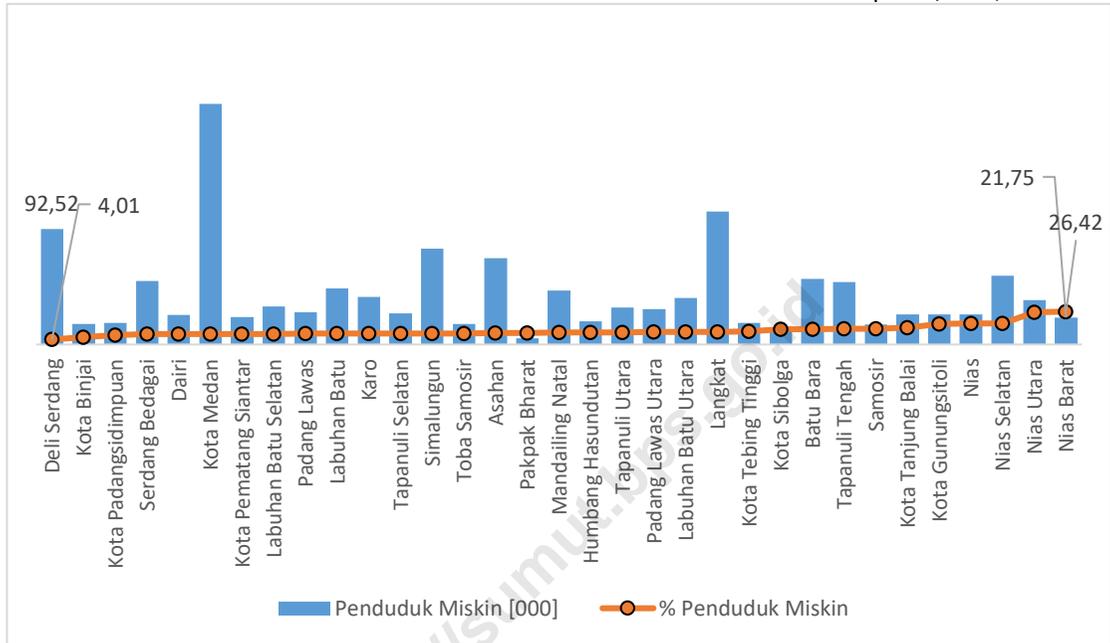


Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2018 - 2021

Berdasarkan kabupaten/kota, persentase penduduk miskin tertinggi masih didominasi oleh kabupaten/kota yang berada di Kepulauan Nias yang meliputi Nias Barat dengan persentase kemiskinan sebesar 26,42 persen (21,75 ribu jiwa), Nias Utara dengan persentase kemiskinan sebesar 25,66 persen (35,84 ribu jiwa), Nias Selatan dengan persentase kemiskinan sebesar 16,92 persen (55,16 ribu jiwa), Nias dengan persentase kemiskinan sebesar 16,82 persen (24,33 ribu jiwa), dan Kota Gunungsitoli dengan persentase kemiskinan sebesar 16,45 persen (24,02 ribu jiwa). Sedangkan persentase

kemiskinan terendah adalah Kabupaten Deli Serdang dengan persentase 4,01 persen atau 92,52 ribu jiwa. Apabila dilihat dari jumlah penduduk miskin, paling banyak berada di Kota Medan yaitu sebesar 193,03 ribu jiwa (8,34 persen).

Gambar 3.3.15  
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Sumatera Utara Berdasarkan Kabupaten/Kota, 2021

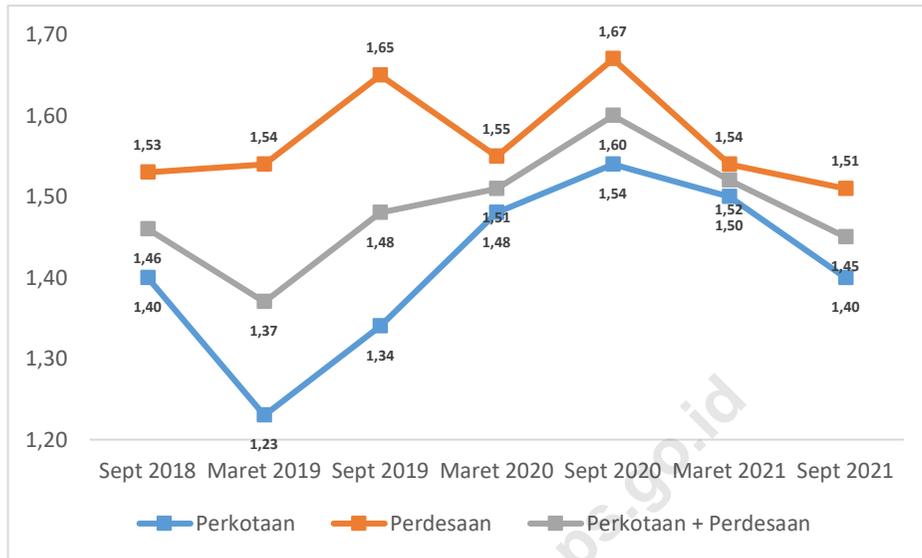


Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2021

### 3.3.3.2 Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index - P<sub>1</sub>*)

Selama periode September 2018 – September 2021, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P<sub>1</sub>) Sumatera Utara menurun sebesar 0,01 point yaitu dari 1,46 pada September 2018 menjadi 1,45 pada September 2021. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung agak mendekati garis kemiskinan.

Gambar 3.3.16  
Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index – P1*) Sumatera Utara  
menurut Daerah, September 2018-September 2021



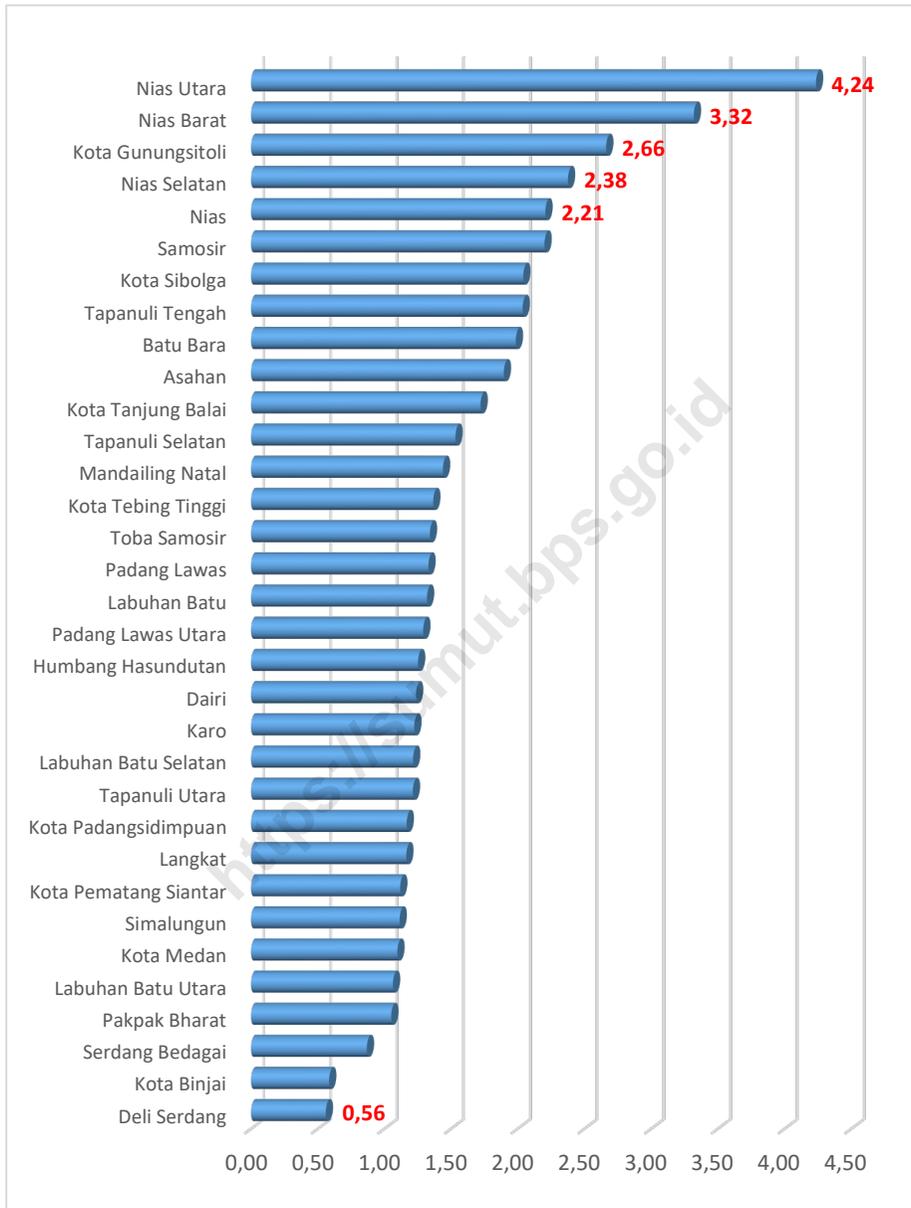
Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, September 2021

Dari segi wilayah, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di daerah perkotaan lebih rendah dibanding perdesaan. Pada periode September 2018 – September 2021, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di perkotaan tidak mengalami perubahan yakni sebesar 1,40 pada September 2018 dan juga pada September 2021, artinya rata-rata pengeluaran penduduk miskin di perkotaan cenderung tidak berubah.

Demikian juga, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di perdesaan, pada periode September 2018 – September 2021 mengalami penurunan. Selama kurun waktu tiga tahun terakhir Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di perdesaan mengalami penurunan sebesar 0,02 point yaitu dari 1,53 pada September 2018 menjadi 1,51 pada September 2021. Artinya bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di perdesaan cenderung agak mendekati garis kemiskinan.

Berdasarkan kabupaten/kota, Indeks Kedalaman Kemiskinan tertinggi masih didominasi oleh kabupaten/kota yang berada di Kepulauan Nias yaitu Nias Utara (4,24), Nias Barat (3,32), Kota Gunung Sitoli (2,66), Nias Selatan (2,38), dan Nias (2,21). Sedangkan kabupaten dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan terendah adalah Deli Serdang (0,56).

Gambar 3.3.17  
 Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index – P<sub>i</sub>*) Sumatera Utara  
 Berdasarkan Kabupaten/Kota, 2021



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, Maret 2021

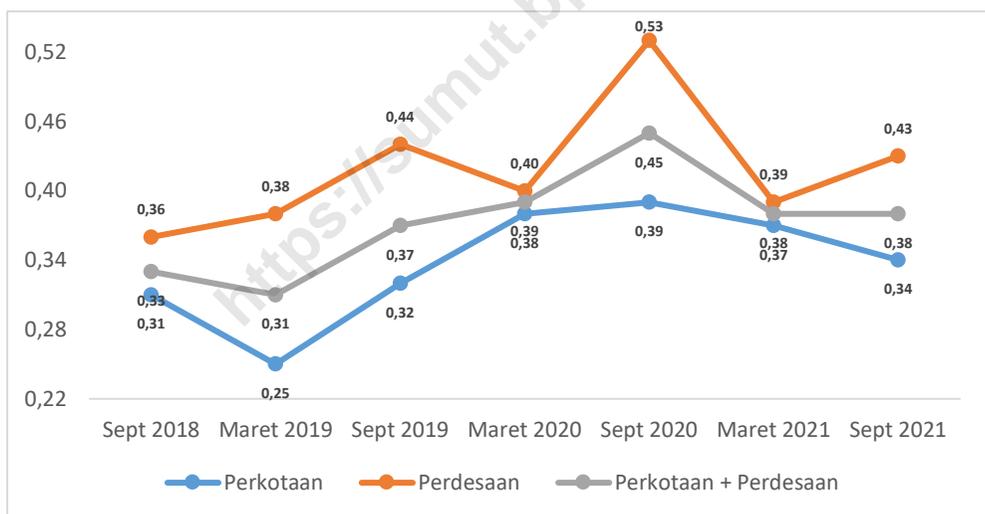
### 3.3.3.3 Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index - P<sub>2</sub>*)

Selama periode September 2018 – September 2021, Indeks Keparahan Kemiskinan (P<sub>2</sub>) Sumatera Utara meningkat sebesar 0,05 point yaitu dari 0,33 pada September 2018 menjadi 0,38 pada September 2021. Hal ini menandakan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di Sumatera Utara semakin tinggi.

Apabila dilihat dari segi wilayah, Indeks Keparahan Kemiskinan (P<sub>2</sub>) di daerah perkotaan lebih rendah dibandingkan di perdesaan. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran penduduk miskin di daerah perkotaan memiliki ketimpangan yang lebih rendah daripada ketimpangan distribusi pengeluaran penduduk miskin di daerah perdesaan.

Pada September 2018, Indeks Keparahan Kemiskinan (P<sub>2</sub>) di perkotaan sebesar 0,31, akan tetapi meningkat pada September 2021 menjadi 0,34.

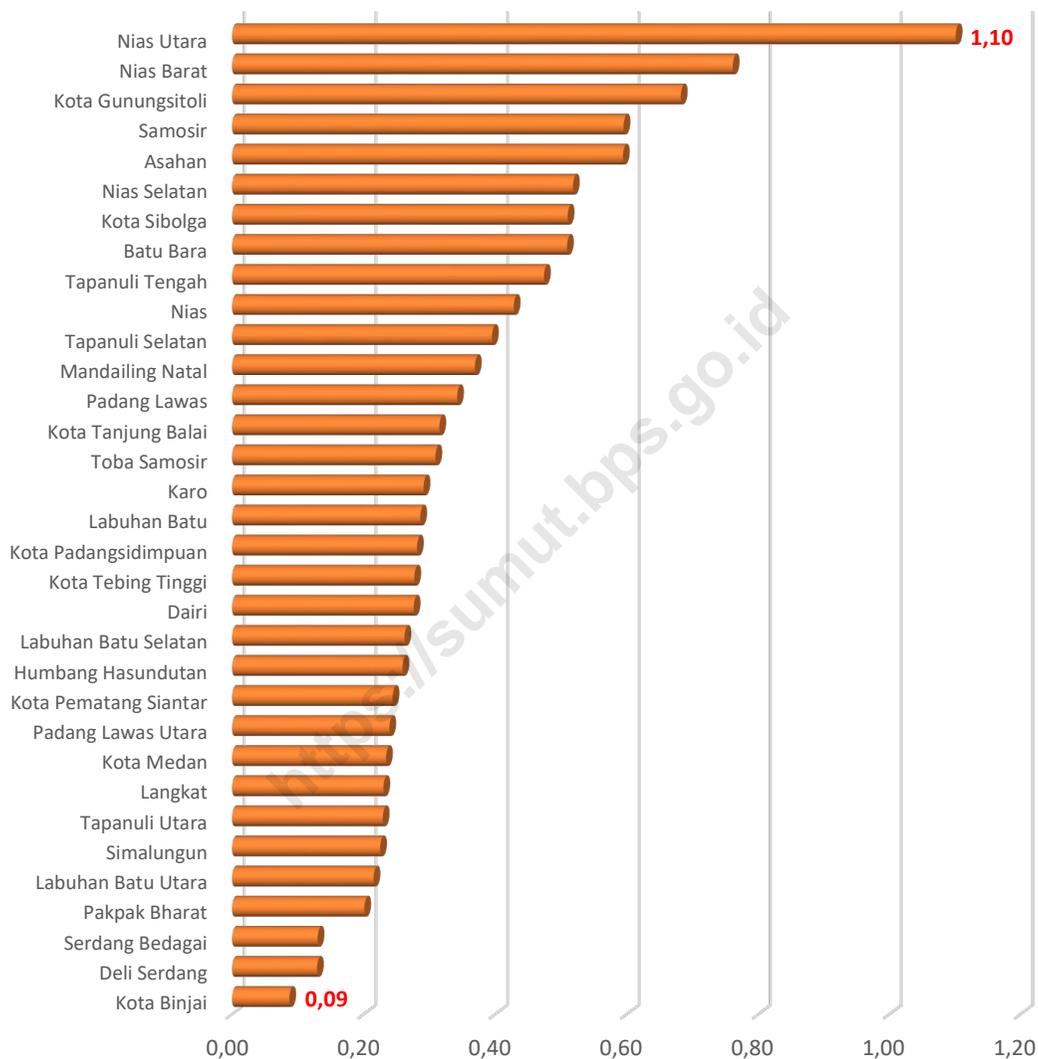
Gambar 3.3.18  
Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index – P<sub>2</sub>*) Sumatera Utara menurut Daerah, September 2018 – September 2021



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, September 2021

Indeks Keparahan Kemiskinan (P<sub>2</sub>) di daerah perdesaan lebih tinggi dibandingkan di perkotaan. Pada September 2018, Indeks Keparahan Kemiskinan (P<sub>2</sub>) di perdesaan 0,36, kemudian mengalami peningkatan pada September 2021 menjadi 0,43. Hal ini memberikan gambaran bahwa selama September 2018 – September 2021, ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di perdesaan semakin tinggi. Jika dilihat menurut kabupaten/kota Indeks Keparahan Kemiskinan (P<sub>2</sub>) tertinggi ada di Kabupaten Nias Utara (1,10) dan terendah Kota Binjai (0,09).

Gambar 3.3.19  
 Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index – P2*) Sumatera Utara  
 Berdasarkan Kabupaten/Kota, 2021



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, Maret 2021

### 3.3.4 Ketimpangan Pengeluaran

Dalam mengatasi permasalahan kemiskinan, aspek penting yang juga perlu diperhatikan adalah mengenai ketidakmerataan atau kesenjangan distribusi pengeluaran penduduk. Kesenjangan distribusi pengeluaran merupakan permasalahan yang selalu muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang umumnya terjadi karena ketidakmerataan dari distribusi program pembangunan dan kesempatan

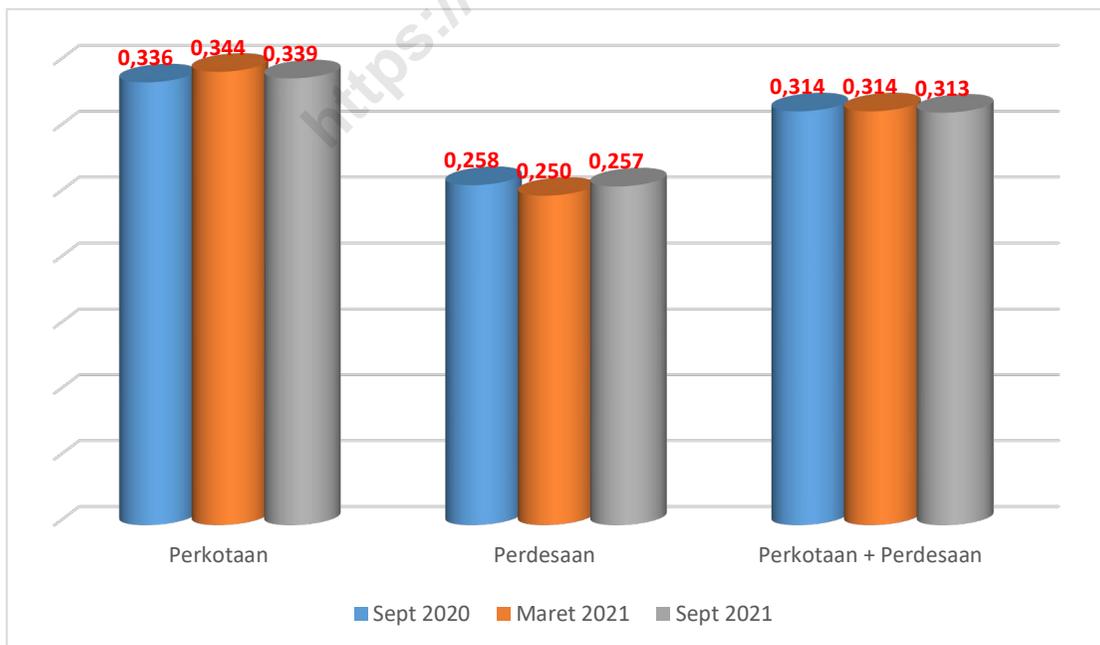
untuk berpartisipasi dalam program pembangunan. Kebijakan pembangunan yang menempatkan kota sebagai pusat pertumbuhan justru menghasilkan ketimpangan wilayah.

### 3.3.4.1 Gini Rasio

Secara umum angka gini rasio pada September 2020 – September 2021 di Sumatera Utara mengalami penurunan. Penurunan angka gini rasio mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran penduduk semakin membaik.

Pada September 2020, angka gini rasio Sumatera Utara sebesar 0,314, selama kurun waktu satu tahun pada September 2021 mengalami penurunan sebesar 0,001 menjadi 0,313. Apabila dilihat berdasarkan daerah, angka gini rasio di perkotaan lebih tinggi dibanding perdesaan. Pada September 2020, angka gini rasio di perkotaan adalah 0,336 dan di perdesaan adalah 0,258. Pada September 2021, angka gini rasio di perkotaan mengalami peningkatan menjadi 0,339, sedangkan di perdesaan mengalami penurunan menjadi 0,257. Artinya bahwa selama satu tahun terakhir, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di perkotaan relatif meningkat namun tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di perdesaan semakin menurun.

Gambar 3.3.20  
Gini Rasio Sumatera Utara menurut Daerah  
September 2020 – September 2021



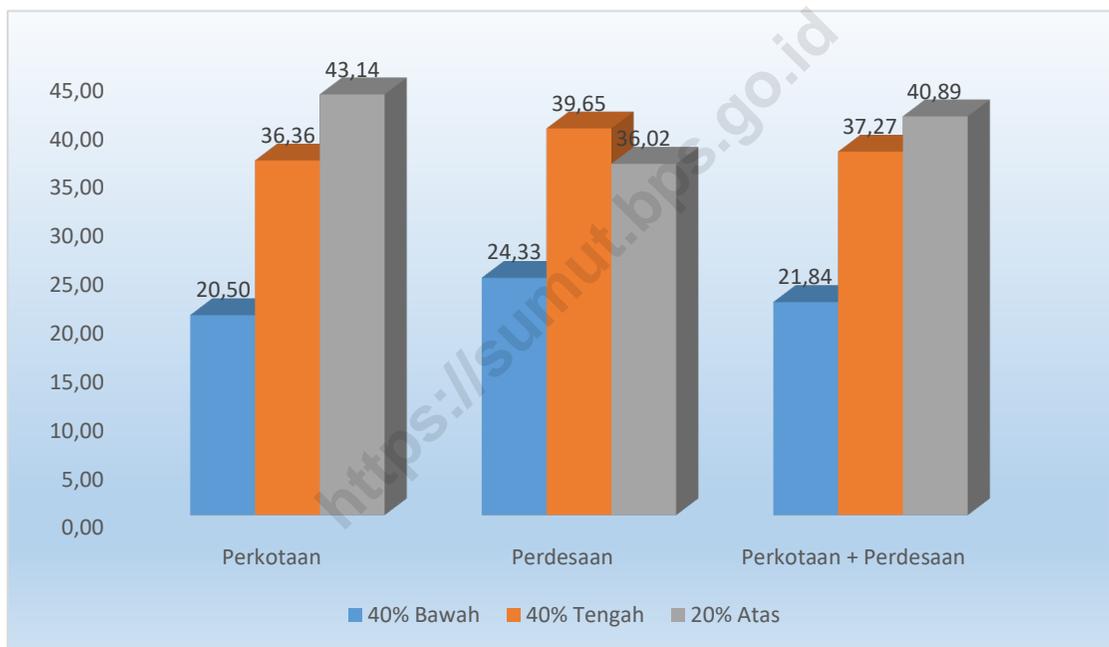
Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, September 2020 - September 2021

### 3.3.4.2 Kriteria Bank Dunia

Untuk melihat distribusi pengeluaran antar kelompok penduduk, selain gini rasio juga bisa digunakan indikator lain yaitu Kriteria Bank Dunia. Kriteria Bank Dunia membagi kelompok penduduk menjadi tiga bagian besar, yaitu 40 persen terbawah, 40 persen menengah, dan 20 persen teratas.

Berdasarkan kriteria Bank Dunia, pada September 2021 ketimpangan pengeluaran penduduk Sumatera Utara tergolong kategori rendah (*low inequality*), karena porsi pengeluaran dari kelompok 40 persen terendah di atas 17 persen yaitu 21,84 persen.

Gambar 3.3.21  
Distribusi Pengeluaran Penduduk Sumatera Utara menurut Daerah dan Kriteria Bank Dunia, September 2021



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, September 2021

Apabila dilihat berdasarkan daerah, pada September 2021 baik di perkotaan maupun perdesaan ketimpangan pengeluaran penduduk termasuk kategori rendah (*low inequality*) karena pada periode tersebut porsi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terendah keduanya berada di atas 17 persen. Persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terendah di perkotaan (20,50 persen) lebih rendah dibanding perdesaan (24,33 persen) yang berarti bahwa secara umum pada September 2021 berdasarkan Kriteria Bank Dunia daerah perkotaan memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perdesaan.

### 3.3.5 Indeks Kebahagiaan

Indeks Kebahagiaan merupakan indeks komposit yang dihitung secara tertimbang menggunakan dimensi, subdimensi dan indikator dengan skala 0-100. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan tingkat kehidupan penduduk yang semakin bahagia. Sebaliknya, semakin rendah nilai indeks maka semakin merasa tidak bahagia. Dimensi penyusun Indeks Kebahagiaan adalah Dimensi Kepuasan Hidup yang terdiri dari Subdimensi Kepuasan Hidup Personal dan Subdimensi Kepuasan Hidup Sosial, serta Dimensi Perasaan (*Affect*) dan Dimensi Makna Hidup (*Eudaimonia*). Sedangkan indikator penyusun Subdimensi Kepuasan Hidup Personal ada 5 indikator yakni Pendidikan dan Keterampilan, Pekerjaan/Usaha/Kegiatan Utama, Pendapatan Rumah Tangga, Kesehatan serta Rumah dan Fasilitas Rumah.

Pada Subdimensi Kepuasan Hidup Sosial terdapat 5 indikator yakni Keharmonisan Keluarga, Ketersediaan Waktu Luang, Hubungan Sosial di Lingkungan, Keadaan Lingkungan dan Kondisi Keamanan. Adapun Dimensi Perasaan memiliki 3 indikator yakni Perasaan Senang/Riang/Gembira, Perasaan Tidak Khawatir/Cemas dan Perasaan Tidak Tertekan. Kemudian Dimensi Makna Hidup memiliki 6 indikator yakni Kemandirian, Penguasaan Lingkungan, Pengembangan Diri, Hubungan Positif dengan Orang Lain, Tujuan Hidup dan Penerimaan Diri.

#### 3.3.5.1 Perkembangan Indeks Kebahagiaan Sumatera Utara Tahun 2017 dan 2021

Indeks Kebahagiaan Sumatera Utara tahun 2021 meningkat 2,16 poin jika dibandingkan pada tahun 2017, dimana masing-masing sebesar 70,57 dan 68,41. Besarnya indeks masing-masing dimensi penyusun Indeks Kebahagiaan Sumatera Utara, yaitu: (1) Indeks Dimensi Kepuasan Hidup sebesar 74,24, dengan masing-masing Subdimensi Kepuasan Hidup Personal sebesar 69,05 dan Subdimensi Kepuasan Hidup Sosial sebesar 79,44; (2) Indeks Dimensi Perasaan (*Affect*) sebesar 64,14; dan (3) Indeks Dimensi Makna Hidup (*Eudaimonia*) sebesar 72,71. Seluruh indeks diukur pada skala 0-100.

Berdasarkan Indeks Kebahagiaan Sumatera Utara 2021 tersebut, masing-masing dimensi memiliki kontribusi sebagai berikut: Kepuasan Hidup 34,80 persen (Subdimensi Kepuasan Hidup Personal dan Subdimensi Kepuasan Hidup Sosial, masing-masing 50 persen), Perasaan (*Affect*) 31,18 persen, dan Makna Hidup (*Eudaimonia*) 34,02 persen.

#### 3.3.5.2 Indikator Penyusun Indeks Kebahagiaan Sumatera Utara Tahun 2021

Indikator penyusun Indeks Kebahagiaan Sumatera Utara tahun 2021 dapat dilihat pada grafik batang dibawah ini. Indeks indikator tertinggi adalah Keharmonisan Keluarga dengan nilai 82,62 yang merupakan Subdimensi Kepuasan Hidup Sosial. Sementara indeks indikator terendah adalah Perasaan

Tidak Khawatir/Cemas dengan nilai 55,14 yang merupakan Dimensi Perasaan. Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator lain yang memiliki indeks dibawah 70 yaitu Pendapatan Rumah Tangga, Perasaan Tidak Tertekan, Pengembangan Diri, Pendidikan dan Keterampilan serta Perasaan Tidak Khawatir/Cemas.

Gambar 3.3.22  
Indeks Indikator Penyusun Indeks Kebahagiaan Sumatera Utara Tahun 2021



Sumber : Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) 2021

Pada Dimensi Perasaan (*Affect*) memiliki nilai sebesar 64,14, indikator yang memiliki indeks tertinggi adalah Perasaan Senang/Riang/Gembira dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari pada tingkatan 77,13, sementara yang terendah adalah Perasaan Tidak Khawatir/Cemas pada tingkatan 55,14.

Pada Dimensi Makna Hidup (*Eudaimonia*) memiliki nilai sebesar 72,71, indikator yang memiliki indeks tertinggi adalah Penerimaan Diri (75,65), sebaliknya yang terendah adalah Pengembangan Diri (63,70). Dapat disimpulkan, bahwa penduduk Sumatera Utara pada umumnya telah merasa bersyukur atas pencapaian yang telah diraih pada level 75,65. Sementara itu, tingkat pengembangan potensi diri melalui upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sebagainya relatif rendah yaitu 63,70.

### **3.3.5.3 Indeks Kebahagiaan Sumatera Utara Menurut Beberapa Karakteristik**

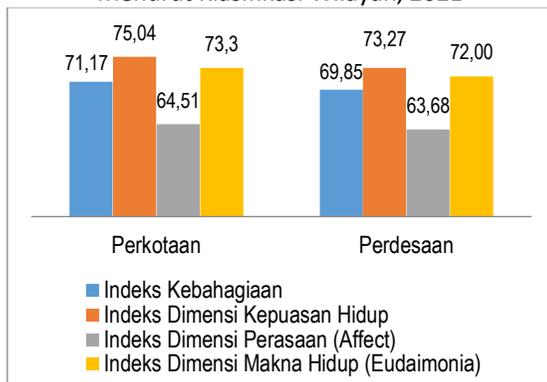
Untuk memahami lebih jauh dan membandingkan antar karakteristik yang berkaitan dengan tingkat kebahagiaan, kepuasan hidup, perasaan, serta makna hidup, maka Indeks Kebahagiaan Sumatera Utara disajikan menurut beberapa karakteristik. Kategori karakteristik tersebut adalah klasifikasi wilayah yang mencakup perkotaan (*urban*) dan perdesaan (*rural*). Sementara itu, karakteristik lainnya meliputi jenis kelamin, status perkawinan, dan kelompok umur.

#### **Klasifikasi Wilayah**

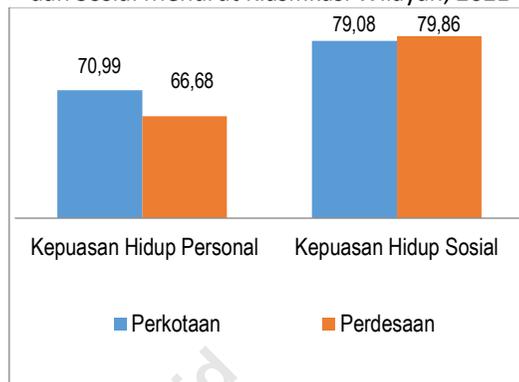
Indeks Kebahagiaan penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan cenderung lebih tinggi dibanding penduduk yang tinggal di perdesaan. Nilai Indeks Kebahagiaan di perkotaan sebesar 71,17, sedangkan di perdesaan sebesar 69,85. Dilihat dari ketiga dimensi penyusun Indeks Kebahagiaan, penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan secara konsisten memiliki indeks yang lebih besar dibanding di wilayah perdesaan. Pola yang serupa terdapat pada Indeks Subdimensi Kepuasan Hidup Personal yang menunjukkan bahwa penduduk di wilayah perkotaan memiliki indeks yang lebih tinggi (70,99) dibandingkan dengan wilayah perdesaan (66,68). Namun, pola yang berbeda ditunjukkan pada Indeks Subdimensi Kepuasan Hidup Sosial. Pada subdimensi ini, penduduk yang tinggal di wilayah perdesaan memiliki indeks yang lebih tinggi (79,86) berbanding dengan (79,08).

Pada indeks perasaan di wilayah perkotaan memiliki nilai indeks 64,51 berbanding 63,68 di perdesaan dan pada indeks makna hidup di wilayah perkotaan memiliki nilai indeks sebesar 73,30 sedangkan di perdesaan memiliki nilai 72,00.

Gambar 3.3.23  
Indeks Kebahagiaan Sumatera Utara  
Menurut Klasifikasi Wilayah, 2021



Gambar 3.3.24  
Indeks Subdimensi Kepuasan Hidup Personal  
dan Sosial Menurut Klasifikasi Wilayah, 2021

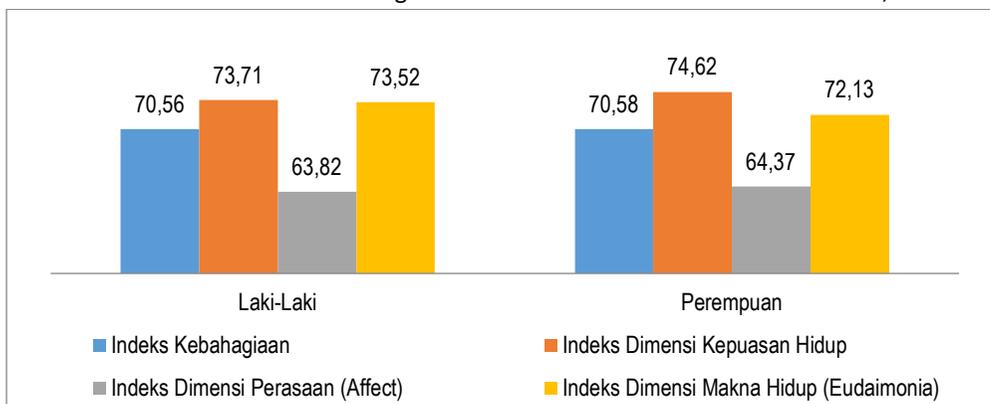


Sumber : Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) 2021

### Jenis Kelamin

Indeks Kebahagiaan penduduk perempuan sebesar 70,58, nilai ini lebih tinggi dibandingkan nilai indeks penduduk laki-laki yang sebesar 70,56. Dilihat dari tiga dimensi penyusun Indeks Kebahagiaan, terdapat pola yang serupa pada Indeks Perasaan (*Affect*) dan Kepuasan Hidup. Indeks Dimensi Perasaan (*Affect*) perempuan lebih tinggi dari laki-laki, masing-masing dengan indeks sebesar 64,37 dan 63,82. Indeks Dimensi Makna Hidup (*Eudaimonia*) laki-laki lebih tinggi dari perempuan, masing-masing dengan indeks sebesar 73,52 dan 72,13. Namun, pada Indeks Kepuasan Hidup penduduk perempuan mempunyai nilai yang lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki, masing-masing dengan indeks sebesar 74,62 dan 73,71.

Gambar 3.3.25  
Indeks Kebahagiaan Sumatera Utara Menurut Jenis Kelamin, 2021



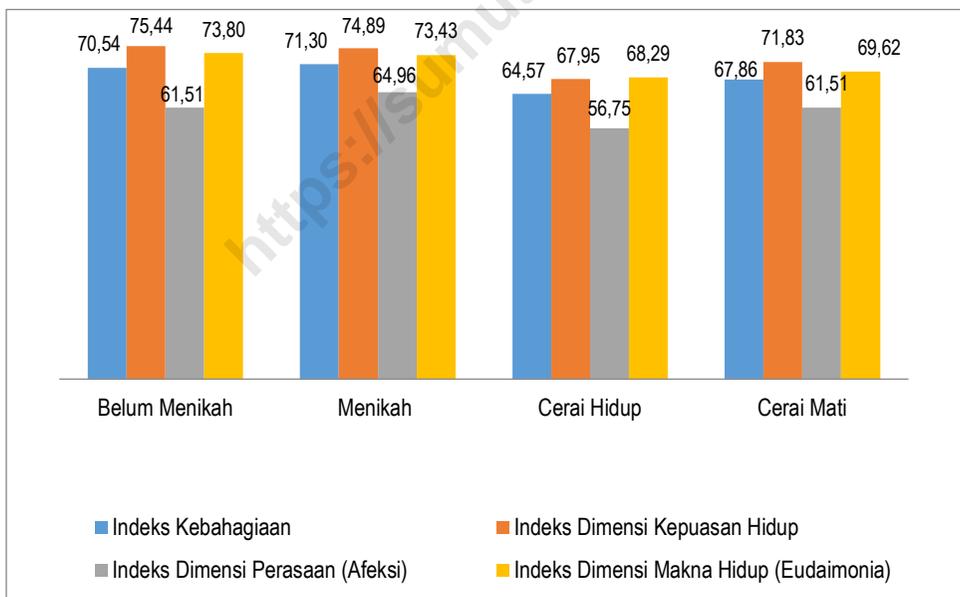
Sumber : Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) 2021

## Status Perkawinan

Indeks Kebahagiaan penduduk yang sudah menikah cenderung lebih tinggi (71,30) dibandingkan penduduk dengan status perkawinan yang lain. Dilihat dari ketiga dimensi penyusun Indeks Kebahagiaan, masing-masing dimensi memiliki pola yang berbeda-beda. Pola yang sama terdapat pada Dimensi Makna Hidup (*Eudaimonia*), yaitu penduduk yang belum menikah memiliki indeks yang tertinggi (73,80) dibandingkan penduduk dengan status perkawinan yang lain. Sedangkan Dimensi Perasaan (*Affect*) indeks yang paling tinggi terdapat pada penduduk yang berstatus menikah (64,96) namun pada Dimensi Kepuasan Hidup indeks yang paling tinggi justru pada penduduk yang berstatus belum menikah (75,44).

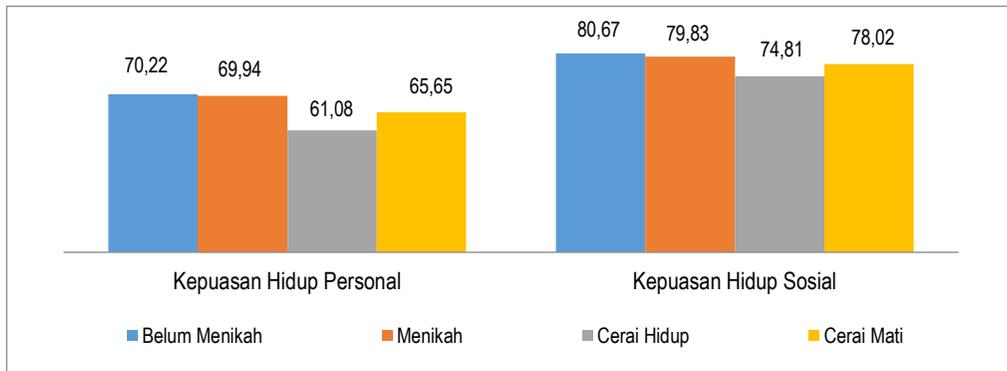
Selanjutnya, dilihat dari Subdimensi Kepuasan Hidup Personal, penduduk yang belum menikah memiliki indeks tertinggi (70,22) dibandingkan penduduk dengan status perkawinan yang lain. Demikian juga pada Indeks Subdimensi Kepuasan Hidup Sosial, indeks tertinggi terdapat pada penduduk yang belum menikah (80,67).

Gambar 3.3.26  
Indeks Kebahagiaan Sumatera Utara Menurut Status Perkawinan, 2021



Sumber : Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) 2021

Gambar 3.3.27  
Indeks Subdimensi Kepuasan Hidup Personal dan Sosial Menurut Status Perkawinan, 2021



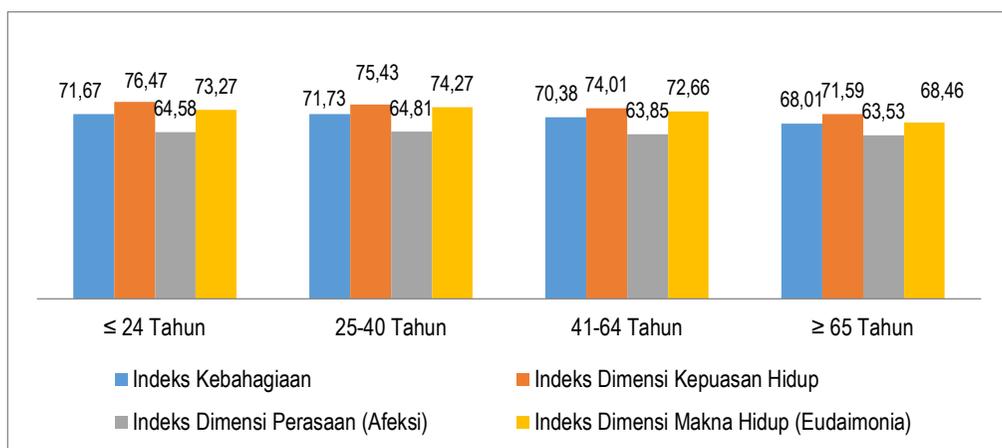
Sumber : Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) 2021

### Kelompok Umur

Indeks Kebahagiaan penduduk cenderung mengalami penurunan dengan semakin bertambahnya umur. Penduduk dengan umur 25-40 tahun memiliki Indeks Kebahagiaan tertinggi sebesar 71,73. Hal yang sama terjadi pada Dimensi Perasaan dan Dimensi Makna Hidup dimana indeks tertinggi pada kelompok usia 25 – 40 tahun. Sementara itu, semakin bertambah umur semakin rendah nilai indeks-indeks penyusun indeks kebahagiaan tersebut.

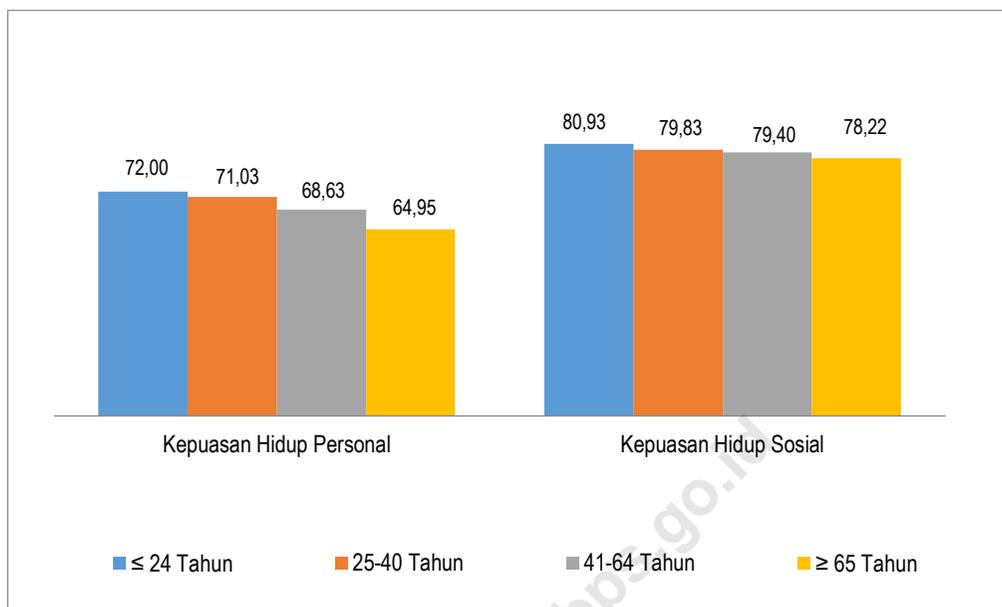
Selanjutnya, Indeks Subdimensi Kepuasan Hidup Personal semakin menurun seiring dengan bertambahnya umur. Demikian juga, pada Subdimensi Kepuasan Hidup Sosial, nilai indeks cenderung semakin menurun seiring bertambahnya umur.

Gambar 3.3.28  
Indeks Kebahagiaan Sumatera Utara Menurut Kelompok Umur, 2021



Sumber : Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) 2021

Gambar 3.3.29  
Indeks Subdimensi Kepuasan Hidup Personal dan Sosial Menurut Kelompok Umur, 2021



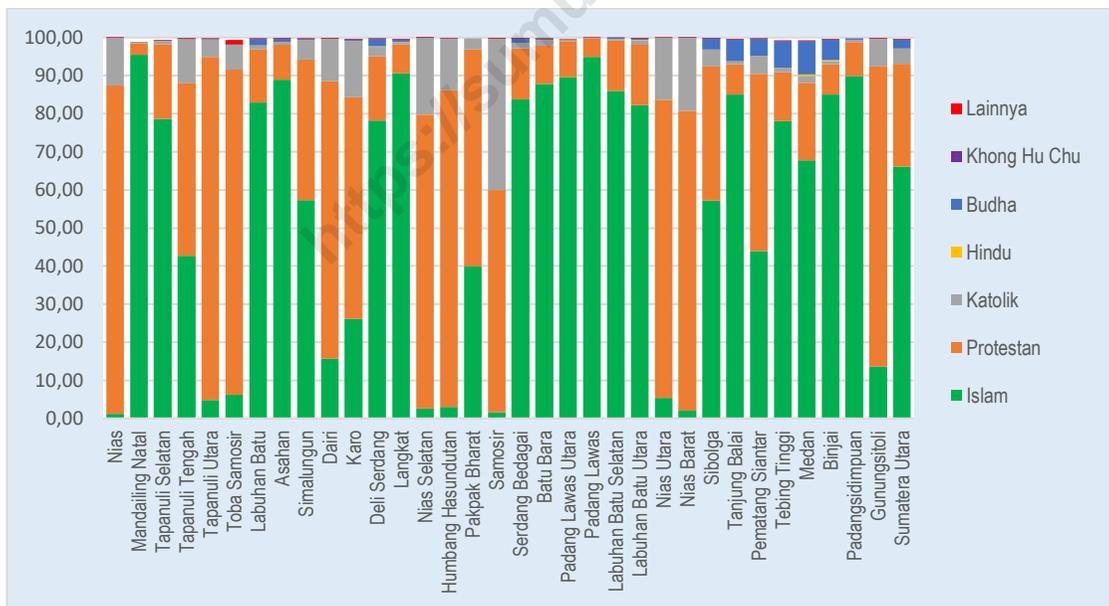
Sumber : Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) 2021

### 3.3.6 Sosial Budaya

Dalam kurun waktu sejarah telah tercatat bahwa di Sumatera Utara telah mampu berkembang beragam adat, baik yang bersifat religi, tradisi, teknologi maupun aspirasi yang semuanya itu merupakan daya penggerak yang sangat besar nilainya dalam memberi corak serta memperkaya kebudayaan, kepribadian dan kebanggaan daerah yang pada gilirannya akan mempengaruhi ketahanan wilayah/sosial masyarakatnya. Nilai-nilai agama yang universal dan abadi sifatnya merupakan salah satu aspek bagi kehidupan dan kebudayaan bangsa. Provinsi Sumatera Utara memiliki iklim yang kondusif bagi perkembangan berbagai ragam agama, khususnya dalam hal toleransi antar umat beragama.

Dari berbagai agama yang ada, sebagian besar penduduk Sumatera Utara memeluk agama Islam sebesar 66,09 persen, kemudian yang memeluk agama Kristen Protestan sebesar 27,03 persen, agama Kristen Katolik sebesar 3,97 persen, agama Budha sebanyak 2,34 persen dan pemeluk agama Hindu sebesar 0,11 persen.

Gambar 3.3.30  
Penduduk Sumatera Utara Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut, 2010



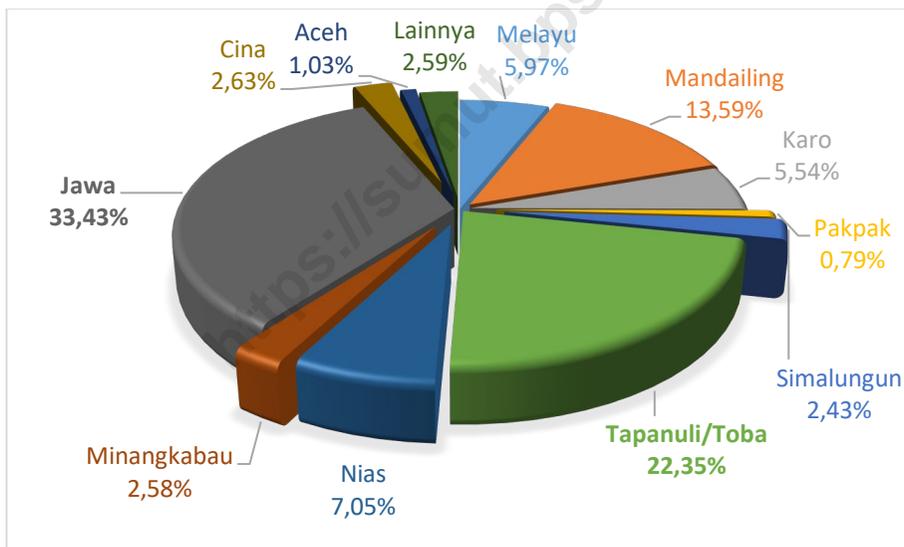
Sumber : Sensus Penduduk 2010

Dilihat berdasarkan kabupaten/kota, mayoritas agama yang dianut oleh masyarakat setempat berbeda-beda sesuai dengan wilayahnya. Kabupaten/kota dengan mayoritas pemeluk agama Islam tertinggi ada di Kabupaten Mandailing Natal (95,51 persen), Padang Lawas (94,98 persen), dan Langkat (90,58 persen). Kabupaten/kota dengan mayoritas pemeluk agama Kristen Protestan tertinggi adalah

Kabupaten Tapanuli Utara (90,24 persen), Nias (86,24 persen), dan Humbang Hasundutan (83,11 persen).

Kondisi sumber daya manusia khususnya penduduk menurut suku bangsa juga menjadi salah satu yang dapat mempengaruhi ketahanan wilayah/sosial yang akan terjadi. Sumatera Utara yang merupakan provinsi dengan penduduk terbesar di pulau Sumatera, dengan berbagai latar belakang dan daya tariknya baik secara ekonomi maupun sosial, menjadikan wilayah Sumatera Utara sebagai provinsi dengan tingkat kemajemukan yang cukup tinggi. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2010, secara umum Sumatera Utara dihuni oleh mayoritas suku Jawa yaitu sebanyak 33,43 persen, suku Tapanuli/Toba sebanyak 22,35 persen, suku Mandailing 13,59 persen, suku Karo 5,54 persen, dan suku lainnya.

Gambar 3.3.31  
Penduduk Sumatera Utara Menurut Suku Bangsa, 2010



Sumber : Sensus Penduduk 2010

<https://sumut.bps.go.id>



---

## **Bab 3.4**

# **Ketahanan Politik & Keamanan**

---

Politik dan keamanan merupakan dua hal yang selalu terkait dan saling mempengaruhi. Adakalanya politik mempengaruhi keamanan, atau sebaliknya situasi keamanan melahirkan ide-ide kebijakan politik. Rasa aman merupakan salah satu kebutuhan hidup masyarakat yang harus terpenuhi. Suatu kemustahilan apabila membicarakan tentang kesejahteraan masyarakat dengan mengabaikan aspek keamanan. Suatu pemerintahan tidak akan mungkin mengklaim masyarakatnya telah sejahtera sementara dalam kehidupan sehari-hari diusik oleh rasa ketakutan dan keresahan terhadap kemungkinan timbulnya ancaman terhadap jiwa, harta, dan kehormatan. Alinea ke-empat Pembukaan UUD 1945 menyebutkan bahwa “.....Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.....”.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sesuai dengan amanat UUD 1945, pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan mewujudkan rasa aman warganya. Bahkan salah satu agenda prioritas pemerintahan saat ini seperti yang tertuang dalam program Nawa Cita menyebutkan akan menghadirkan negara untuk melindungi segenap bangsa dan menghadirkan rasa aman pada seluruh warga negara.

Pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakan oleh pemerintah. Namun, untuk mengukur pencapaiannya baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat bukan sesuatu hal yang mudah. Pembangunan demokrasi memerlukan data empirik untuk dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat. Seiring perkembangan kehidupan demokrasi yang semakin positif, permasalahan politik menjadi sesuatu yang dinamis. Kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan ber aspirasi, kebebasan berpendapat dan kebebasan menentukan sikap dalam berpolitik telah dirasakan masyarakat.

### 3.4.1 Aspek dan Indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Metode Baru

Dalam Indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) terdapat 3 aspek yakni aspek Kebebasan dengan 7 Indikator yakni :

- Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara.
- Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat antar masyarakat.
- Terjaminnya kebebasan berkeyakinan.
- Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan.
- Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu.
- Pemenuhan hak-hak pekerja.
- Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Aspek Kesetaraan memiliki 7 Indikator yakni :

- Kesetaraan Gender.
- Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui Lembaga perwakilan.
- Anti monopoli sumber daya ekonomi.
- Akses masyarakat pada Jaminan sosial dan perlindungan bagi warga miskin.
- Kesetaraan Kesempatan Kerja Antar Wilayah.
- Akses masyarakat terhadap informasi publik.
- Kesetaraan dalam pelayanan dasar.

Sedangkan Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi memiliki 8 Indikator yakni :

- Kinerja Lembaga Legislatif.
- Kinerja Lembaga Yudikatif.
- Netralitas Penyelenggara Pemilu.
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah.
- Jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat.
- Transparansi Anggaran dalam Bentuk Penyediaan Informasi APBN/D oleh Pemerintah.
- Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik.

- Pendidikan politik pada kader partai politik.

Urgensi dari revisi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada hakekatnya untuk melihat dimensi yang lebih luas, bukan hanya politik tetapi juga dimensi ekonomi dan sosial. Kemudian Indeks Demokrasi Indonesia perlu memiliki basis teoretik dan konseptual yang kuat dalam memaknai demokrasi sesuai konteks Indonesia dan perlu melakukan pengukuran di tingkat Pusat bukan hanya tingkat provinsi untuk menjamin IDI yang komprehensif.

Adapun hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah diperlukan studi perbandingan dengan berbagai indeks dan pengukuran demokrasi yang ada serta melihat kelemahan selama 12 tahun penghitungan (2009-2020) dimana dijumpai beberapa indikator yang tidak relevan lagi disamping itu agar setiap kasus diperhitungkan terhadap populasi di Provinsi yang bersangkutan untuk memperoleh penghitungan yang lebih adil. Sebagai tambahan digunakan berita online agar tidak hanya menggunakan satu sumber koran cetak yakni harian Waspada seperti yang dilakukan pada periode selama 12 tahun terakhir.

Secara umum ketiga aspek dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) memiliki arti tersendiri dalam rangka peran dan fungsinya untuk mencapai demokrasi yang lebih baik lagi. Aspek kebebasan diartikan sebagai sejauh mana sektor-sektor atau kelompok yang beragam dapat memperoleh kemandirian dan otonomi dari kekuatan politik otoriter lama, dan kemudian dapat menetapkan kepentingan mereka sendiri. Aspek kesetaraan diartikan sebagai proses sejauh mana kelompok minoritas (yang mengalami diskriminasi dan eksklusif) secara substansial dapat memiliki akses pada sumber daya di berbagai sektor, dan dapat menikmati kesetaraan dalam mengakses sumber daya dan kekuasaan. Aspek kapasitas lembaga demokrasi yaitu sejauh mana lembaga-lembaga demokrasi menginternalisasikan secara prosedural dan substantif upaya-upaya yang menjamin kebebasan dan kesetaraan.

#### **3.4.2 Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumatera Utara Metode Baru**

Indeks Demokrasi Indonesia Sumatera Utara dengan metode baru memiliki nilai 77,60 dimana pada aspek Kebebasan memiliki nilai 88,51 aspek Kesetaraan memiliki nilai 75,27 serta aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi yang memiliki nilai paling rendah sebesar 69,63. Jika dilihat antar provinsi yang ada di Indonesia Provinsi Sumatera Utara berada pada level pertengahan yakni posisi 17 dari total 34 provinsi yang ada di Indonesia, dimana Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tertinggi ada di Provinsi DKI Jakarta dengan nilai indeks 82,08 dan terendah di Provinsi Papua dengan nilai indeks 66,39.

Gambar 3.4.1  
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumatera Utara  
Aspek Kebebasan, tahun 2021

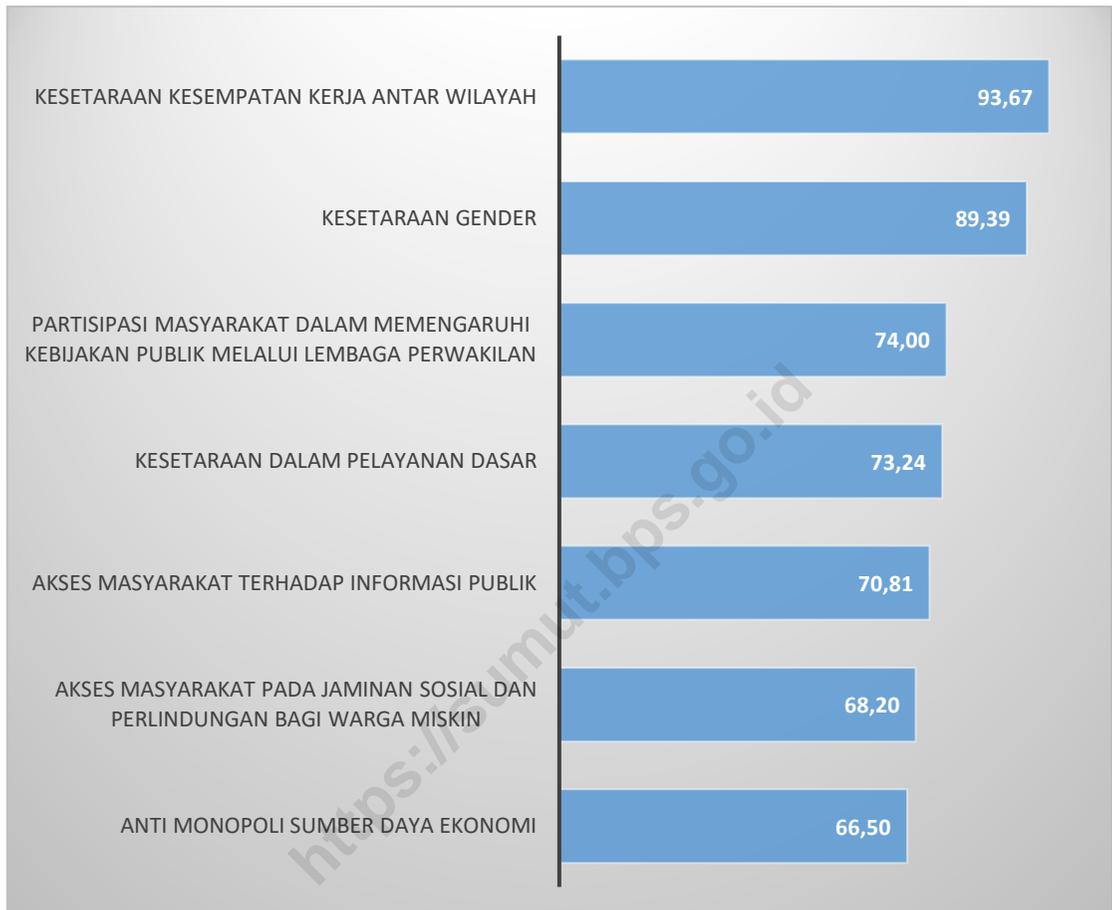


Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Pada aspek kebebasan ada dua indikator yang memiliki nilai sempurna yakni Terjaminnya kebebasan berkeyakinan dan Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat antar masyarakat dengan nilai indeks 100. Sedangkan indikator yang memiliki indeks terendah adalah Pemenuhan Hak-Hak Pekerja dimana memiliki nilai indeks sebesar 60,80.

Pemenuhan Hak-Hak Pekerja merupakan indikator yang masuk dalam dimensi ekonomi dimana masih terdapat hak-hak pekerja yang belum dipenuhi oleh pengusaha dan seringkali masih didapati perselisihan antara buruh dan pengusaha yang tidak jarang harus berakhir di pengadilan, sehingga kondisi inilah yang menyebabkan masih rendahnya nilai indeks untuk indikator ini, sehingga perlu perhatian semua pihak termasuk serikat pekerja dan tentunya peran pemerintah sendiri.

Gambar 3.4.2  
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumatera Utara  
Aspek Kesenjangan, tahun 2021

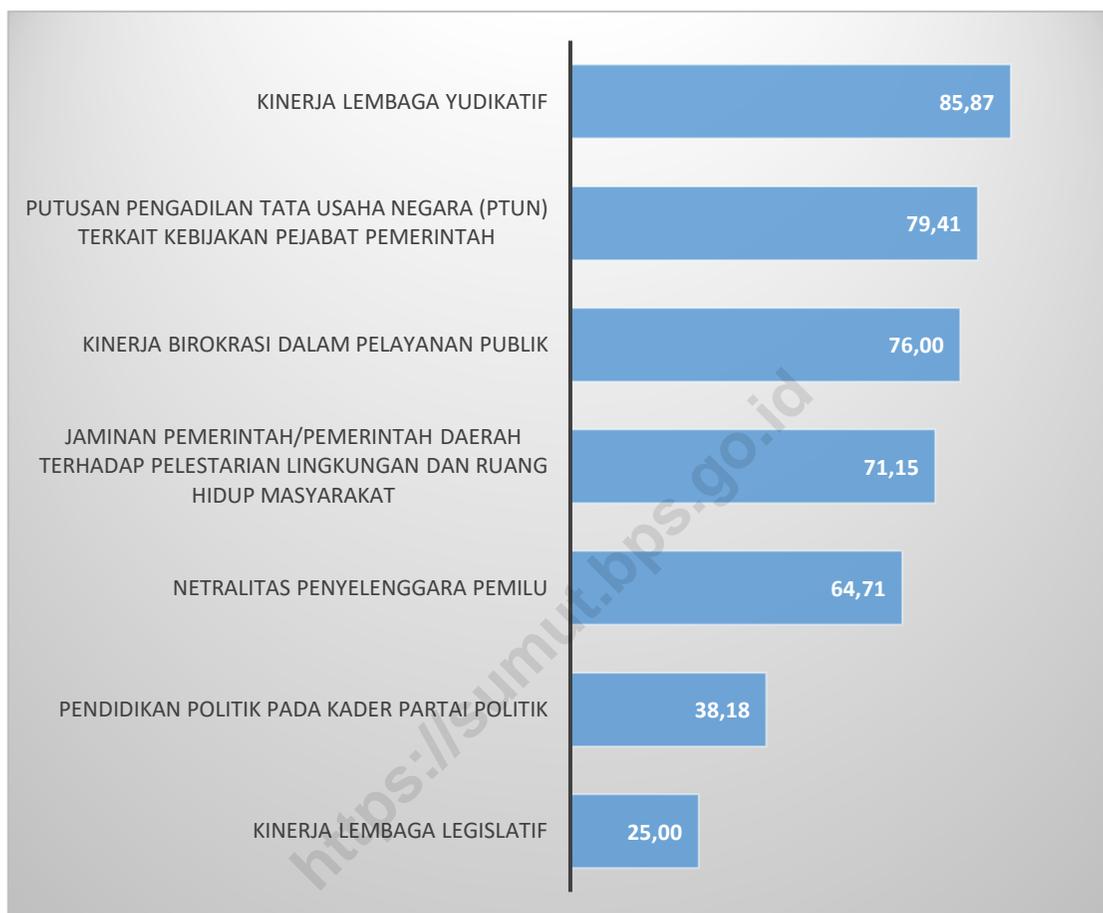


Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Pada aspek kesetaraan indikator yang memiliki nilai tertinggi adalah Kesetaraan Kesempatan Kerja Antar Wilayah dengan nilai indeks 93,67 sedangkan indikator yang memiliki nilai terendah adalah Anti monopoli sumber daya ekonomi dengan nilai indeks 66,50 yang merupakan dimensi ekonomi dimana masih terdapatnya kesenjangan dalam penguasaan sumber daya ekonomi terutama dibidang penguasaan lahan-lahan pertanian dimana masih banyak ditemui petani dengan kepemilikan lahan yang kurang dari seribu meter persegi sedangkan disisi lain ada segelintir orang yang memiliki lahan pertanian hingga puluhan ribu hektar.

Namun pada indikator kesetaraan gender telah memiliki nilai indeks yang cukup baik yakni 89,39 dimana partisipasi perempuan dalam berbagai aspek pembangunan telah dirasakan manfaatnya sehingga peran dan fungsi perempuan tidak hanya sebatas urusan rumah tangga saja.

Gambar 3.4.3  
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumatera Utara  
Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi, tahun 2021



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi memiliki 8 indikator penyusunnya dimana Kinerja Lembaga Yudikatif menempati peringkat pertama dengan nilai indeks 85,87 disusul Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah dengan nilai indeks 79,41 serta Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik dengan nilai indeks 76,00.

Indikator Kinerja Lembaga Legislatif memiliki nilai indeks terendah yakni 25,00 dan sekaligus juga sebagai indeks terendah dari 22 indikator penyusun Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumatera Utara, hal tersebut terutama disebabkan oleh minimnya Peraturan Daerah yang dihasilkan oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara sebagai pembuat Perda tersebut sehingga kedepannya diharapkan produktivitas anggota dewan dalam menghasilkan Perda-Perda perlu didorong agar peningkatan nilai indeks kedepannya menjadi lebih tinggi dari sebelumnya.

### 3.4.3 Politik

#### 3.4.3.1 Pemilihan Presiden 2019

Sejak era reformasi bergulir, kehidupan demokrasi di Indonesia dapat dikatakan mulai melangkah lebih baik. Pengekangan kebebasan pada masa orde baru membuat pemilihan umum di era ini menjadi semacam momentum yang amat penting, sebuah kulminasi perayaan demokrasi dalam rangka bernegara. Pemilihan presiden, wakil presiden serta anggota MPR, DPR, DPD, DPRD secara langsung pertama dilakukan pada tahun 2004.

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 untuk memilih presiden dan wakil presiden Indonesia untuk masa bakti 2019-2024. Pemilu Presiden 2019 merupakan pemilihan presiden langsung keempat di Indonesia. Pada tanggal 20 September 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden tahun 2019, serta melakukan pengundian nomor urut pada 21 September 2018. Berikut merupakan nomor urut kandidat resmi dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 yang ditetapkan KPU:

Tabel 3.4.1 Kandidat Resmi Pemilihan Presiden 2019 yang Ditetapkan KPU

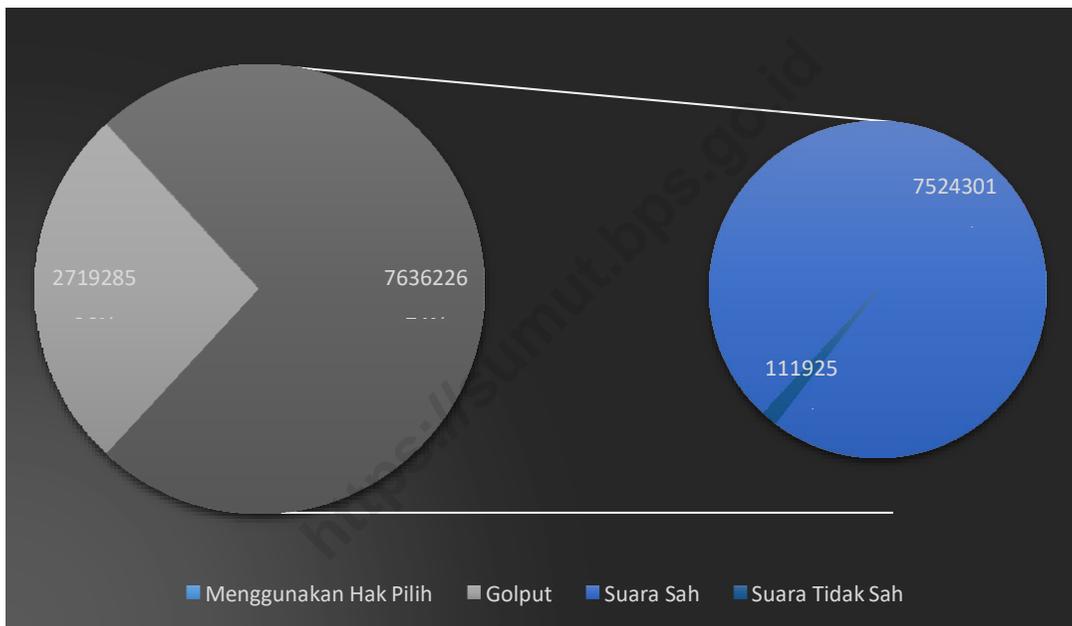
No.Urut	Calon		Partai	Nama	% Kursi	% Suara
	Presiden	Wakil Presiden	Politik	Koalisi	DPR	Legislatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	Ir. H. Joko Widodo	Prof. Dr. (H.C) K.H. Ma'ruf Amin	- PDIP - Golkar - PKB - PPP - Nasdem - Hanura - PKPI	Koalisi Indonesia Kerja	60,69	60,30
02	H. Prabowo Subianto	H. Sandiaga Salahuddin Uno	- Gerindra - PAN - PKS - Demokrat	Koalisi Indonesia Adil Makmur	39,31	39,70

Sumber : kpu.go.id

Jumlah Pemilih di dalam negeri maupun di luar negeri secara nasional berjumlah 199.987.870 pemilih, yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 158.012.506 pemilih dan yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 41.975.364 pemilih. Secara nasional partisipasi aktif masyarakat dalam pemilihan Presiden pada Pemilu tahun 2019 adalah sebesar 79,01 persen dan jumlah golput adalah sebesar 20,99 persen. Dari 158.012.506 pemilih menghasilkan suara sah sebanyak 154.257.601 atau sebesar 97,62 persen dari suara masuk, dan suara tidak sah sebanyak 3.754.905 atau sebesar 2,38 persen.

Dalam Pemilihan Presiden 2019, jumlah pemilih yang terdaftar di Sumatera Utara adalah sebanyak 10.355.511 suara, dengan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih (golput) sebanyak 2.719.285 suara (26,26%) dan pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 7.636.226 suara (73,74%). Dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih terdapat 7.524.301 (98,53%) suara sah dan 111.925 (1,47%) suara tidak sah. Tingkat partisipasi pemilih di Provinsi Sumatera Utara sedikit di bawah tingkat partisipasi pemilih nasional 73,74 persen berbanding 79,01 persen.

Gambar 3.4.4  
Rekapitulasi Jumlah Pemilih Pada Pemilihan Presiden 2019  
di Sumatera Utara



Berdasarkan Keputusan KPU Nomor: 1185/PL.01.9-Kpt/KPU/VI/2019 tertanggal 30 Juni 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Terpilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, diperoleh hasil Pemilihan Presiden 2019 secara nasional dimenangkan oleh pasangan Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C) K.H. Ma'ruf Amin dengan perolehan hasil sebanyak 85.607.362 suara atau 55,50 persen dari suara sah nasional dan 68.650.239 suara atau 44,50 persen diperoleh pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno.

Perolehan suara Hasil Pemilihan Presiden 2019 di Provinsi Sumatera Utara adalah sebanyak 3.936.515 suara atau 52,32 persen dari total suara sah diraih oleh pasangan Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C) K.H. Ma'ruf Amin, dan sebanyak 47,68 persen diraih oleh pasangan H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno.

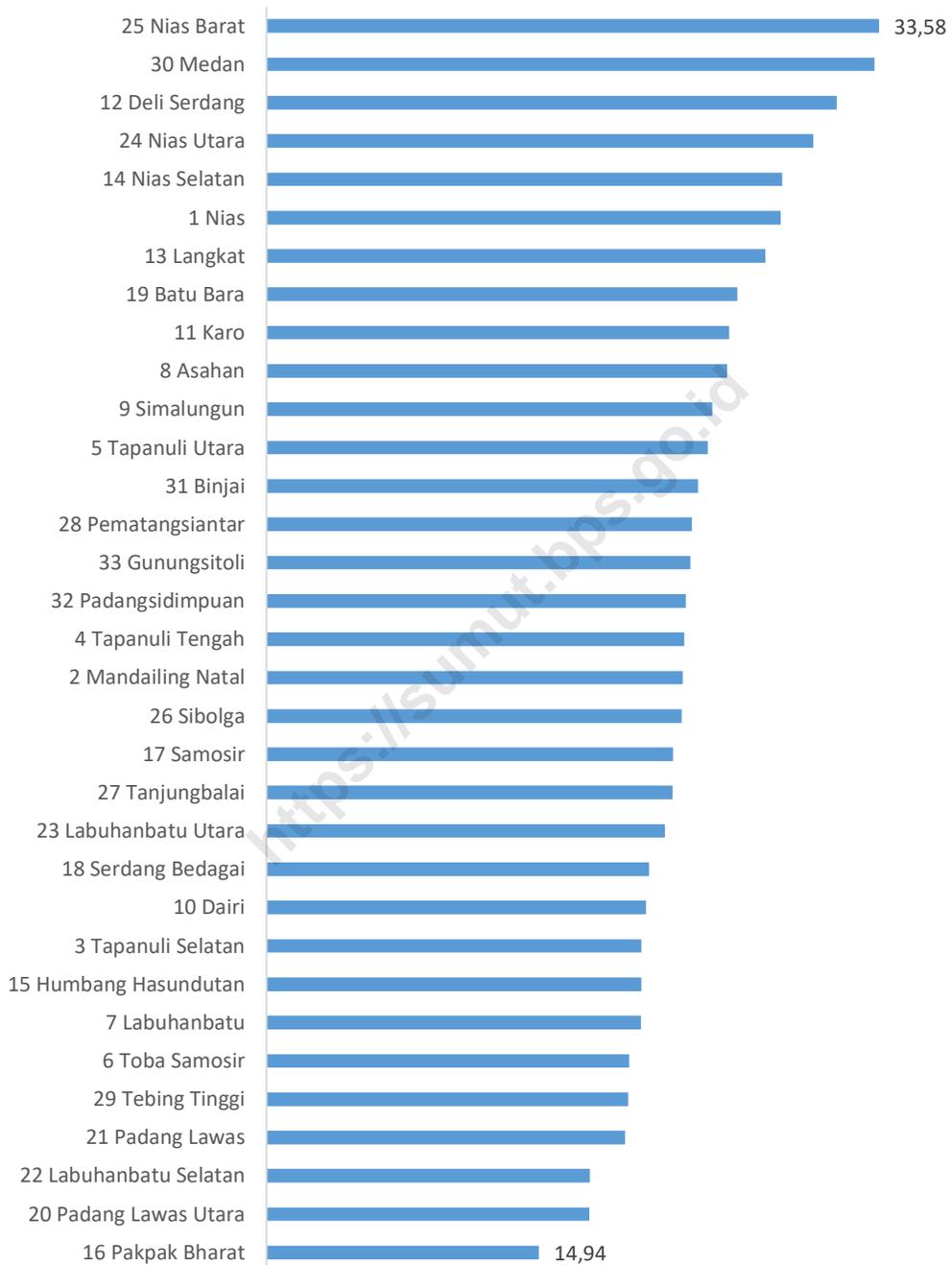
Tabel 3.4.2  
 Hasil Perolehan Suara Pemilihan Presiden 2019 di Sumatera Utara

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
(1)	(2)	(3)
1. Ir. H. Joko Widodo – Prof. Dr. (H.C) K.H. Ma'ruf Amin	3 936 515	52,32
2. H. Prabowo Subianto – H.Sandiaga Salahuddin Uno	3 587 786	47,68

Sumber : kpu.go.id

Dalam hal partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan Presiden 2019 di provinsi Sumatera Utara, mencapai 7.636.226 atau sebesar 73,74 persen, naik dibandingkan dengan Pemilihan Presiden 2014, dimana jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya mencapai 6.356.250 dari 10.129.891 atau sebesar 62,75 persen. Kabupaten/kota dengan partisipasi aktif masyarakat tertinggi di Provinsi Sumatera Utara berada di Kabupaten Pakpak Bharat dengan tingkat partisipasi sebesar 85,06 persen, sedangkan tingkat partisipasi terendah atau golput tertinggi berada di Kabupaten Nias Barat sebesar 33,58 persen.

Gambar 3.4.5  
Urutan Persentase Pemilih Golput pada Pilpres 2019 di Sumatera Utara



Sumber : KPU Provinsi Sumatera Utara

### 3.4.3.2 Pemilihan Kepala Daerah Gubernur Sumatera Utara

Pemilihan langsung Kepala Daerah Gubernur Sumatera Utara (Pemilukada Gubsu) pertama kali dilaksanakan pada bulan Juni 2005. Pilkada Gubernur Sumatera Utara yang terakhir dilaksanakan pada 27 Juni 2018, berjalan dengan baik, lancar dan aman yang diikuti oleh 2 pasangan calon, yaitu:

1. Edy Rahmayadi – Musa Rajekshah
2. Djarot Saiful Hidayat – Sihar Sitorus

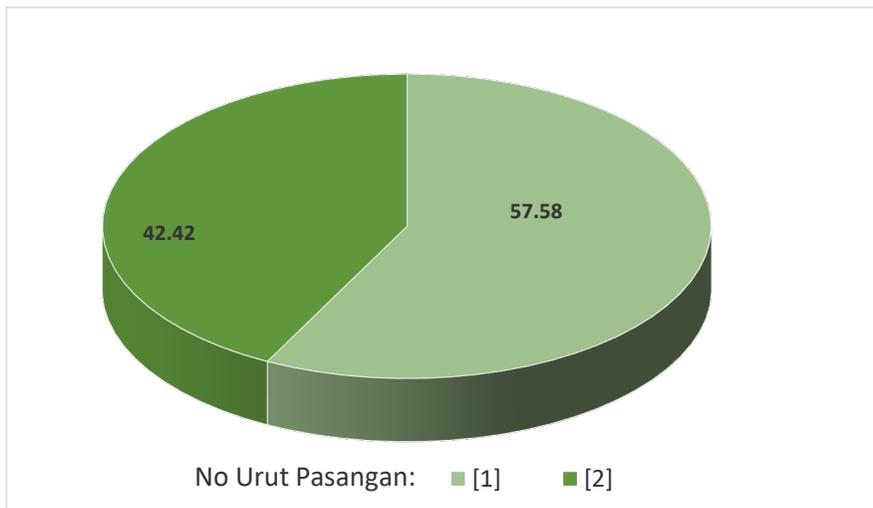
Hasil pemilihan dimenangkan oleh pasangan Edy Rahmayadi – Musa Rajekshah dengan perolehan sebanyak 3.291.137 suara atau 57,58 persen.

Tabel 3.4.3  
Hasil Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Sumatera Utara  
27 Juni 2018

<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Perolehan Suara</b>	<b>Persentase</b>
(1)	(2)	(3)
1. Edy Rahmayadi – Musa Rajekshah	3 291 137	57,58
2. Djarot Saiful Hidayat – Sihar Sitorus	2 424 960	42,42

Sumber: KPUD Provinsi Sumatera Utara

Gambar 3.4.6  
Persentase Perolehan Suara Pasangan Cagub-Cawagub  
Sumatera Utara 2018



Sementara jika dilihat dari partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018 cukup tinggi yaitu sebesar 61,78 persen, dimana angka Golput sebanyak 3.592.457 suara atau sebesar 38,22 persen. Persentase tertinggi Golput berada di Kabupaten Nias Utara sebesar 62,20 persen. Kabupaten/Kota di kepulauan Nias adalah wilayah dengan persentase Golput tertinggi di Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan persentase Golput terendah sebesar 19,93 persen berada di Kabupaten Dairi dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan Gubernur sebesar 80,07 persen. Diantara 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, hanya ada 2 Kabupaten dengan persentase Golput diatas 50 persen, yaitu Nias Barat ( 53,10 persen) dan Nias Utara (62,20 persen), dapat dikatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat di Sumatera Utara cukup tinggi atau dengan kata lain sangat antusias dalam memilih Gubernur mereka.

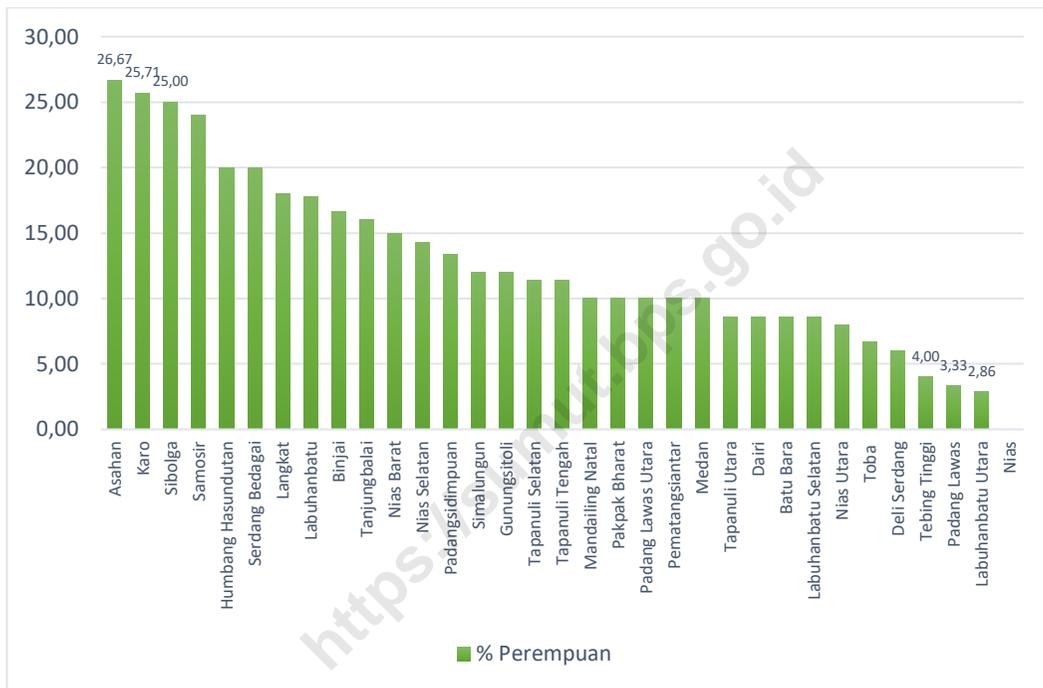
### **3.4.3.3 Pemilihan Wakil Rakyat**

Hasil Pemilihan Umum adalah merupakan hasil pilihan masyarakat terhadap anggota legislatif yang duduk menjadi wakil rakyat mewakili masyarakat pemilih berdasarkan wilayah atau Daerah Pemilihan (Dapil) yang telah ditentukan sebelumnya. Jumlah wakil rakyat yang terpilih berkaitan dengan jumlah perolehan suara dari partai politik yang terdaftar dalam pemilu dan juga suara perolehan masing-masing calon wakil rakyat secara langsung dan perorangan hasil dari pilihan masyarakat. Pada Pemilu Legislatif (Pileg) terakhir di Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 diikuti oleh 16 partai politik. Sementara yang berhasil mendapatkan kursi di DPRD TK I Sumatera Utara sebanyak 11 partai politik, dengan 3 partai terbesar memperoleh kursi terbanyak yaitu PDIP 19 kursi, Partai Golkar dan Partai Gerindra masing-masing 15 kursi. Adapun 5 partai politik yang tidak mendapatkan kursi di DPRD tingkat I Sumatera Utara adalah Partai Garuda, Partai Berkarya, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Bulan Bintang dan PKPI.

Keterwakilan perempuan dalam legislatif saat ini menjadi perhatian oleh pemerintah. Wujud dari upaya pemerintah untuk menaikkan peran perempuan dalam kehidupan berpolitik adalah dengan mewajibkan setiap partai politik menyertakan paling sedikit 30 persen perempuan dalam daftar calon legislatif yang akan ikut serta dalam pemilihan calon anggota dewan. Bagaimanapun juga hasil akhir ada di tangan rakyat sebagai pemilih. Dari hasil pemilihan legislatif 2019 keterwakilan perempuan di legislatif Provinsi Sumatera Utara adalah 13 persen, sedangkan rata-rata keterwakilan perempuan di legislatif kabupaten/kota se-Sumatera Utara adalah sebesar 12,67 persen dan tidak ada satu kabupaten/kota-pun yang keterwakilan perempuannya di atas 30 persen. Keterwakilan perempuan di legislatif provinsi Sumatera Utara lebih tinggi dari rata-rata keterwakilan perempuan di legislatif se-kabupaten/kota di Sumatera Utara, menunjukkan peran aktif dan kepercayaan masyarakat Sumatera Utara lebih tinggi terhadap peranan perempuan di tingkat Provinsi. Keterwakilan tertinggi diatas 20 persen ada di kabupaten Asahan 26,67 persen diikuti oleh kabupaten Karo dan Kota Sibolga dengan

25,71 dan 25 persen. Sementara itu, persentase keterwakilan perempuan terendah ada di Kabupaten Nias dengan 0 persen, tidak ada satu orang pun anggota DPRD dari perempuan. Ada 3 kabupaten kota lainnya yang persentase keterwakilan perempuan dibawah 5 persen yaitu: Labuhanbatu Utara sebesar 2,86 persen, Padanglawas 3,3 persen dan kota Tebingtinggi dengan 4 persen.

Gambar 3.4.7  
 Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara pada Pemilihan Umum Legislatif 2019

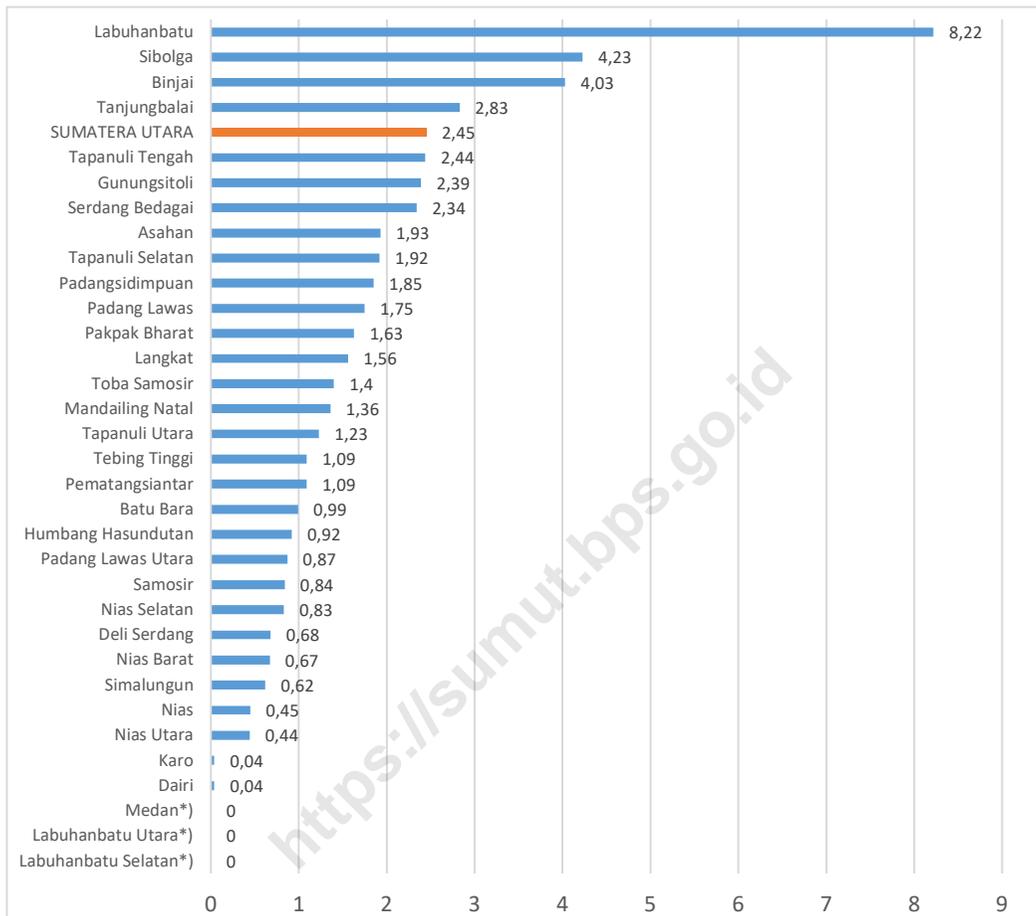


Sumber : Sekretariat DPRD

### 3.4.4 Keamanan dan Ketertiban

Berdasarkan data Polres Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara, angka kejahatan paling tinggi di Sumatera Utara terjadi di kota-kota, yang tertinggi di Kabupaten Labuhan Batu sebesar 8,22 persen, artinya dari setiap 1.000 penduduk Kabupaten Labuhan Batu terjadi 8 kejadian tindak kejahatan, diikuti Kota Sibolga (4,23%), Kota Binjai (4,03%), Kota Tanjung Balai (2,83%). Sementara tingkat kejahatan paling rendah ada di kabupaten Dairi dan Karo dengan tingkat kejahatan masing-masing sebesar 0,04 persen dan Kabupaten Nias Utara dengan tingkat kejahatan sebesar 0,44 persen.

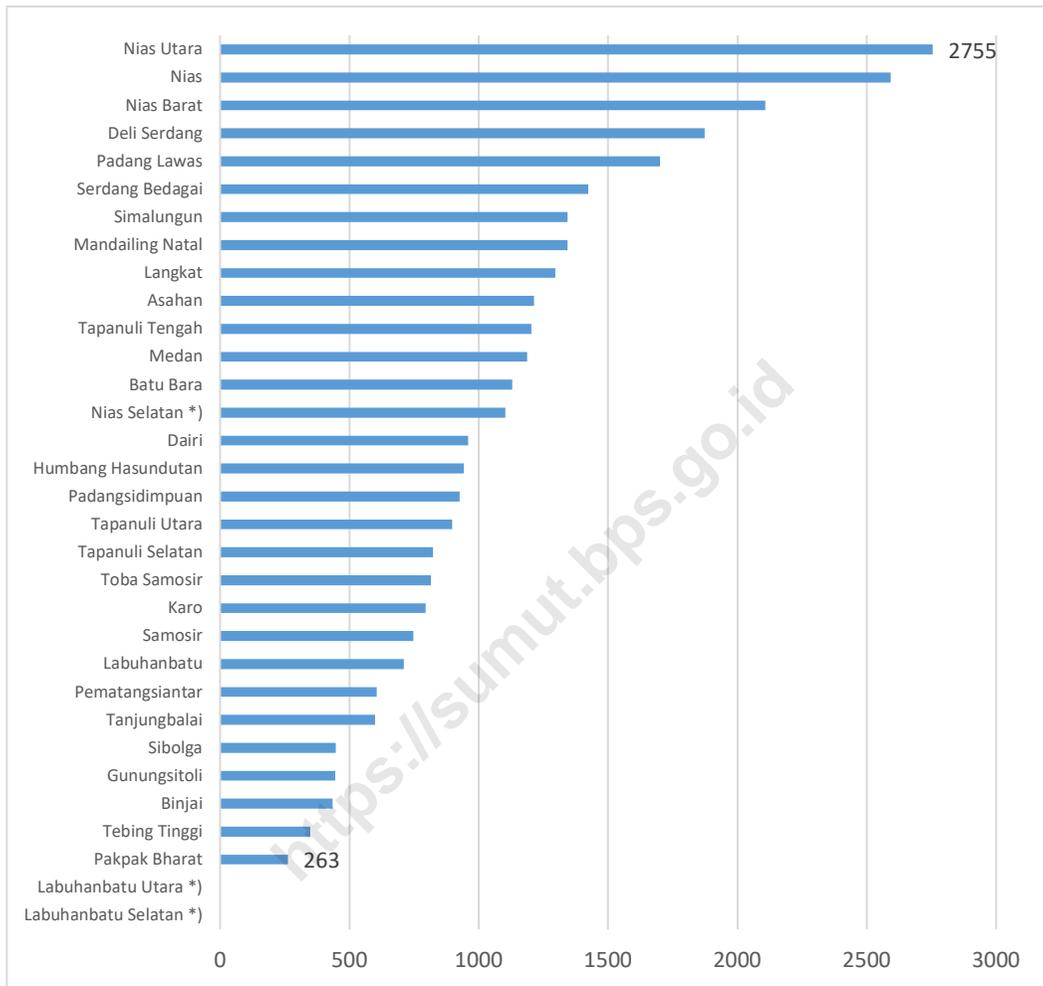
Gambar 3.4.8  
Tingkat Kejahatan di Provinsi Sumatera Utara menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021  
(Kejadian per 1000 penduduk)



Sumber :Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Kepolisian Daerah Kabupaten/Kota  
Keterangan: \*) Data tidak tersedia

Rasio antara jumlah penduduk per polisi di Sumatera Utara berdasarkan kabupaten/kota pada tahun 2021 dapat dilihat pada grafik 3.4.9, nilai tertinggi yang menggambarkan rasio terendah ada di Kabupaten Nias Utara sebesar 2.755, angka tersebut berarti bahwa setiap 1 orang personil polisi harus melayani sebanyak 2.755 orang penduduk. Sementara untuk rasio tertinggi ada di Kabupaten Pakpak Bharat sebesar 263 yang berarti hanya 263 orang penduduk yang harus dilayani 1 orang personil polisi.

Gambar 3.4.9  
 Jumlah Penduduk Untuk Setiap Satu Orang Polisi di Sumatera Utara Berdasarkan  
 Kabupaten/Kota Tahun 2021



Sumber :Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Kepolisian Daerah Kabupaten/Kota

Keterangan: \*) Masih tergabung dengan kabupaten induk

**ST 2023**  
**SENSUS PERTANIAN**

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jl. Asrama No. 179 Medan 20123

Telp : (061) 8452343, Fax : (061) 8452773

Homepage : <http://sumut.bps.go.id> E-mail : [bps1200@bps.go.id](mailto:bps1200@bps.go.id)

ISSN: 2745-7079



9 772745 707001